



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



 [dit.binaptkk](https://www.instagram.com/dit.binaptkk)

Model Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Perempuan Rentan dengan Kondisi Kemiskinan

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DITJEN BINAPENTA DAN PKK

| 2025

**Model Pemberdayaan dan Penempatan
Tenaga Kerja Perempuan Rentan
dengan Kondisi Kemiskinan**



KEMNAKER

**DIREKTORAT BINA PENEMPATAN TENAGA KERJA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Bekerja sama dengan:

**PUSAT PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
KETENAGAKERJAAN**

TAHUN 2025



Model Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Perempuan Rentan dengan Kondisi Kemiskinan

Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bekerja sama dengan:

Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan
Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan

Tim Penyusun

Pengarah	:	Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Penanggung Jawab Kegiatan	:	Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus
Penanggung Jawab Substansi	:	Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan
Ketua	:	Rotua Yossina Warsida, S.E., M.Si.
Anggota Penulis	:	1. Dra. Erwina Wahyu Hindarti, M.Si. 2. Hadhi Raharja, S.IP. 3. Lusiana Tatipata, S.P., M.Si. 4. Shely Marfuah, S.Sos., M.M. 5. Sita Agung Trisnantari, S.IP., M.Sc. 6. M. Silahul Mu'min, S.E. 7. Fauzan Haqi Lukita, S.I.P. 8. Nanang Arifin, S.E. 9. Hanifa Zazqia Agustina, S.E. 10. Cressa Fauziyah Violintina, S.M. 11. Annisa Sufana Nur Ainun, S.A.P.
Penata Letak	:	Anindita Fiqhunnisa, S.Pd. M. Angga Pranata Ginting, S.Kom.
Desain Sampul	:	Anindita Fiqhunnisa, S.Pd.

© 2025 Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus

Karya ini merupakan produk publikasi Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan.

Dilarang memperbanyak tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, *photoprint*, *microfilm*, dan sebagainya.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR SINGKATAN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	6
D. Metode Kajian.....	6
E. Kerangka Berpikir	8
BAB II TINJAUAN LITERATUR	11
A. Gambaran Umum Perempuan Rentan.....	11
B. Definisi Kelompok Rentan dan Perempuan Rentan ...	20
C. <i>Benchmarking</i>	32
BAB III METODOLOGI	79
A. Focus Group Discussion (FGD).....	79
B. Tinjauan Literatur.....	81
C. Analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT).....	81

D. Metode Bardach	83
E. Keterkaitan antara Analisis SWOT dan Metode Bardach	84
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	87
A. Ringkasan Hasil Benchmarking	87
B. Analisis SWOT	105
C. Alternatif Kebijakan	126
D. Analisis Pemilihan Alternatif Kebijakan	130
BAB V REKOMENDASI DAN	135
KESIMPULAN	135
A. Rekomendasi Kebijakan	135
B. Kesimpulan	147
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	161



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Berpikir	9
Gambar 2.1	Jumlah Perempuan Rentan Miskin Berdasarkan Status Pekerjaan	11
Gambar 2.2	Perempuan Rentan dalam Kemiskinan yang Menganggur Berdasarkan Pendidikan.....	12
Gambar 2.3	Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Perempuan Rentan dalam Kemiskinan Tertinggi di Indonesia	15
Gambar 2.4	Penduduk rentan dalam kemiskinan yang menganggur berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten/kota di (a) Jawa Barat, dan (b) Jawa Timur	17
Gambar 2.5	Ekosistem Inklusi	44
Gambar 4.1	Langkah Strategis Program PERENTA	138
Gambar 4.2	Ekosistem Program PERENTA	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Definisi Kelompok Rentan menurut Beberapa Sumber	20
Tabel 2.	<i>Benchmarking</i> Program Pemberdayaan Perempuan Rentan di Berbagai Negara	87
Tabel 3.	<i>Benchmarking</i> Program Kementerian/Lembaga Terpilih di Indonesia	96
Tabel 4.	Hasil Analisis SWOT	105
Tabel 5.	Identifikasi Hasil Analisis SWOT	120
Tabel 6.	Alternatif Kebijakan	128
Tabel 7.	Hasil Analisis Pemilihan Alternatif Kebijakan	130
Tabel 5.1	Uraian “Perempuan Rentan Bekerja (PERENTA)”	135
Tabel 5.2	Ekosistem Program PERENTA	140
Tabel 5.3	Rencana Aksi “Perempuan Rentan Bekerja (PERENTA)”	143

DAFTAR SINGKATAN

BBPKK	Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja
AIDRAN	<i>Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network</i>
APINDO	Asosiasi Pengusaha Indonesia
BaKTI	<i>Bureau for Research and Knowledge Transfer for Indonesian Development</i>
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BPVP	Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
CHPM	<i>Center for Health Policy and Management</i>
Ditjen Binalavotas	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
Ditjen Binapenta & PKK	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
IFLS	The Indonesian Family Life Survey
IHK	Indeks Harga Konsumen
ILO	<i>International Labour Organization</i>
K/L	Kementerian / Lembaga
KADIN	Kamar Dagang dan Industri
KAPAL Perempuan	Lingkar Pendidikan Alternatif Perempuan
Kemen PPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemensos	Kementerian Sosial
Kemnaker	Kementerian Ketenagakerjaan
KPM	Keluarga Penerima Manfaat

KUBE	Kelompok Usaha Bersama
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NAPZA	Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif
NGO	<i>Non Governmental Organization</i>
PEKKA	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
PENA	Pahlawan Ekonomi Nusantara
PERENTA	Perempuan Rentan Bekerja
PERMAMPU	Konsorsium Perempuan Sumatera MAMPU
Permen	Peraturan Menteri
Permendes PDTT	Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
PKBI	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
PKH	Program Keluarga Harapan
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PP	Peraturan Pemerintah
PPIM	Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat
PPSE	Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi
PR YAKKUM	Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum
Pusbangjak Ketenagakerjaan	Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan
PUSKAPA	Pusat Kajian Perlindungan Anak
RAN	Rencana Aksi Nasional
Regsosek	Registrasi Sosial Ekonomi
RPJPN 2045	Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2045
SAD	Suku Anak Dalam
SD	Sekolah Dasar
SDGs/TPB	<i>Sustainable Development Goals</i> / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SIAPkerja	Sistem Informasi Aspirasi dan Pelayanan Kerja
SIGAB Indonesia	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia
SMA	Sekolah Menengah Atas

SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats</i>
TKI / PMI	Tenaga Kerja Indonesia/Pekerja Migran Indonesia
TKM	Tenaga Kerja Mandiri
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPPO	Tindak Pidana Perdagangan Orang
TPT	Tingkat Penganggaran Terbuka
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
UPTP	Unit Pelaksana Teknis Pusat
UN Women	<i>United Nation Entity for Gender Equality and The Empowerment of Women</i>
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
UU	Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya kajian *Model Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Perempuan Rentan dengan Kondisi Kemiskinan*. Kajian ini merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan.

Perempuan masih menghadapi tantangan dan hambatan struktural yang kompleks baik di tingkat global maupun domestik. Minimnya akses pendidikan, pelatihan, serta pengaruh norma sosial dan budaya dipandang menjadi akar permasalahan tersebut sehingga membatasi ruang gerak perempuan untuk mengembangkan potensi. Hal ini pada akhirnya menempatkan perempuan dalam kondisi rentan karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan sektor informal yang tidak memiliki perlindungan hukum, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial yang menyebabkan mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peran pemerintah untuk hadir melalui program-program pemberdayaan perempuan bagi kelompok rentan tersebut. Kajian ini mengusulkan *Program Perempuan Rentan Bekerja (PERENTA)*, melalui skema dalam program kewirausahaan, pelatihan keterampilan dan pelatihan vokasional serta

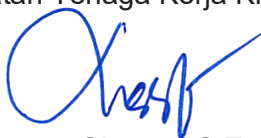
penempatan tenaga kerja. Program PERENTA dapat terimplementasi didukung dengan adanya ekosistem pemberdayaan dengan melibatkan kolaborasi berbagai kementerian terkait.

Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Ketenagakerjaan untuk menghadirkan kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti, khususnya dalam meningkatkan peluang kerja dan kemandirian perempuan rentan dengan kondisi miskin.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui dukungan data, analisis, maupun rekomendasi kebijakan. Kami berharap dokumen analisis kebijakan ini dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan rentan yang lebih efektif, terukur dan berkelanjutan.

Jakarta, Desember 2025

Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus



Anggun Sintana, S.E., M.M.

ABSTRAK

Perempuan masih menghadapi tantangan dan hambatan struktural yang kompleks baik di tingkat global maupun domestik. Data World Bank (2024) menunjukkan hanya 46,6% perempuan di dunia yang bekerja, jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mencapai 69,7%. BPS (2024) mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia hanya 56,42% sangat jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai 84,66%. Minimnya akses pendidikan, pelatihan, serta pengaruh norma sosial dan budaya dipandang menjadi akar permasalahan tersebut sehingga membatasi ruang gerak perempuan untuk mengembangkan potensi. Hal ini pada akhirnya menempatkan perempuan dalam kondisi rentan karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan sektor informal yang tidak memiliki perlindungan hukum, kepastian pendapatan, dan jaminan sosial yang menyebabkan mereka hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) BPS tahun 2022, terdapat 14,2 juta perempuan berusia 31-59 tahun yang termasuk dalam kategori miskin (desil 1) dan sekitar 1,83 juta di antaranya belum memiliki pekerjaan. Mayoritas perempuan rentan tersebut memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar (SD), yaitu 1.150.788 orang (62,8%). Ironisnya, distribusi perempuan miskin yang belum bekerja tersebut justru terkonsentrasi pada wilayah-wilayah yang secara ekonomi maju seperti pusat ekonomi dan industri

di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan perlunya peran pemerintah untuk hadir melalui program-program pemberdayaan perempuan bagi kelompok rentan tersebut.

Berdasarkan hasil pemilihan alternatif kebijakan menggunakan metode *Bardach* dan didukung dengan analisis SWOT dan FGD bersama berbagai *stakeholders*, maka diusulkan Program Perempuan Rentan Bekerja (PERENTA) sebagai upaya untuk memberdayakan perempuan pada kondisi rentan miskin. PERENTA dirancang sebagai program pemberdayaan fleksibel berbasis potensi lokal dengan dua skema yaitu peningkatan kewirausahaan dan pelatihan keterampilan. PERENTA memiliki keunggulan infrastruktur kelembagaan yang sudah tersedia seperti BPVP, BBPKK dan SIAPKerja sehingga program ini lebih siap dijalankan secara luas dan cepat. Selain itu, PERENTA juga merupakan program yang efisien karena mendorong adanya kolaborasi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga sehingga mendukung implementasi program secara terpadu untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan rentan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: pemberdayaan, penempatan, perempuan rentan, kemiskinan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di balik semakin menguatnya narasi global tentang inklusivitas dan kesetaraan gender, masih terdapat satu realita pahit yang kerap membayangi kaum perempuan. Perempuan masih menjadi salah satu kelompok yang menduduki posisi paling rentan dalam struktur sosial dan ekonomi (Achmad, 2023). Baik di ruang domestik maupun di ruang publik, perempuan kerap dihadapkan oleh berbagai tantangan dan hambatan struktural yang kompleks. Kondisi ini pada akhirnya membatasi potensi dan ruang gerak mereka dalam mengakses berbagai kesempatan sehingga mereka cenderung sering terjebak dalam kondisi yang penuh kerentanan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sebagian kecil wilayah, tetapi juga muncul sebagai isu global yang bersifat struktural dan sistemik. Fenomena ini juga dapat ditemui di berbagai konteks kehidupan, salah satunya dalam konteks ketenagakerjaan.

Secara global, partisipasi perempuan dalam dunia kerja masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data yang dirilis oleh World Bank (2024), hanya sebanyak 46,6% perempuan di dunia yang bekerja dibandingkan laki-laki yang mencapai angka 69,7% sedangkan menurut BPS (2024) tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki di Indonesia mencapai 84,66% sedangkan perempuan hanya 56,42%. Selain itu, menurut estimasi ILO menunjukkan bahwa secara rata-rata global perempuan menerima upah 20% lebih rendah

dibanding laki-laki (Chang *et al.*, 2019). Dalam konteks Indonesia, penelitian Laili & Damayanti (2018) juga menyebutkan bahwa terdapat diskriminasi upah, yaitu perempuan cenderung mendapatkan upah lebih rendah dibanding produktivitasnya. Dari data ini dapat dilihat bahwa ada *gap* atau kesenjangan yang cukup tinggi antara keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam dunia kerja.

Permasalahan kesenjangan ini salah satunya berakar dari minimnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan. Hal ini sejalan dengan pernyataan ILO (2024) yang menemukan bahwa perempuan menghadapi hambatan yang jauh lebih besar dalam memperoleh akses pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Kondisi ini menyebabkan mereka cenderung lebih tertinggal dari segi pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan jika dibandingkan dengan laki-laki. Permasalahan lain juga disebabkan karena adanya norma sosial dan kultur yang membatasi perempuan untuk bekerja. Perempuan sering diasosiasikan dengan pekerjaan domestik (pekerjaan rumah tangga). Penelitian Samtleben & Müller (2022) menyebutkan bahwa beban kerja rumah tangga berdampak negatif pada partisipasi kerja perempuan dengan *housework* (bersih-bersih, memasak, dll) memiliki efek lebih besar dibanding perawatan anak/orang tua karena memakan jam lebih banyak. Akibatnya, mereka akan sulit untuk bersaing memasuki pasar kerja, terutama pasar kerja formal yang pada umumnya mensyaratkan tingkat keterampilan yang lebih tinggi dibanding pekerjaan sektor informal dan memiliki jam kerja tertentu. Kondisi ini mengakibatkan terbatasnya pilihan kerja perempuan dan pada akhirnya mereka rentan terjebak dalam pekerjaan yang tidak layak.

Menurut UNICEF (2020), perempuan cenderung lebih banyak terlibat dalam pekerjaan yang bersifat rentan. Tingkat partisipasi perempuan dalam pekerjaan sektor informal masih sangat tinggi. Hal ini terbukti dari data ILO (2023) yang mencatat bahwa sebanyak 55,2% atau lebih dari setengah perempuan yang bekerja di dunia merupakan pekerja sektor informal. Hal ini cenderung membuat mereka rentan karena pada umumnya pekerjaan informal tidak memberikan perlindungan hukum, kepastian pendapatan, jenjang karir yang prospektif, maupun akses terhadap jaminan sosial. Ini berarti bahwa meskipun perempuan bekerja, mereka tetap berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya aman dan rentan terhadap guncangan ekonomi.

Di Indonesia sendiri, perempuan bahkan mengalami kondisi kerentanan yang lebih kompleks. Kerentanan ini tidak hanya tercermin dari sulitnya akses terhadap sumber daya penting, tetapi juga berakar dari keberadaan hukum yang masih diskriminatif, fenomena ketimpangan gender yang masih terlihat nyata, serta adanya struktur sosial dan nilai-nilai budaya yang patriarki (Larasati, 2021; Fajarwati et al., 2020). Struktur sosial yang patriarki ini membuat perempuan sering kali dinomorduakan dalam urusan ekonomi. Stigma yang sudah mengakar di masyarakat mengharuskan perempuan untuk mengemban pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Ini bahkan kerap dilihat sebagai kodrat yang tidak bisa ditawar.

Kondisi ini menciptakan hambatan struktural yang membatasi ruang gerak perempuan dalam mengembangkan potensi diri mereka melalui akses pendidikan dan pelatihan. Perempuan yang ingin bekerja sering kali mengalami keterbatasan waktu karena juga harus menanggung beban kerja domestik, keterbatasan mobilitas, keterbatasan

informasi, serta keterbatasan kompetensi dan keterampilan. Hambatan struktural ini membuat mereka mau tidak mau menggantungkan hidup mereka dengan upah tidak tetap dari pekerjaan informal. Ketika terjadi krisis seperti instabilitas makroekonomi, maka mereka akan menjadi salah satu pihak yang rentan kehilangan sumber penghidupannya (Nisak & Sugiharti, 2020).

Oleh karena itu, kerentanan perempuan dalam konteks ketenagakerjaan ini tidak hanya soal minimnya pendapatan ataupun perlindungan sosial. Ini merupakan pintu masuk menuju kemiskinan lintas generasi. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2023, ada sebanyak 9,68% perempuan Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Persentase ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang berada di angka 9,40% (ANTARANews, 2023). Kelompok perempuan ini akan sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan bahkan berpotensi untuk jatuh ke lubang yang lebih dalam.

Bappenas (2018) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi standar kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Berdasarkan data Regsosek (2022), lebih dari 14 juta perempuan di Indonesia tergolong ke dalam miskin (berada dalam Desil 1). Sekitar 12% atau 1,8 juta dari jumlah tersebut merupakan pengangguran alias tidak memiliki pekerjaan. Jumlah yang cukup signifikan ini menunjukkan betapa mereka menghadapi tekanan yang berlapis, karena selain harus menanggung beban kerja domestik, mereka juga harus menghadapi keterbatasan akses pengembangan kompetensi serta pekerjaan dan upah yang layak yang pada akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam garis kemiskinan.

Jika dibiarkan secara terus menerus, maka kondisi ini akan menjadi ancaman kolektif bagi masa depan bangsa. Perempuan dengan kemiskinan akan semakin sulit untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan untuk anak-anaknya. Dalam jangka panjang, maka secara tidak langsung kita sedang mencetak generasi masa depan yang lemah secara ekonomi dan sosial (Adnan & Amri, 2020). Tanpa adanya upaya konkrit, kemiskinan ini akan menjadi hal yang diwarisi secara turun temurun dan pada akhirnya dapat mematikan peluang mobilitas sosial masyarakat.

Oleh karena itu, kondisi ini membutuhkan perhatian khusus mengingat perempuan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan dan perekonomian. Ketika mereka diberdayakan secara ekonomi, maka akan muncul efek ganda yang dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari keluarga, lingkungan, hingga bangsa secara keseluruhan. Kelompok perempuan rentan dalam kemiskinan ini membutuhkan dukungan khusus melalui program-program pemberdayaan. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini disusun dalam rangka memberikan gambaran umum kondisi perempuan rentan dengan kemiskinan di Indonesia sekaligus memberikan rekomendasi model pemberdayaan dan penempatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya pemberdayaan perempuan rentan miskin (desil 1) agar mereka bisa mencapai taraf hidup yang layak dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi perempuan rentan dengan kemiskinan di Indonesia?

2. Bagaimana model yang tepat untuk pemberdayaan perempuan rentan dengan kemiskinan?
3. Bagaimana model yang tepat untuk penempatan tenaga kerja perempuan rentan dengan kemiskinan?

C. Tujuan

1. Memberikan gambaran umum kondisi perempuan rentan dengan kemiskinan di Indonesia
2. Merumuskan rekomendasi model pemberdayaan perempuan rentan dengan kemiskinan
3. Merumuskan rekomendasi model penempatan perempuan rentan dengan kemiskinan

D. Metode Kajian

Analisis kebijakan ini menggunakan metode kualitatif melalui dua metode pengumpulan data yaitu *focus group discussion* (FGD) dan tinjauan literatur. Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan *Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats* (SWOT) *analysis* dan Bardach. FGD dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perwakilan pemerintah baik pusat maupun daerah, pelaku usaha, praktisi, serta akademisi. Melalui diskusi kelompok terfokus ini, diperoleh informasi kualitatif mengenai tantangan, hambatan, potensi, dan strategi dari sudut pandang partisipan yang langsung terlibat atau terdampak.

Sedangkan tinjauan literatur dilakukan untuk menelusuri dan menganalisis berbagai dokumen, laporan, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka kebijakan, tren ketenagakerjaan, serta *best practice* yang dapat dijadikan rujukan dalam merancang intervensi yang lebih efektif dan

berkelanjutan. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan kajian untuk menggali realitas di lapangan sekaligus memperkuat analisis dengan landasan empiris.

Adapun analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta menilai adanya potensi ancaman dan peluang yang muncul dari faktor eksternal (Phadermrod *et al*, 2019). *Strengths* merujuk pada keunggulan atau kelebihan dari suatu alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah. *Weakness* berarti kelemahan atau keterbatasan alternatif kebijakan. Sementara itu, *Opportunities* adalah faktor eksternal yang bisa mendukung dalam implementasi kebijakan sedangkan *Threats* adalah potensi ancaman atau gangguan yang muncul sehingga dapat memberikan dampak negatif pada alternatif kebijakan. Analisis SWOT dapat disebut sebagai kerangka kerja yang digunakan perencanaan strategis yang digunakan suatu organisasi, rencana, atau proyek (Gürel, 2017) sehingga dapat memberikan perspektif yang komprehensif dalam menyusun alternatif kebijakan terbaik.

Selain tiga pendekatan di atas, kajian ini juga menggunakan metode analisis Bardach dalam proses pemilihan alternatif kebijakan. Metode Bardach (2012) digunakan untuk menganalisis dan memilih alternatif program pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja perempuan dengan kemiskinan berdasarkan empat kriteria utama: *Technical Feasibility*, *Economic & Financial possibility*, *Political Viability*, dan *Administrative operability*. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan alternatif yang terbaik berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap aspek-aspek operasional, ekonomi, politik, dan administratif dari setiap program.

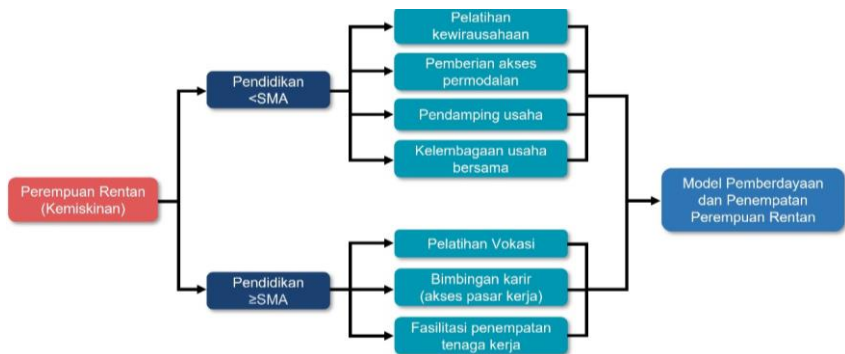
E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian fenomena dan penelitian-penelitian terdahulu, kajian ini menyusun sebuah kerangka konseptual yang bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terkait ruang lingkup analisis. Seperti yang bisa dilihat pada Gambar 1.1, kerangka konseptual ini secara garis besar membagi fokus kajian menjadi dua bagian berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu untuk perempuan rentan berpendidikan SMP ke bawah dan perempuan rentan berpendidikan SMA ke atas.

Adapun pembagian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua kelompok dari level pendidikan ini membutuhkan pendekatan yang berbeda. Perempuan berpendidikan SMP ke bawah cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap pekerjaan formal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi pendidikan yang akan menyebabkan mereka sulit untuk dapat bersaing memasuki sektor formal. Dalam konteks ini, pelatihan keterampilan teknis menjadi kurang tepat untuk diterapkan. Oleh karena itu, perlakuan untuk kelompok pendidikan ini akan lebih berfokus pada pemberdayaan dan pelatihan wirausaha. Melalui program pemberdayaan, mereka akan dibekali pengetahuan, keterampilan, serta pendampingan untuk siap terjun ke dalam dunia wirausaha. Pemberdayaan ini akan memungkinkan mereka untuk membangun sumber penghidupan secara mandiri dan tetap produktif meskipun tidak di dalam pasar kerja formal. Oleh karena itu, bentuk pemberdayaan ini menjadi lebih relevan dan kontekstual untuk diterapkan.

Sedangkan perempuan dengan pendidikan SMA ke atas cenderung memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasuki sektor formal. Hal ini dikarenakan mereka memiliki

potensi, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih mumpuni sehingga peluang untuk bisa memasuki pasar kerja formal juga semakin tinggi. Dengan memberikan bekal berupa keterampilan teknis melalui pelatihan dan bimbingan, perempuan yang berada di kelompok pendidikan ini akan mampu meningkatkan daya saing mereka dan siap untuk bersaing di pasar kerja.

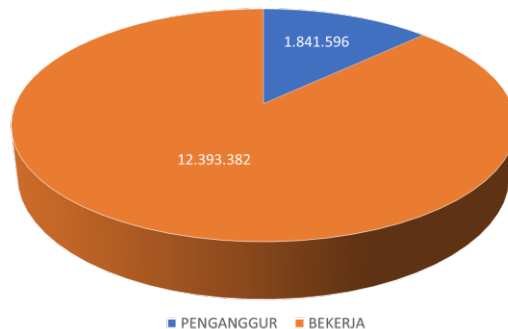


Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

BAB II TINJAUAN LITERATUR

A. Gambaran Umum Perempuan Rentan

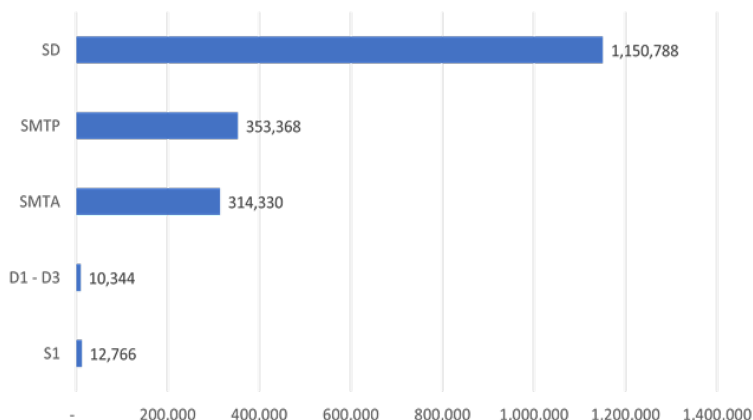
Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) BPS, ada sebanyak 14,2 juta perempuan rentan (usia 31-59 tahun) yang masuk ke dalam kategori miskin (Desil 1) dan sekitar 12,3 juta (87,07%) dari jumlah perempuan ini sudah bekerja. Angka ini dapat menunjukkan bahwa sekedar memiliki pekerjaan saja tidak cukup untuk menjadi jalan keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa mayoritas perempuan rentan yang miskin masih belum memiliki pekerjaan yang berpenghasilan layak. Namun, yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah proporsi perempuan miskin yang masih menganggur.



Gambar 2.1 Jumlah Perempuan Rentan Miskin Berdasarkan Status Pekerjaan

Sumber: Regsosek BPS (2022)

Menurut data tersebut, masih ada sebanyak 1,8 juta (12,93%) perempuan miskin (desil 1) yang sama sekali belum memiliki pekerjaan. Hal ini membuat mereka harus menghadapi tekanan berlapis, karena selain tidak memiliki sumber pendapatan, mereka juga tidak terserap di pasar kerja dan sering kali menghadapi hambatan struktural seperti rendahnya akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Jika perempuan miskin ini tidak memiliki pekerjaan dan sumber penghasilan, maka akan sangat kecil kemungkinan mereka untuk bisa keluar dari kondisi kemiskinan.



Gambar 2.2 Perempuan Rentan dalam Kemiskinan yang Menganggur Berdasarkan Pendidikan

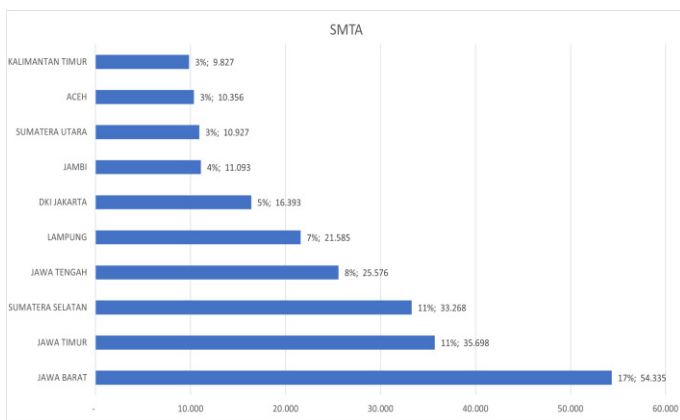
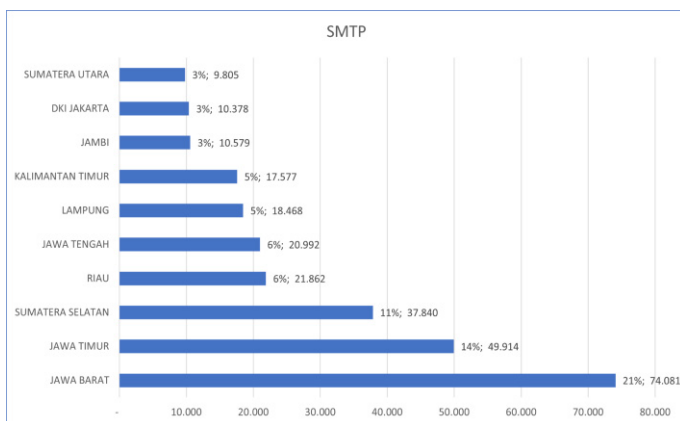
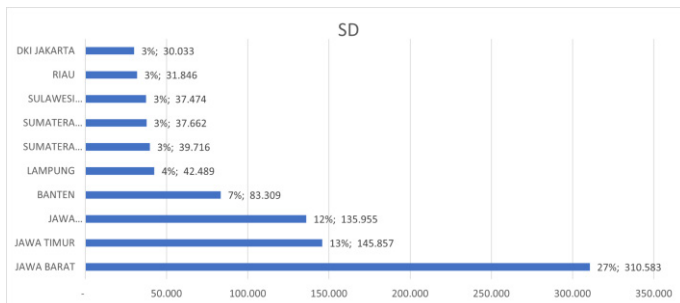
Sumber: Regsosek BPS 2022

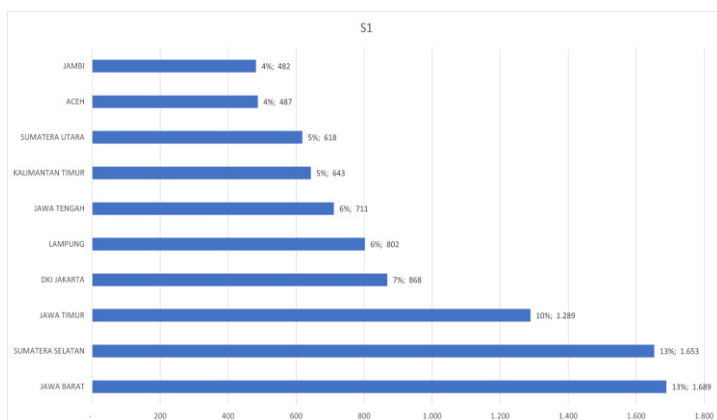
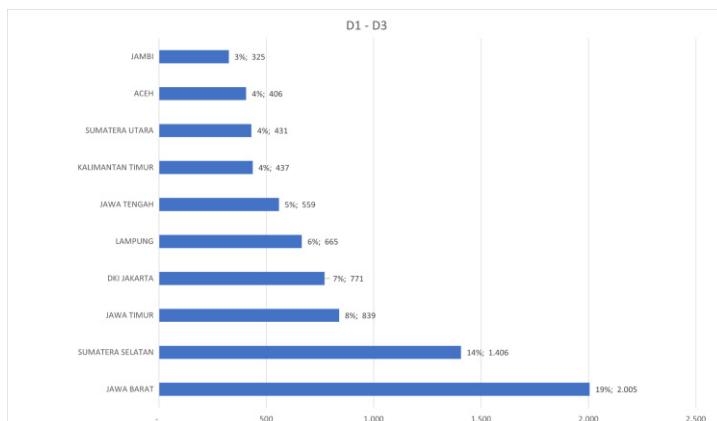
Lebih lanjut, berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, sebagian besar perempuan rentan yang menganggur dan hidup dalam kemiskinan (desil 1) berasal dari kelompok pendidikan rendah. Kelompok dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) mencatat jumlah tertinggi, yakni sekitar 62,48% dari total perempuan rentan dalam kemiskinan yang menganggur. Angka ini menunjukkan korelasi

yang kuat antara rendahnya tingkat pendidikan dan kerentanan terhadap pengangguran perempuan dalam kemiskinan. Selanjutnya, kelompok lulusan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) menyumbang sekitar 19,18% perempuan, diikuti oleh lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) yakni sebesar 17,06% perempuan dari total perempuan rentan miskin yang menganggur.

Selanjutnya, kelompok dengan pendidikan lebih tinggi menunjukkan jumlah yang jauh lebih kecil. Terdapat sebanyak 0,56% perempuan lulusan Diploma (D1–D3), dan sebanyak 0,69% perempuan lulusan Sarjana (S1) dari total perempuan rentan miskin yang menganggur. Meskipun jumlah perempuan rentan dalam kemiskinan yang menganggur di lulusan pendidikan tinggi relatif lebih kecil, kondisi ini tetap mengindikasikan adanya risiko pengangguran dan kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan.

Gambar 2.3 memperlihatkan gambaran yang lebih rinci mengenai kondisi perempuan rentan yang menganggur dan hidup dalam kemiskinan (desil 1) di Indonesia dengan tinjauan berdasarkan tingkat pendidikan dan sebaran wilayah. Secara umum, provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah secara konsisten menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi dalam hampir semua kategori pendidikan. Jika ditelaah lebih lanjut, pada tingkat pendidikan SD sederajat, jumlah perempuan rentan yang menganggur dan hidup dalam kemiskinan sangat tinggi dan tersebar secara dominan di Jawa Barat sebanyak 310.583 (27%), diikuti oleh Jawa Timur sebanyak 145.857 (13%) dan Jawa Tengah sebanyak 135.955 (12%). Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang rendah sangat berkontribusi pada kerentanan ekonomi perempuan, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk yang besar.





Gambar 2.3 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Perempuan Rentan dalam Kemiskinan Tertinggi di Indonesia
Sumber: Regsosek BPS (2022)

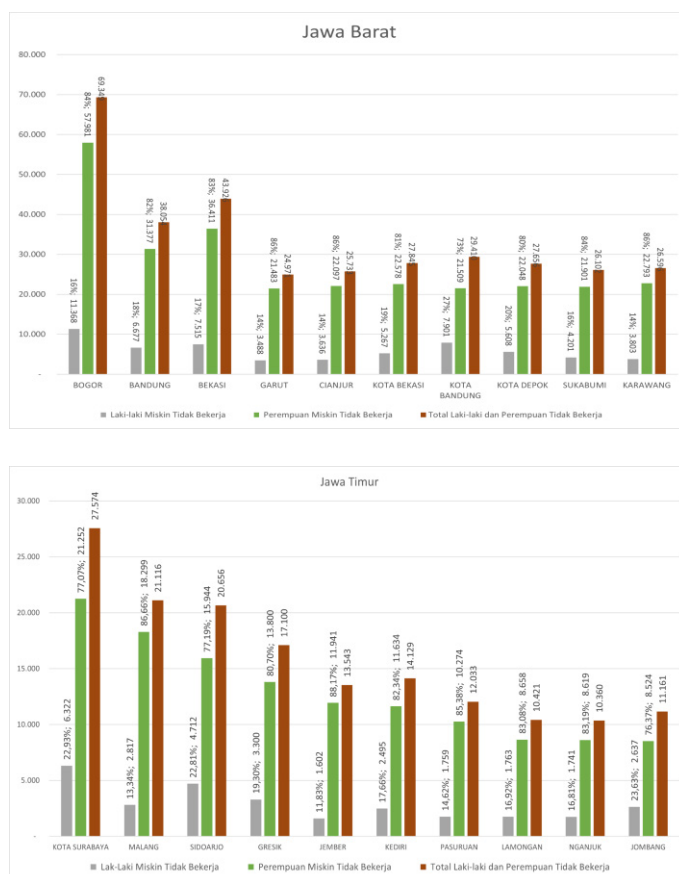
Pola serupa juga terlihat pada tingkat pendidikan menengah pertama (SMTP), di mana Jawa Barat kembali menjadi provinsi dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 74.081 (21%), disusul oleh Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Selain wilayah-wilayah di Pulau Jawa, sejumlah provinsi di luar Jawa juga menunjukkan angka yang signifikan seperti

Sumatera selatan (11%), Riau (6%), dan Kalimantan timur (5%). Selain itu, pada tingkat pendidikan menengah atas (SMTA), sebaran wilayah tetap didominasi oleh Jawa Barat, diikuti oleh Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Provinsi seperti Lampung, DKI Jakarta, dan Aceh juga muncul dalam daftar sepuluh besar. Hal ini mengindikasikan bahwa bahkan dengan pendidikan hingga tingkat menengah atas, risiko pengangguran dan kemiskinan bagi perempuan masih sangat tinggi, terutama ketika akses terhadap lapangan kerja yang layak terbatas.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan diploma (D1–D3), jumlah perempuan rentan yang menganggur secara umum lebih rendah dibandingkan kelompok pendidikan sebelumnya. Namun, pola distribusinya tetap konsisten dengan Jawa Barat sebagai penyumbang terbesar yaitu sejumlah 2.005 orang atau sekitar 19%, diikuti oleh Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Pada tingkat pendidikan sarjana (S1), jumlah perempuan rentan yang menganggur dan hidup dalam kemiskinan merupakan yang paling rendah dibandingkan kelompok pendidikan lainnya. Namun demikian, Jawa Barat dan Sumatera Selatan tetap menjadi wilayah dengan angka tertinggi, dimana Jawa Barat sebanyak 1.689 (13%) dan Sumatera Selatan sebanyak 1.683 (13%), diikuti oleh Jawa Timur dan DKI Jakarta. Hal ini memperlihatkan bahwa sekalipun tingkat pendidikan tinggi secara signifikan mengurangi risiko kemiskinan dan pengangguran, tantangan struktural seperti *mismatch* keterampilan, diskriminasi pasar kerja, atau ketimpangan kesempatan kerja tetap dapat memengaruhi kelompok perempuan berpendidikan tinggi.

Menarik untuk dicermati bahwa distribusi perempuan rentan yang menganggur dan hidup dalam kemiskinan (desil 1) tidak hanya terkonsentrasi di daerah terpencil atau pedesaan,

tetapi justru mendominasi di wilayah-wilayah yang secara ekonomi tergolong lebih maju dan memiliki potensi kesempatan kerja yang tinggi, seperti kota-kota industri dan pusat ekonomi di Jawa Barat dan Jawa Timur (Gambar 2.4).



Gambar 2.4 Penduduk rentan dalam kemiskinan yang menganggur berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten/kota di (a) Jawa Barat, dan (b) Jawa Timur

Sumber: Regsosek BPS (2022)

Di Provinsi Jawa Barat, kota-kota dengan kawasan industri besar seperti Bekasi, Bogor, Karawang menempati urutan teratas dalam persentase perempuan rentan dalam kategori ini. Misalnya, di Bogor terdapat 57.981 perempuan atau sekitar 84 persen. Angka ini diikuti oleh Bekasi sebanyak 36.411 perempuan atau sekitar 83 persen. Sementara itu, Karawang mencatat 86 persen atau sekitar 22.793 perempuan dalam kategori serupa. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan kawasan industri atau pusat ekonomi tidak secara otomatis menjamin penurunan tingkat kemiskinan maupun pengangguran, terutama bagi kelompok perempuan rentan.

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jawa Timur, di mana kota-kota seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo, yang dikenal sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa, justru memiliki persentase perempuan pengangguran dalam kemiskinan (desil 1) yang cukup tinggi. Di Surabaya tercatat 21.252 perempuan, yang setara dengan 77,07 persen, diikuti oleh Malang 18.299 perempuan (86,66%) dan Sidoarjo berjumlah 15.944 perempuan (77,19%). Fakta ini menyiratkan adanya paradoks pembangunan wilayah, di mana daerah dengan potensi ekonomi tinggi ternyata tetap menyisakan kelompok rentan perempuan yang belum terserap dalam sistem kerja formal.

Berbagai faktor turut menyumbang pada tingginya tingkat kemiskinan perempuan di wilayah perkotaan. Di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan, usia yang masih muda sehingga belum memiliki pengalaman kerja memadai, serta status pernikahan. (Faturohim et al., 2023; Anele & Philomene, 2024). Selain itu, Lenhardt (2024) mengidentifikasi sejumlah saluran yang memperkuat hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan, seperti meningkatnya urbanisasi penduduk miskin, perencanaan kota

yang belum optimal, keterbatasan akses terhadap kepemilikan tanah dan perumahan, kurangnya layanan publik dasar, serta tingginya kerentanan terhadap ketidakamanan pangan.

Dengan demikian, meskipun wilayah industri menawarkan peluang kerja yang lebih banyak, tidak semua kelompok masyarakat mampu mengakses peluang tersebut secara merata, terutama perempuan dari latar belakang pendidikan rendah. Kondisi ini menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap perempuan rentan yang berada dalam kondisi kemiskinan desil 1 dan tidak memiliki pekerjaan. Intervensi kebijakan yang inklusif menjadi sangat penting, dengan menekankan pada pendekatan berbasis pemberdayaan dan fasilitasi penempatan kerja. Melalui pendekatan ini, perempuan rentan tidak hanya diberikan peluang untuk berwirausaha secara mandiri, tetapi juga memperluas akses mereka terhadap pekerjaan di sektor formal.

Pemberdayaan menjadi strategi penting dalam mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan perempuan rentan. Studi Muchlis (2025) menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi perempuan secara keseluruhan. Dewi et al (2023) menyimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan status sosial perempuan, serta menegaskan urgensi pelibatan perempuan dalam proses pembangunan daerah. Lebih lanjut, Kajian empiris Suasridewi et al (2024) menggarisbawahi bahwa pemberdayaan perempuan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan keluarga, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, serta mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, perempuan yang berada dalam kondisi

kemiskinan desil 1 membutuhkan dukungan, perhatian, dan intervensi khusus melalui program pemberdayaan dan penempatan agar dapat mencapai taraf hidup yang layak.

B. Definisi Kelompok Rentan dan Perempuan Rentan

1. Definisi Kelompok Rentan

Tabel 1. Definisi Kelompok Rentan menurut Beberapa Sumber

Pemberi Definisi	Definisi	Sumber
United Nations Economic and Social Commission for Western Asia	<i>A vulnerable group is a population that has some specific characteristics that make it at higher risk of falling into poverty than others living in areas targeted by a project. Vulnerable groups include the elderly, the mentally and physically disabled, at-risk children and youth, ex-combatants, internally displaced people and returning refugees, HIV/AIDS- affected individuals and households, religious and ethnic minorities and, in some societies, women.</i>	<u>Economic and Social Commission for Western Asia, United Nations</u>
World Health Organization	<i>The conditions determined by physical, social, economic, and environmental factors or processes which increase the susceptibility of an individual, a community,</i>	<u>Community Disaster Risk Management, World Health Organization</u>

Pemberi Definisi	Definisi	Sumber
	<i>assets, or systems to the impacts of hazards.</i> <i>Some population groups are more vulnerable to disasters due to characteristics such as age, gender and sexual identities, race, culture, religion, disability, socio-economic status, geographical location, or migration status.</i>	
Social Protection and Human Rights	<i>Those who suffer from structural discrimination such as women, children, older persons, persons with disabilities, ethnic minorities, indigenous peoples and people living with HIV/AIDS.</i>	<u>Disadvantaged and vulnerable groups - Social Protection and Human Rights</u>
FEAST	<i>Dependent on the context these groups may include children, pregnant or lactating women, indigenous communities, elderly population, farmers, people living in remote areas and people with lower socio-economic status based on education levels and/or income. Conceptually, vulnerable groups can be characterized as those with high risk and low resilience.</i>	<u>Vulnerable groups FEAST</u>

Pemberi Definisi	Definisi	Sumber
	<i>With regard to food, vulnerable groups can be divided in three groups:</i> <i>1. People that don't have access to food (both, no access to food at all and no access to healthy food)</i> <i>2. People that do have access to food, but not enough knowledge or skills to eat healthy and sustainable food</i> <i>3. People that do have access to food and enough knowledge and skills but don't make healthy choices</i>	
European Institute for Gender Equality	<i>Women, children and persons belonging, or perceived to belong, to groups that are in a disadvantaged position or marginalised.</i>	<u>vulnerable groups European Institute for Gender Equality</u>
United Nations Electronic Government Development Index Survey (UNEG-DI),	<i>Vulnerable groups constitute Women, the Elderly, Persons with Disabilities, the Poor, Youth, Refugees or Immigrants.</i>	<u>Public Service Delivery and Local Government Vulnerable Groups</u>
The Australian Charities and Not-for-profits	<i>Vulnerable people are defined as a people aged under 18 or other</i>	<u>Vulnerable people ACNC</u>

Pemberi Definisi	Definisi	Sumber
Commission (ACNC)	<i>individuals who may be unable to take care of themselves or are unable to protect themselves against harm or exploitation.</i> <i>While all people must be protected from harm, there are additional legislative and ethical considerations for protecting vulnerable people. Vulnerable people can include:</i> <i>children and seniors; people with impaired intellectual or physical functioning; people from a low socio-economic background; people who are Aboriginal or Torres Strait Islanders; people who are not native speakers of the local language; people with low levels of literacy or education; people subject to modern slavery, which involves human exploitation and control, such as forced labour, debt bondage, human trafficking, and child labour.</i>	
Wisner, B., Adams, J. & World Health Organization.	<i>Vulnerable Populations are groups and communities at a higher risk for poor physical, psychological, or</i>	<u>Who are Vulnerable Populations? Texas Epidemic</u>

Pemberi Definisi	Definisi	Sumber
(2002)	<i>social health. These barriers are further intensified due to social, economic, political, and environmental components. Limitations due to illness or disability can also influence the vulnerability of a population</i>	<u>Public Health Institute</u>
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999	Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.	
Cakra Wikara Indonesia (2021)	Kelompok rentan adalah sekumpulan individu yang mengalami perlakuan diskriminatif dan memerlukan perhatian khusus. Dalam kehidupannya, mereka menghadapi hambatan untuk menikmati akses, sumber daya, dan hak asasi manusia. Secara umum, yang termasuk kelompok rentan adalah perempuan, anak, pencari suaka, orang tanpa kewarganegaraan, masyarakat adat, pekerja migran, disabilitas, lansia, pengidap orang dengan	

Pemberi Definisi	Definisi	Sumber
HIV/AIDS,		
LPEM FEB UI	Populasi rentan adalah individu yang tidak memiliki kapasitas pengambilan keputusan untuk memberikan persetujuan yang diinformasikan secara sukarela yang terbagi menjadi 2 kategori: (1) mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam membuat keputusan untuk kepentingan diri sendiri, (2) mereka yang mengalami paksaan dan tekanan dalam mengambil keputusan karena situasi yang mereka alami.	

2. Konsep Perempuan Rentan

Konsep **Perempuan Rentan** merujuk kepada perempuan yang berada pada posisi sosial, ekonomi dan/atau hukum yang membuat mereka lebih mudah mengalami diskriminasi dan eksploitasi serta memiliki kuasa dan daya tawar yang rendah dalam masyarakat. Sampai saat ini, belum terdapat regulasi atau kebijakan yang secara eksplisit mendefinisikan serta mengatur kategori “perempuan rentan” secara khusus dalam kerangka hukum nasional. Namun, terdapat beberapa kondisi perempuan yang perlu mendapat perhatian khusus, antara lain perempuan dalam rentang umur 31-59 tahun yang berada dalam kondisi kemiskinan,

perempuan berkonflik dengan hukum (warga binaan pemasyarakatan pasca bimbingan, perempuan korban penyalahgunaan NAPZA (klien pasca rehabilitasi), perempuan korban kekerasan fisik/psikis dan/atau seksual, perempuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kondisi rentan lainnya yang ditetapkan oleh aturan (Ditjen Binapenta dan PKK, 2025). Analisis kebijakan ini akan berfokus pada perempuan rentan yang dalam kondisi kemiskinan. Berdasarkan pengelompokan tingkat kemiskinan menurut BPS, yang termasuk kategori sangat miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita di angka <Rp500.000 per bulan (desil 1).

3. Penelitian Terdahulu terkait Determinan Perempuan Rentan Miskin

a. Determinan Perempuan Rentan Miskin Rural

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu ketimpangan gender, berbagai penelitian telah berupaya menelaah faktor-faktor yang menyebabkan perempuan berada dalam kondisi rentan dan miskin, khususnya di daerah pedesaan. Salah satunya adalah studi Jerumeh (2024) yang menganalisis penyebab kemiskinan multidimensi di kalangan perempuan di Nigeria. Dengan menggunakan data dari *Harmonized Nigeria Living Standard Survey* (HNLSS), penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran rumah tangga, semakin tinggi pula tekanan terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, gizi, dan sanitasi, yang pada akhirnya dapat mendorong perempuan ke dalam kemiskinan. Sebaliknya, faktor-faktor seperti usia, tingkat pendidikan, jumlah pengeluaran, akses kredit, jaring pengaman sosial, dan kepemilikan lahan pertanian terbukti mampu meningkatkan

kesejahteraan perempuan dan mengurangi risiko kemiskinan multidimensi.

Penelitian oleh Nisak dan Sugiharti (2020) menunjukkan bahwa sejumlah faktor seperti kondisi kesehatan reproduksi, tingkat pendidikan terakhir, partisipasi dalam dunia kerja, dan jenis pekerjaan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan perempuan. Secara lebih spesifik, mereka juga menemukan bahwa kemiskinan dalam rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk tingkat pendidikan kepala keluarga, kondisi sanitasi, kualitas air untuk kebutuhan sehari-hari, sumber penerangan, serta jumlah anggota keluarga.

Sementara itu, Nie dan Wang (2020) menyoroti kemiskinan perempuan di pedesaan timur laut Tiongkok dengan pendekatan berbasis pendapatan dan pengeluaran rumah tangga tahunan. Temuan mereka menunjukkan bahwa perempuan menjadi rentan terhadap kemiskinan akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya, rendahnya tingkat pendidikan, besarnya jumlah anggota keluarga, kekurangan tenaga kerja, dan minimnya jumlah peternak di wilayah tersebut.

Penelitian lain oleh Mukaila et al. (2021) mengungkap bahwa tingginya tingkat kemiskinan perempuan di pedesaan berkaitan erat dengan rendahnya pendapatan tahunan. Dalam hal ini, faktor usia dan jumlah anggota keluarga menjadi kendala utama. Perempuan yang lebih tua cenderung tidak mampu mengikuti pekerjaan fisik di sektor pertanian, sementara rumah tangga yang terlalu besar menimbulkan beban tambahan terhadap pendapatan yang tersedia.

Dari konteks yang berbeda, Munnel *et al.* (2020) memanfaatkan data *Health and Retirement Study* yang

terhubung dengan catatan pendapatan dan manfaat jaminan sosial untuk mengeksplorasi penyebab kemiskinan di kalangan perempuan janda. Hasil studi mereka menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan pengalaman kerja dapat secara signifikan menurunkan risiko kemiskinan. Namun demikian, mereka juga mencatat bahwa angka kemiskinan perempuan janda tetap lebih tinggi dibandingkan perempuan yang menikah. Saepudin et al. (2024) menawarkan pendekatan solusi melalui pelatihan kewirausahaan berbasis *Project Based Learning (PBL)*. Program ini terbukti dapat meningkatkan keterampilan perempuan sekaligus berdampak positif pada kesejahteraan keluarga mereka.

Adapun studi dari Zambak dan Soykan (2023) berfokus pada perempuan pekerja di Antalya, Turki bagian selatan, dengan melibatkan 400 responden. Hasil penelitian mereka menegaskan pentingnya aspek pemberdayaan, keamanan, pendidikan, pendapatan, dan kesempatan kerja dalam menanggulangi kemiskinan multidimensi perempuan. Mereka merekomendasikan agar pembuat kebijakan lebih memperhatikan elemen-elemen tersebut, misalnya melalui program perlindungan dan pemberdayaan perempuan guna memperkuat hak-hak serta rasa aman mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

b. Determinan Perempuan Rentan Miskin Urban

Studi mengenai berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan perempuan di daerah urban telah diidentifikasi oleh berbagai penelitian terdahulu. Salam et al (2024) melihat pengaruh karakteristik sosial ekonomi terhadap kemiskinan di area urban dan rural dengan menggunakan data Susenas Maret 2018 dan Potensi Desa 2018. Hasil analisis regresi logistik memaparkan bahwa keberadaan anggota keluarga yang difabel akan membebani rumah tangga baik di

daerah rural ataupun urban. Selain itu, infrastruktur jalan sangat berpengaruh di daerah rural namun tidak signifikan di daerah urban. Pendidikan menjadi faktor utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu perempuan dalam keluarga terlepas dari garis kemiskinan, baik di urban maupun rural. Selain itu, pendidikan lebih tinggi akan memudahkan perempuan dan anggota keluarga untuk masuk dalam pekerjaan sektor formal. Terakhir, pekerja formal berpengaruh signifikan dalam membantu keluarga dari kemiskinan multidimensi di daerah urban.

Bezabh et al. (2024) mengidentifikasi determinan kemiskinan perkotaan pada rumah tangga perempuan kepala keluarga di Kota Ibinat dan menunjukkan bahwa kemiskinan di kalangan kelompok ini cukup tinggi, dengan sekitar 45% rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan. Analisis menggunakan model regresi logistik biner mengungkapkan bahwa ukuran keluarga, usia kepala rumah tangga, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, dan akses terhadap kredit secara signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Studi ini juga menyoroti bahwa semakin besar ukuran keluarga dan jumlah tanggungan, semakin tinggi kemungkinan rumah tangga mengalami kemiskinan, sementara akses terhadap kredit berperan penting dalam mengurangi kerentanannya. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung akses ke lembaga keuangan, program keluarga berencana, serta investasi untuk memperluas kesempatan kerja, terutama bagi anggota keluarga yang tidak produktif, guna mengurangi kemiskinan rumah tangga secara menyeluruh.

Alemu et al. (2024) mengkaji dampak peran gender terhadap kemiskinan perempuan di Assosa City, Ethiopia, khususnya pada perempuan pelaku usaha mikro dan kecil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi peran gender berdampak pada rendahnya pencapaian pendidikan perempuan akibat beban peran domestik dan praktik perkawinan dini, yang kemudian berimplikasi pada terbatasnya akses terhadap pekerjaan layak. Selain itu, perempuan juga mengalami keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan karena adanya persepsi keliru mengenai peran perempuan dalam rumah tangga. Diskriminasi berbasis gender, tekanan budaya, dan keterbatasan infrastruktur semakin memperparah kondisi kemiskinan perempuan di perkotaan. Penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi kebijakan multisektor untuk mengurangi dampak peran gender terhadap kemiskinan perempuan.

Penelitian oleh Jaglan & Shergill (2023) menunjukkan bahwa rumah tangga yang dipimpin perempuan di kawasan perkotaan di India memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kemiskinan dibandingkan rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Studi ini menegaskan bahwa rumah tangga perempuan bukanlah kelompok yang homogen, melainkan memiliki kerentanan yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang sosial ekonomi dan demografis. Dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap pendidikan perempuan diperkirakan akan memperbesar kesenjangan kemiskinan berbasis gender dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan publik seharusnya memprioritaskan peningkatan keterampilan dan pendidikan bagi perempuan, serta menargetkan program pengentasan kemiskinan pada kelompok perempuan yang paling rentan.

Berdasarkan penelitian Ergo et al. (2023), kemiskinan di kalangan perempuan pemilik usaha mikro di Zona Wolaita, Ethiopia Selatan, masih menjadi persoalan signifikan, dengan tingkat insidensi kemiskinan mencapai 24,27%, gap

kemiskinan 3,85%, dan tingkat keparahan 1,11%. Studi ini menunjukkan bahwa delapan dari empat belas variabel, seperti antara lain usia, jumlah tanggungan, tabungan, remitansi, serta intensitas waktu kerja perempuan dalam usaha mereka, berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan yang mereka alami. Pendekatan yang digunakan mencakup survei kuantitatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah, serta analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi determinan utama. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah lokal, pelatihan kejuruan, dan lembaga keuangan dalam mengatasi faktor-faktor struktural yang memperburuk kondisi ekonomi perempuan pemilik usaha mikro, sekaligus meningkatkan peran mereka dalam pengurangan kemiskinan.

Berdasarkan studi oleh Siddiqui dan Parveen (2024), kemiskinan perkotaan berbasis gender di Sehore, India, mencerminkan kompleksitas manifestasi kemiskinan di kalangan perempuan, terutama di wilayah urban dengan tingkat urbanisasi rendah seperti Madhya Pradesh. Dengan menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) berbasis Geographic Information System (GIS), penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi dan budaya lokal yang memperkuat kemiskinan perempuan di 17 lokasi dalam empat wilayah. Meskipun faktor ekonomi menjadi penentu utama, dimensi lain seperti kesehatan, pendidikan, kekurangan pengambilan keputusan, dan keterbatasan waktu juga berkontribusi secara signifikan. Studi ini menyoroti bahwa pengaruh dua kota metropolitan terdekat (Bhopal dan Indore) serta karakteristik spasial dan institusional lokal menjadikan pola kemiskinan perempuan di Sehore unik namun relevan untuk perbandingan dengan kota-kota berkembang lainnya di India. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dan multisektoral dalam memahami serta

mengatasi kemiskinan berbasis gender di wilayah urbanisasi rendah.

C. Benchmarking

1. Benchmarking Beberapa Negara Terpilih

Beberapa negara di dunia telah memiliki kebijakan tersendiri dalam memberikan perlakuan dan intervensi khusus kepada perempuan atau kelompok rentan lainnya untuk mengatasi kemiskinan. Berikut adalah uraian secara lebih rinci terkait kebijakan yang sudah dilakukan di India, Nepal, Brazil, Malaysia, dan China.

a. India

Di **India**, Kementerian Pembangunan Pedesaan memiliki sebuah program yang bernama ***National Rural Livelihood Mission (NRLM)***. Program ini berfokus untuk mengatasi masyarakat miskin di pedesaan dengan cara membentuk lembaga pemberdayaan yang bernama ***Self Help Group (SHG)***. Lembaga ini berisikan 10-20 perempuan yang berasal dari perwakilan rumah tangga miskin (diutamakan perempuan) untuk selanjutnya dilakukan pemberdayaan dan pembimbingan sehingga memiliki keterampilan dan mata pencaharian yang berkelanjutan. Setelah pembentukan SHG, pemerintah membuka rekening atas nama kelompok tersebut. Setelah 3–6 bulan jika SHG menunjukkan manajemen serta kelembagaan keuangan yang baik, dana sebesar Rs 10.000 –15.000/Rp 1.903.630–Rp 2.850.675 diberikan ke rekening mereka sebagai dana bergulir (*revolving fund*). Setelah memanfaatkan dan mengembalikan dana tersebut, enam bulan setelahnya diberikan kembali dana investasi komunitas (*community investment fund*) untuk membantu memperluas usaha komunitas tersebut dan jika dibutuhkan, peserta dapat meminjam uang di bank dan akan diberikan subsidi suku bunga

untuk menutupi perbedaan selisih suku bunga di bank dengan 7% (Dixit, 2025; *Ministry of Rural Development*, 2017; *Reserve Bank of India*, 2017).

NRLM juga memiliki sub-program lain, seperti **Start-up Village Entrepreneurship Programme (SVEP)** yang menyediakan pelatihan, bantuan keuangan, dan dukungan untuk masyarakat pedesaan khususnya kelompok rentan dan perempuan untuk membangun dan mengembangkan usaha di sektor non-pertanian sampai usaha tersebut stabil. Intervensi program ini meliputi tiga hal yaitu pengetahuan, pendampingan, dan keuangan. Berkat program ini, 75% usaha dimiliki dan dikelola oleh perempuan, sekitar 96% wirausahawan melaporkan adanya peningkatan tabungan dan 70% wirausahawan menyatakan bahwa pengambilan pinjaman dari dana komunitas tergolong mudah (*Ministry of Rural Development*, 2025; PIB Delhi, 2024).

Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) merupakan salah satu sub-program lain yang dimiliki oleh NRLM. Program ini berfokus pada pemberian pelatihan dan penempatan kerja. Tahapan awal dari program ini adalah sosialisasi program dan pendaftaran peserta oleh masyarakat miskin untuk selanjutnya dilakukan identifikasi dan diseleksi oleh Pemerintah melalui proses *Participatory Identification of Poor* (PIP). Peserta yang terpilih selanjutnya akan memperoleh pelatihan serta bimbingan karir yang akan diberikan oleh *Skilling Agency*, lembaga pihak ketiga yang bekerjasama dengan pemerintah. Setelah menamatkan pelatihan, peserta ditempatkan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing dan tetap mendapat dukungan dan pemantauan oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan pemberian uang saku sebesar Rs 1.000/bulan selama beberapa bulan pertama (*Ministry of Rural Development*, 2016;

Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana, n.d.; *Ministry of Rural Development*, n.d.).

Kudumbashree merupakan sebuah program yang dijalankan oleh Pemerintah Negara Bagian Kerala, **India**, yang sejak tahun 2012 juga berada dalam naungan NRLM dan bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan perempuan di seluruh negara bagian. Program ini memiliki struktur tiga tingkat dalam jaringan komunitas perempuan, yakni Kelompok perempuan tingkat dasar (*Neighborhood Groups/NHGs*), federasi NHG di tingkat lingkungan (*Area Development Society/ADSs*), dan federasi ADS di tingkat pemerintah lokal (*Community Development Society/CDSs*). Beberapa kegiatan yang dilakukan NHG yakni manajemen program simpan pinjam dan kredit termasuk pinjaman internal dan pencatatan rekening, pemeringkatan, hubungan bank serta dana hibah bergulir di bawah NRLM. Selain itu, perempuan-perempuan yang bergabung di NHG juga diberikan pelatihan pemberdayaan sosial dan pemberdayaan perempuan (*Kudumbashree Story*, 2025; *Kudumbashree NRO*, 2024; *Government of Kerala*, 2025; Durgalashmi & Taramol, 2024).

b. Nepal

Pemerintah **Nepal** bekerjasama dengan Badan Swiss untuk Pembangunan dan Kerjasama (*Swiss Agency for Development and Cooperation/SDC*) dan *HELVETAS Swiss Inter-Cooperation* membentuk program **Employment Fund (EF)**. EF menyediakan pelatihan (keterampilan teknis, kejuruan dan lunak) untuk orang muda dari latar belakang ekonomi miskin dan/atau kurang beruntung secara sosial. EF membagi pelatihan kompetensi menjadi 2 komponen. Pertama adalah **Path to Prosperity** yang berfokus untuk mempersiapkan diri dalam pasar tenaga kerja dengan beberapa program pelatihan,

yakni pelatihan literasi dan numerasi, dukungan fasilitas berbasis kebutuhan, pelatihan keterampilan hidup, peningkatan pendapatan ganda, dan dukungan pasca-pelatihan. Komponen kedua adalah **Micro Enterprising for Job Creation** yang lebih berfokus untuk memberikan fasilitas target kelompok untuk mendirikan usaha sendiri dan menciptakan pekerjaan tambahan dengan beberapa program pelatihan, yakni konseling karir dan pelatihan literasi keuangan, motivasi bisnis dan penyusunan rencana usaha, keterampilan praktis dan kunjungan lapangan, dan dukungan pasca-pelatihan.

Semua program dan pelatihan tersebut mengacu pada kurikulum nasional yang dikembangkan oleh *Curriculum Division of Council for Technical Education and Vocational Training* (CTEVT). EF mendanai lebih dari 30 lembaga pelatihan dan penempatan kerja sektor swasta (*Training and Employment/T&Es*) untuk pelatihan keterampilan teknis dan layanan penempatan kerja. Pendekatan pendanaan yang digunakan adalah pembiayaan berbasis hasil (*outcome-based financing*) kepada T&Es, yakni berdasarkan pekerjaan yang menguntungkan, jika lulusan bekerja sebagai karyawan (*wage employed*), dan penciptaan lapangan kerja baru, jika lulusan telah memulai usaha mereka sendiri (Chakravarty et al., 2019; *Youth Policy Toolbox*, n.d.).

c. Brazil

Di **Brazil**, Program **Mulheres Mil** yang merupakan bagian dari program *Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego* (PRONATEC) diluncurkan untuk memperluas pilihan pelatihan profesional bagi perempuan yang rentan secara sosial atau bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Negara Brazil. Program ini diselenggarakan melalui kerjasama antara *Instituto*

Federal de Brasilia (IFB) sebagai penyedia pelatihan, dan *Secretaria de Desenvolvimento Economico e Trabalho/SEDEST* (Sekretariat Pembangunan Sosial dan Transfer Pendapatan) sebagai penghubung sosial antara program dan masyarakat penerima manfaat. Beberapa bidang pelatihan yang dapat diikuti peserta di antaranya, *Tourism and hospitality, Industrial production, Cultural production and design, Environment and health, Infrastructure, Food production, Business and management, Natural resources, Information and communication*. Program ini menargetkan sebanyak 6 juta pekerja di mana 91% adalah wanita dan sekitar 65% berkulit hitam (Santos & Freitas, 2014; Ministry of Women of Brazil, 2024).

d. Malaysia

Kumpulan Nelayan Wanita (KUNITA) merupakan asosiasi yang didirikan di bawah pengawasan **Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)** dengan tujuan untuk meningkatkan status sosial ekonomi keluarga nelayan. Hal ini dikarenakan kelompok nelayan identik dengan kelompok minoritas dengan pendapatan rendah, tingkat pendidikan rendah, dan diliputi oleh berbagai keterbatasan ekonomi. Para anggota KUNITA, yang berisikan minimal 10 orang dan sebagian besar adalah istri dan anak nelayan didorong untuk memulai usaha-usaha terutama yang berbasis hasil laut.

Selain itu, LKIM bersama dengan Departemen Perikanan menyediakan program peningkatan kapasitas yang menawarkan kursus pelatihan gratis kepada anggota KUNITA yang terpilih. Setelah pelatihan, para peserta didorong untuk memulai bisnis mereka sendiri dengan disediakannya peralatan dan tempat usaha (Hafizah et al., 2010; Hashim et al., 2019; Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, n.d.). Program ini berhasil membentuk 66 KUNITA di Malaysia dengan total

anggota sebanyak 4.220 orang. Kegiatan ekonomi yang telah dijalankan meliputi usaha kerajinan tangan, usaha catering, pembuatan kerupuk lekor dan kue-kue tradisional.

e. China

Liang Qianjuan seorang pemilik toko *Taobao* di China membantu petani menjual produk pertanian melalui siaran langsung. Pada tahun 2020 ia berhasil menjual produk pertanian senilai lebih dari 3 juta Yuan melalui siaran langsung dan membantu hampir 300 warga desa keluar dari kemiskinan. Program yang diberi nama ***Village Live Streaming Program*** tersebut berfokus pada pengembangan kreator pedesaan potensial untuk menjual produk pertanian yang sulit dijual secara nasional, bahkan ke negara dan wilayah lain (Zhu et al., 2022). Melihat hal tersebut, Departemen Sains, Teknologi, dan Pendidikan, Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan pada 23 Oktober 2022 membuat sebuah program yang bernama ***Rural Youth Anchor***.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat ekonomi kabupaten di 160 kabupaten kunci. Rencana ini berfokus pada pelatihan keterampilan dan transformasi petani muda dengan pemanfaatan video pendek *e-commerce* dan siaran langsung. Melalui pembelajaran daring, pelatihan terpusat, pemberdayaan *platform* dan pelatihan lainnya, kelompok ini diharapkan mampu menguasai pembuatan video pendek dan siaran langsung sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan kekayaan petani serta mempromosikan pembangunan ekonomi pedesaan (Provinsi Hebei, 2023). Berkat program ini, 470.000 pemuda ikut berpartisipasi dan berkontribusi pada penguatan pendidikan di pedesaan, pengembangan pertanian, dan kesehatan (Ekblad, 2022).

2. Benchmarking dengan Beberapa Kementerian/Lembaga di Indonesia

Beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya di Indonesia sudah pernah menjalankan program-program yang memberdayakan kelompok rentan, termasuk perempuan rentan. Beberapa diantara lembaga tersebut diantaranya adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Berikut uraian lebih rinci terkait program yang sudah maupun sedang berjalan dari lembaga-lembaga tersebut.

a. Kementerian PPN/Bappenas

1) Program MAMPU

Program MAMPU diluncurkan pada tahun 2012 sebagai hasil kolaborasi antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Australia melalui *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT). Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan miskin dan marginal agar lebih mampu mengakses layanan publik dan mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Tujuan Umum Program:

Selama periode 8 tahun pelaksanaan (2012–2020), Program MAMPU bertujuan untuk meningkatkan akses dan penghidupan bagi perempuan miskin di Indonesia, khususnya di wilayah dan tema tertentu. Program ini bertujuan untuk membangun jaringan berbasis luas dan koalisi inklusif yang dipimpin oleh organisasi perempuan

dan organisasi yang berfokus pada gender, serta anggota parlemen, untuk mempengaruhi kebijakan, regulasi, dan layanan pemerintah. Termasuk di dalamnya area privat tertentu, guna meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan dan peluang penghidupan.

Area Tematik Prioritas

MAMPU berfokus pada lima area tematik sebagai berikut.

- Meningkatkan akses perempuan terhadap pekerjaan dan mengurangi diskriminasi di tempat kerja.
- Meningkatkan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial
- Meningkatkan kondisi bagi pekerja migran perempuan (terutama dari sektor rumah tangga).
- Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam hal kesehatan maternal dan reproduksi.
- Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Mitra MAMPU

MAMPU memiliki beberapa partner dengan area tematiknya masing-masing sebagai berikut.

- BAKTI: bekerja untuk meningkatkan akses perempuan ke pekerjaan serta menghapus diskriminasi di tempat kerja.
- Migrant Care: menangani isu peningkatan kondisi bagi perempuan pekerja migran di luar negeri.
- Institut Kapal Perempuan: juga berfokus pada akses perempuan terhadap perlindungan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
- Aisiyiah (Pimpinan Pusat): mengusung isu penguatan kepemimpinan perempuan dalam kesehatan maternal dan reproduksi.

- Koalisi Perempuan: memiliki fokus pada akses terhadap perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
- Perempuan: memperkuat kepemimpinan perempuan dalam isu kesehatan ibu dan reproduksi.
- Komnas Perempuan: bekerja di bidang kekerasan terhadap perempuan.
- ILO: mendukung peningkatan akses perempuan terhadap pekerjaan dan penghapusan diskriminasi di tempat kerja.

MAMPU telah mengembangkan pendekatan kerja yang unik untuk mendukung berbagai organisasi dengan latar belakang, struktur, dan afiliasi yang berbeda. Sejak 2012, MAMPU mengelola jaringan ini melalui empat pendekatan utama:

- Struktur Tim untuk Keterlibatan Mitra yang Konsisten
Sekretariat MAMPU dibentuk agar terorganisir dalam mendampingi mitra, termasuk peran Koordinator Tematik yang memastikan hubungan teknis dan manajerial berjalan selaras.
- Infrastruktur untuk Pengambilan Keputusan Kolektif
MAMPU membentuk forum dan proses refleksi rutin (termasuk rapat Dewan Direksi) agar semua pihak bisa terlibat dalam perencanaan, strategi, dan pengambilan keputusan bersama.
- Peran Jembatan Formal antara Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Pemerintah
Sejak 2017, MAMPU bersama BAPPENAS dan DFAT membangun struktur tata kelola untuk menghubungkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan pemerintah, melalui komite teknis dan pertemuan reguler yang membahas rencana kerja dan perkembangan program.

- Skema Hibah Fleksibel untuk Jaringan yang Beragam MAMPU menerapkan sistem hibah yang disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi masing-masing organisasi. Mekanisme ini memungkinkan jaringan besar dan kecil untuk mengakses dukungan, termasuk pendanaan untuk organisasi akar rumput di desa hingga organisasi besar tingkat nasional.

Capaian Program

- Telah memfasilitasi pertemuan antar mitra dan menjembatani kolaborasi dengan berbagai organisasi lain.
- Telah membantu meningkatkan kualitas interaksi antara mitra dan pemerintah nasional.
- Para mitra program MAMPU telah membentuk 1.272 kelompok perempuan yang tersebar di 1.137 desa, 147 kabupaten, dan 27 provinsi. Jaringan ini tidak hanya luas, tapi juga kuat. Bukti menunjukkan bahwa perempuan yang bergabung mendapatkan banyak manfaat, seperti rasa percaya diri, keyakinan pada diri sendiri, dan keberanian.
- MAMPU semakin berhasil menarik perhatian yang lebih luas terhadap prioritas, capaian, dan temuan baru dari para mitra.
- Pemerintah desa di wilayah program MAMPU telah berhasil membentuk aturan dan regulasi baru yang menanggapi kebutuhan dan prioritas perempuan.
- MAMPU telah membantu memperkuat kerangka kebijakan layanan bagi perempuan di 80 kabupaten di seluruh Indonesia.
- MAMPU telah secara langsung membantu lebih dari 170.000 perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan akses terhadap layanan pemerintah.
- Di tingkat kabupaten, pengaruh terhadap kebijakan

telah berkontribusi pada perbaikan penyediaan layanan yang memberi manfaat bagi lebih banyak perempuan, khususnya di beberapa wilayah dan pada isu-isu tertentu.

Kekurangan dan Hambatan

- MAMPU menghadapi tantangan dalam menjaga keselarasan visi dan strategi dengan para mitra.
- Tidak semua pelatihan yang diberikan sesuai kebutuhan mitra lokal.
- Isu pemberdayaan ekonomi belum digarap secara komprehensif dalam kerangka program.
- Kemitraan dengan sektor swasta belum berjalan optimal karena perbedaan nilai dan persepsi pasar.

2) Program INKLUSI

Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif (INKLUSI) merupakan program Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas-Australia selama lima tahun (2021-2026) senilai AUD 75 juta dengan kemungkinan perpanjangan tiga tahun hingga AUD 45 juta (2026-2029) yang bertujuan meningkatkan partisipasi dan manfaat kelompok terpinggirkan dalam pembangunan sosial, **ekonomi**, budaya, dan politik di Indonesia. Program ini bekerja sama dengan 11 organisasi masyarakat sipil, 8 lembaga penelitian, serta jaringan mereka untuk mendorong kesetaraan gender **bagi perempuan**, hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial, sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

INKLUSI memiliki prinsip yaitu “**no one is left behind**” di mana kelompok terpinggirkan didorong untuk

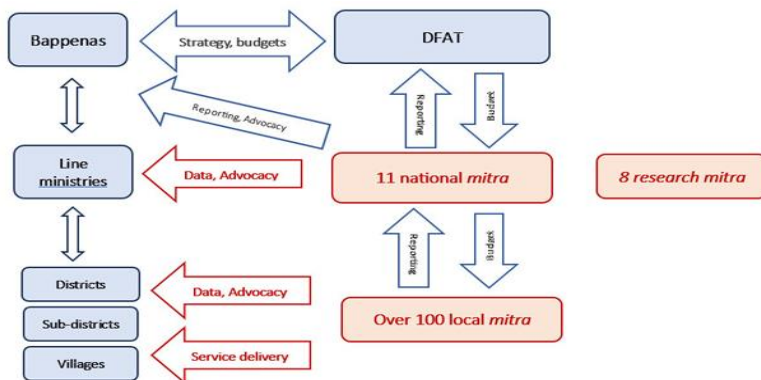
berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari keputusan tentang pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Prioritas utama:

- **Akses yang Lebih Baik ke Layanan Dasar**
Akses ke layanan publik sangatlah penting untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan **mata pencaharian bagi perempuan terpinggirkan** serta **memfasilitasi pertumbuhan ekonomi** dengan mendirikan kelompok berbasis masyarakat.
- **Perlindungan dari Kekerasan**
Melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, secara signifikan dapat meningkatkan keberhasilan antar generasi dalam pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja.
- **Ketahanan Ekonomi dan Penghidupan yang Lebih Baik**
Mendirikan kelompok ekonomi berbasis masyarakat yang mengembangkan usaha skala kecil, koperasi, kelompok simpan pinjam, dan pasar barter.
- **Partisipasi Inklusif dalam Pembangunan**
Membangun kapasitas kelompok terpinggirkan dalam pemberdayaan politik serta memfasilitasi partisipasi mereka dalam forum pengambilan keputusan publik.

Karakteristik cara kerja INKLUSI

- Modus operandi bekerja dari bawah ke atas.
- Bekerja dengan negara dan masyarakat.
- Memberdayakan orang-orang yang terpinggirkan.
- Bekerja dengan berbagai tingkat pemerintahan.
- Bekerja pada pemberian layanan dan advokasi serta reformasi kebijakan.



Gambar 2.5 Ekosistem Inklusi

Kelebihan

- Program kompleks, menantang, ambisius dan tidak lazim dalam perkembangannya karena melibatkan lebih dari 100 mitra di berbagai tingkat, bekerja pada isu-isu kompleks tentang identitas, menjangkau kelompok terpinggirkan, dan mengandalkan berbagai mitra program untuk mengidentifikasi rencana kerja.
- Mendanai pekerjaan inovatif di mana pencapaian inklusi menjadi prioritas (*'no one left behind'*) dibenarkan dan secara umum berhasil.
- Program menyatukan sejumlah organisasi.
- Desain program tersebut memberdayakan organisasi masyarakat lokal setempat dalam menanggapi kebutuhan mereka.
- Program bekerja dengan cara halus dengan memfasilitasi pembangunan yang dipimpin secara lokal.

Kekurangan

- Program canggih dan menantang sehingga desainnya membuatnya sulit untuk dibuat meyakinkan.
- Program membahas isu-isu yang sedang dibahas

secara nasional sehingga ruang lingkup menjadi besar.

- Desain program memberdayakan organisasi masyarakat lokal dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya inkoherensi dan tidak adanya fokus strategis yang jelas.
- Program bekerja dengan cara halus yang mungkin berakhir menjadi tidak lebih dari sekedar program hibah

Capaian pelaksanaan:

- Pembentukan & Penguatan Kelompok Ekonomi Masyarakat

INKLUSI mendukung pembentukan >2.000 kelompok ekonomi berbasis komunitas, termasuk koperasi, kelompok tani, usaha perempuan, kelompok disabilitas, dan waria.

Beberapa capaian utama:

- PEKKA: >190 kelompok, >5.900 anggota, termasuk PEKKA Mart dan usaha individu.
- PERMAMPU: >600 kelompok, >2.650 anggota, termasuk *credit union* perempuan.
- KAPAL Perempuan: >470 kelompok, >940 anggota.
- 'Aisyiyah: >100 kelompok (BUEKA, Tani, Nelayan), >1.100 anggota.
- Migrant CARE: 7 koperasi purna migran, >596 anggota.
- PKBI: 21 kelompok usaha waria, 67 penerima manfaat.
- BAKTI: 12 unit usaha, 22 anggota (19 penyandang disabilitas).
- SIGAB: 17 kelompok usaha disabilitas (KDD/KDK).

- Kemitraan: Bentuk koperasi minoritas seperti *Koperasi Lampion Merah* (107 perempuan, Rp94 juta modal).
- Dukungan Pemerintah, Swasta & Inovasi Wilayah
 - Kelompok Suku Anak Dalam (SAD) menerima bantuan ikan dan kolam → panen 800 kg.
 - Forum Disabilitas di Sumba Timur mendapat bantuan kambing dari SILPA Desa.
 - Kelompok Tani 'Aisyiyah mendapat *greenhouse* Rp75 juta, bibit, ternak, dan alat dari pemerintah.
 - Terbentuk 7 pasar lokal (Lembata, Aceh Barat Daya, Trenggalek, Kebumen).
 - Kemitraan dengan Indofood, Alfamart, Lawson, dan UMKM membuka pelatihan dan akses kerja untuk pemuda dan disabilitas.
- Peningkatan Kapasitas, Pendidikan & Kemandirian Ekonomi
 - PEKKA: Wisuda >700 peserta Akademi Paradigra di 22 kabupaten/kota; >230 usaha individu terbentuk.
 - PERMAMPU: Pendidikan kritis & politik mendukung partisipasi perempuan dalam pemilu.
 - 'Aisyiyah & mitra lain fasilitasi pelatihan keterampilan, kewirausahaan, akses pendanaan, dan dokumentasi praktik baik.
 - Desbumi Migrant CARE: Pengurus koperasi mulai aktif berinovasi, memahami tanggung jawab, dan kolaborasi dengan pemerintah.

Midterm Review (27 Mei dan 14 Juni 2024)

Evaluasi

- Efektivitas
 - Program berhasil memperkuat kemampuan dan

kemitraan untuk mencapai tujuan, namun mitra lokal kecil masih lemah dan butuh dukungan kapasitas. Risiko **kehilangan fokus strategis (mission creep)** karena definisi kelompok marginal yang terlalu luas, cakupan dan wilayah yang besar.

- Program berjalan sesuai rencana, namun **kurangnya target angka** dalam EoPO menyulitkan **penilaian capaian**, seperti pada EoPO1 yang tidak menetapkan jumlah penerima manfaat.
- **Perubahan sistemik lewat kolaborasi** mulai terlihat di beberapa daerah. **Fokus isu dan wilayah perlu dipersempit** agar lebih efektif, namun berisiko bertentangan dengan prinsip "*no one left behind.*"
- Pemantauan, Evaluasi, Penelitian dan Pembelajaran (MERLA) terkait keberadaan Informasi
 - **Optimalisasi sistem MERLA** perlu dilakukan, termasuk penyesuaian anggaran mitra berbasis kinerja mulai 2025. Beberapa kegiatan tambahan MERLA 2023 sebaiknya dihapus agar program lebih fokus.
 - Lima fokus pembelajaran INKLUSI: penguatan kapasitas mitra, **adaptasi model pemberdayaan**, dukungan perubahan norma dan kebijakan, penanganan isu inklusi sensitif, dan dampak aksi kolektif. Disarankan membangun **sistem pembelajaran terstruktur** lewat pertemuan regional dan kelompok kerja teknis.
- Relevansi
 - INKLUSI berhasil mengintegrasikan isu Gender

Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) ke kebijakan dan **memberdayakan kelompok terpinggirkan** sebagai pelaku aktif pembangunan.

- Mekanisme koordinasi melibatkan banyak pemangku kepentingan, namun perlu **peningkatan koordinasi internal dan fasilitasi hubungan**.
- Modalitas program membuka peluang bagi organisasi lokal memimpin perubahan, meski terdapat perbedaan **kapasitas mitra dan tantangan sistem**.
- Peluang
 - INKLUSI memperkuat kesadaran dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim melalui model pemberdayaan, meski **dokumentasi masih perlu diperbaiki**.
 - Program sejalan dengan prioritas utama, namun perlu **penyederhanaan buku pegangan** GEDSI dan **penyesuaian sistem** MERLA agar lebih relevan dengan konteks lokal.
- Pembelajaran
 - Desain program INKLUSI yang melibatkan banyak pihak **memakan waktu**, namun efektif membangun rasa kepemilikan pemerintah dan mitra.
 - Beberapa aspek desain dan pengadaan perlu **peningkatan**, termasuk kolaborasi mitra, dukungan inti, alokasi anggaran jelas, dan pendanaan fleksibel jangka panjang.

Kesimpulan Capaian dan evaluasi

Program INKLUSI berhasil memberdayakan kelompok

ekonomi komunitas marginal melalui kolaborasi dengan mitra lokal, pemerintah, dan swasta, serta integrasi isu GEDSI dalam kebijakan. Keberhasilannya terlihat pada **peningkatan kapasitas, akses ekonomi**, dan kesadaran terhadap perubahan iklim. Namun, program masih menghadapi tantangan seperti lemahnya kapasitas mitra lokal, cakupan yang terlalu luas, kurangnya indikator kuantitatif, serta perlunya perbaikan koordinasi internal dan sistem pemantauan agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Stakeholder

- Mitra Pelaksana
 - 'Aisyiyah
 - BaKTI (*Bureau for Research and Knowledge Transfer for Indonesian Development*)
 - KAPAL Perempuan
 - Kemitraan
 - Migrant CARE
 - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU)
 - PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga)
 - PERMAMPU – Konsorsium Perempuan Sumatera MAMPU
 - PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)
 - Pusat Rehabilitasi (PR) YAKKUM.
 - Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB Indonesia)
- Mitra Penelitian
 - AIDRAN – Australia-Indonesia Disability

Research and Advocacy Network

- Akatiga & Universitas Parahyangan
- Badan Kerjasama & Manajemen Pengembangan Universitas Airlangga
- Cakra Wikara Indonesia (CWI)
- *Center for Health Policy and Management* (CHPM) Universitas Gadjah Mada
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta
- PUSKAPA Universitas Indonesia

b. Kementerian Sosial

1) Program Pahlawan Ekonomi Nusantara/PENA (Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi/PPSE)

Deskripsi Program:

- Program PENA adalah kegiatan membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpencil, dan/atau korban bencana.
- Program PENA bertujuan untuk meningkatkan pendapatan KPM untuk kesejahteraan keluarga; dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi KPM secara Berdikari.
- Sasaran program ini yaitu kelompok yang memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, kerentanan, keterpencilan, dan korban bencana.
- Bentuk bantuan Program PENA terdiri atas bantuan usaha; pelatihan; dan pendampingan.
- Mekanisme Program PENA dilaksanakan melalui tahapan meliputi asesmen; penyusunan proposal;

penetapan; pelaksanaan; dan pemantauan dan evaluasi.

- Pemberian bantuan usaha dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan Bank atau Pos penyalur.
- Pelatihan dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, supervisi usaha, dan promosi usaha.
- Pendamping program PENA diberikan peningkatan kapasitas yang meliputi pelatihan, seminar, workshop, studi banding, dan bimbingan teknis.
- Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur kesinambungan peningkatan kesejahteraan KPM Program PENA; mengukur efektivitas Program PENA; dan merumuskan aksi koreksi atas pelaksanaan Program PENA.
- Pengaduan pelaksanaan Program PENA dapat dilakukan melalui Pusat Kendali; sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat; dinas sosial daerah provinsi; dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- Sumber pembiayaan pelaksanaan Program PENA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- Stakeholder: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; PT Bank Syariah Indonesia Tbk; dan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyalur bantuan usaha. Kemudian, dinas sosial daerah provinsi; dan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Mekanisme Program:

- **Asesmen**
Asesmen bertujuan untuk mengetahui kelayakan calon PM PENA, yaitu mengetahui kesesuaian antara minat, kemampuan diri dan sumber daya, mengetahui potensi untuk berkembang, dan mengetahui kebutuhan usaha atau bekerja. Tahapan asesmen pada PENA Reguler dilaksanakan berdasarkan *clean data* yang sudah diberikan dari Kementerian Sosial yang berdasarkan pada penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- **Penyusunan Proposal**
Setelah tahapan asesmen dilakukan, PM PENA membuat proposal yang dibantu oleh pendamping sosial, yang selanjutnya proposal tersebut dikirim kepada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial untuk dilakukan *screening* proposal sesuai dengan format yang sudah ditetapkan.
- **Penetapan**
Penetapan dilakukan setelah proposal yang diajukan dinyatakan layak menerima bantuan PENA. Kemudian, PM PENA sudah ditetapkan secara langsung untuk ke tahapan selanjutnya.
- **Pelaksanaan**
Pelaksanaan Program PENA dilakukan dengan pemberian bantuan program PENA. Bentuk bantuan program PENA berdasarkan Permensos No 7 Tahun 2023 Pasal 5, yaitu bantuan usaha, pelatihan dan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud adalah pendampingan yang dilakukan kepada PM PENA diberikan dalam bentuk pemberian akses kepada mitra dalam rangka pengembangan usaha.

- **Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh pendamping sosial setiap bulan untuk mengetahui perkembangan usaha. Kemudian hasil pemantauan tersebut diinput ke dalam aplikasi SIGMA yang nanti nya data hasil monitoring tersebut sebagai bahan pertimbangan apakah PM PENA sudah bisa di graduasi atau belum. Kementerian Sosial mengatakan bahwa KPM yang siap untuk melakukan graduasi sudah harus memiliki pendapatan di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan pendapatan tersebut stabil dalam tiga bulan.

Capaian Program:

- Dikutip dari laman kemensos.go.id, Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) terbukti berhasil meningkatkan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sejak tahun 2022, Kementerian Sosial telah menyalurkan PENA kepada 11.352. Sebanyak 98,9% dari total KPM mengaku pendapatannya meningkat setelah menerima PENA.
- Pada bulan Oktober, sebanyak 2.441 KPM berhasil di graduasi. Angka ini menambah jumlah KPM yang graduasi dari bantuan sosial menjadi 7.814.
- PENA mampu meningkatkan penghasilan KPM sehingga dapat keluar dari kemiskinan.
- Dari 11.352 KPM, 8.779 sudah berada di atas kemiskinan.
- Sebanyak 944 KPM mengalami peningkatan pendapatan. 1.495 KPM pendapatannya meningkat tapi masih di bawah garis kemiskinan, dan hanya 134 KPM yang pendapatannya belum meningkat.

Hambatan Program:

- Pada tahap asesmen, yaitu data clean yang diberikan oleh Kementerian Sosial terdapat ketidaksesuaian dengan fakta di lapangan.
- Pendamping sosial perlu waktu untuk pengenalan wilayah agar dapat menilai atau melihat kondisi asli KPM apakah benar-benar membutuhkan bantuan PENA atau tidak.
- Pelatihan yang diberikan melalui *zoom meeting* menghambat penyampaian materi terhadap PM PENA, dikarenakan masih banyak penerima manfaat yang tidak memiliki teknologi yang mendukung dan belum mengerti dengan penggunaan *zoom meeting*.
- Pengkapasitasan terhadap pendamping sosial PENA belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga pendamping masih memiliki keterbatasan dalam memberikan pendampingan kepada PM PENA.

Studi Kasus (Kota Surabaya)

Studi oleh Putri & Prabawati (2022) menunjukkan bahwa program PENA telah berjalan dengan baik sebagai salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Surabaya. Studi ini melakukan evaluasi program menggunakan kriteria oleh William Dunn dengan uraian sebagai berikut.

- Efektivitas: program ini dapat dikatakan telah efektif dalam pelaksanaannya, dibuktikan dengan semakin bertambahnya peserta yang mengikuti program. Program ini juga menurunkan angka kemiskinan di Kota Surabaya.
- Efisiensi: PENA dapat dikatakan efisien, dimana sumber daya manusia, sumber daya alat dan

bangunan serta sumber daya anggaran telah dikelola dan terstruktur dengan baik.

- **Kecukupan:** PENA belum dikatakan cukup secara keseluruhan meskipun telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Kota Surabaya. Berkurangnya jumlah peserta pelatihan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman, serta akses yang terbatas.
- **Pemerataan:** sasaran dalam Program PENA dapat dikatakan telah tepat dan merata, serta diperlakukan adil tanpa adanya diskriminasi.
- **Responsivitas:** program ini mendapatkan respon baik dari masyarakat, namun masih ada kendala berupa masih sedikit masyarakat yang mengetahui produk yang dihasilkan para peserta.
- **Ketepatan:** Program PENA dinilai tepat. Program ini telah menurunkan angka kemiskinan di Kota Surabaya, dan memberikan banyak manfaat bagi anggotanya, seperti peningkatan pendapatan anggota setelah mengikuti Program PENA ini.

2) Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Definisi

UEP adalah bantuan yang diberikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Tujuan

Penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu

memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial

Mekanisme

- **Pembentukan KUBE**

Pembentukan KUBE memiliki kriteria yakni mempunyai jenis usaha dan tinggal di desa/kelurahan dalam kecamatan yang sama serta mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha. Jumlah anggota KUBE terdiri dari 5 sampai 20 kepala keluarga. Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota

- **Pendamping Sosial KUBE**

Setiap KUBE akan didampingi oleh pendamping sosial yang memiliki tugas:

- membentuk KUBE;
- memverifikasi calon penerima bantuan;
- menyiapkan calon penerima bantuan;
- menyiapkan rencana anggaran biaya;
- memberikan bimbingan teknis kepada KUBE;
- memberikan bimbingan motivasi sosial;
- mendampingi pelaksanaan UEP yang dilaksanakan oleh KUBE;
- memantau pelaksanaan kegiatan; dan
- membantu dalam penyusunan laporan kegiatan

- **Pendamping Sosial KUBE berasal dari:**

- tenaga kesejahteraan sosial kecamatan
- pekerja sosial masyarakat
- pengurus karang taruna
- pengurus lembaga kesejahteraan sosial
- tokoh pemuda, tokoh agama, atau tokoh masyarakat

- **Pemanfaatan UEP**

UEP diberikan kepada KUBE berupa uang dengan besaran paling sedikit Rp10.000.000,00. Pemanfaatan UEP oleh KUBE dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah.

- **Permohonan UEP dan Pencairan UEP**

Permohonan UEP dapat diajukan oleh masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial dan dinas sosial daerah kabupaten/kota

- Masyarakat atau lembaga kesejahteraan sosial mengajukan permohonan UEP berupa proposal kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan persetujuan dari lurah/kepala daerah
- Dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi anggota KUBE calon penerima UEP berdasarkan data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu serta jenis usaha dari KUBE
- Hasil verifikasi dan validasi beserta proposal disampaikan secara tertulis oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota kepada Menteri Sosial.
- unit kerja eselon II yang menangani KUBE melakukan seleksi terhadap anggota KUBE dan jenis usaha sesuai dengan proposal yang telah dikirimkan dan selanjutnya hasil penetapan lokasi dan KUBE penerima UEP disampaikan oleh kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada KUBE penerima UEP

Pencairan UEP dilakukan setelah KUBE membuat rancangan anggaran biaya penggunaan UEP yang akan dilakukan melalui mekanisme transfer bank

penyalur kepada rekening kelompok penerima

- **Pendanaan**
Sumber pendanaan UEP berasal dari APBN, APBD, dana hibah dalam negeri dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- **Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan**
Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap penyaluran bantuan UEP kepada KUBE. KUBE diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan serta pelaksanaan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Menteri Sosial paling lambat 130 hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

Evaluasi

- **Studi Kasus Kecamatan Karangasem**
Penelitian yang dilakukan oleh Aryantini dan Purbadharmaja di Kecamatan Karangasem dengan melibatkan sampel sejumlah 75 responden dengan teknik purposive sampling menunjukkan bahwa:
 - pelaksanaan sosialisasi program bantuan sosial KUBE mendapatkan nilai yang cukup efektif dengan nilai 3,16 dari 4 atau sekitar 79,00 persen
 - tingkat ketepatan sasaran dinilai sangat efektif dengan mendapatkan nilai 3,29 dari 4 atau sebesar 82,25 persen
 - ketepatan jumlah dana bantuan dinilai cukup efektif dengan nilai 3,11 dari 4 atau sebesar 77,75 persen
 - pelaksanaan monitoring dinilai sangat efektif dengan nilai 3,36 dari 4 atau sebesar 84,00 persen

- persepsi responden terhadap petugas memiliki respon yang cepat menunjukkan nilai 3,27 dari 4 atau sebesar 81,75 persen (Sangat Efektif)
- Persyaratan penerimaan bantuan sosial dinilai sangat efektif dengan nilai 3,28 dari 4 atau sebesar 82,00 persen
- Pencapaian tujuan program bantuan sosial dinilai sangat efektif dengan nilai 3,25 dari 4 atau sebesar 81,25 persen
- Pemanfaatan bantuan sosial dinilai sangat efektif dengan nilai 3,35 dari 4 atau sebesar 83,75 persen
- penyaluran bantuan sosial dinilai sangat efektif dengan nilai 3,35 dari 4 atau sebesar 83,75 persen

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial KUBE di Kecamatan Karangasem dinilai sangat efektif sebesar 81,71 persen. Selain itu, program ini juga berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Kelemahan yang terdapat pada program ini adalah jumlah dana bantuan sebesar Rp20.000.000,00 yang dirasa masih kurang bagi beberapa kelompok masyarakat miskin di Kecamatan Karangasem

- Studi Kasus Kota Palangkaraya

Melianti, Yamani dan Berkat melakukan penelitian terhadap 32 KUBE di Kota Palangkaraya. Dari 32 KUBE yang diteliti, sebanyak 10 KUBE masuk ke dalam kategori gagal karena rencana kegiatan KUBE yang belum terlaksana, struktur organisasi yang tidak berfungsi, tidak ada pertemuan rutin kelompok

sehingga komunikasi yang sulit antar anggota, modal awal usaha yang habis dibagi kelompok, usaha yang dijalankan macet dikarenakan ternak yang mati, dan sumber daya alam yang dipergunakan kelompok. Selanjutnya, terdapat 12 KUBE yang masuk ke dalam kategori berkembang karena rencana kegiatan yang sudah terlaksana, struktur organisasi yang dipilih secara musyawarah, adanya kesepakatan dalam kelompok, modal usaha yang sudah dikembangkan kelompok dan hasil usaha sudah dapat dinikmati kelompok, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok. Sayangnya, dari 32 KUBE yang diteliti belum ada yang masuk ke dalam kategori maju dikarenakan modal awal usaha yang belum berlipat, belum terjalinnya kemitraan dengan pihak lain paling rendah di tingkat kecamatan, kelompok belum memberikan keterampilan kerja diluar anggota KUBE, belum terbentuknya KUBE yang baru dari kelompok yang ada, belum adanya aset usaha yang meningkatkan pendapatan anggota dan anggota KUBE belum keluar dari data terpadu masyarakat tidak mampu.

Melalui 5 jenis usaha yakni perikanan, peternakan, perkebunan, penyewaan dan berdagang, Program KUBE telah memberikan manfaat baik dalam pengetahuan, keterampilan, sosial maupun ekonomi. Modal usaha yang telah diberikan dapat dikelola untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dari segi ekonomi dapat dilihat dengan adanya peningkatan pendapatan. Dari segi sosial, dengan adanya program KUBE meningkatkan rasa kekeluargaan di tengah masyarakat dalam mempertanggungjawabkan UEP agar berkelanjutan.

c. Kementerian PPA

1) Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

- **Definisi**

P2WKSS adalah peningkatan peranan perempuan yang diselenggarakan melalui serangkaian program, dengan menggunakan pola pendekatan lintas sektor dan lintas pelaku di daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.

Ini adalah program lintas sektor yang mencakup sektor keagamaan, sektor hukum, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor perindustrian dan perdagangan, sektor kominfo, sektor koperasi & UMKM, sektor sosial, sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Sektor ketahanan pangan, sektor PKK, serta sektor Keluarga Berencana (KB).

- **Tujuan Umum**

Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera.

- **Sasaran**

Sasaran dari program P2WKSS ini adalah keluarga miskin di desa/kelurahan yang ditetapkan bupati/wali kota dengan perempuan sebagai penggerak utamanya (pendapatan di bawah 150 ribu per bulan).

- **Program P2WKSS**

Secara garis besar program P2WKSS dibagi menjadi:

- Program dasar (pendidikan, kesehatan/gizi ibu dan

anak, kesetaraan gender, dll)

- Program lanjutan (pelayanan dan pendampingan)
- Pelayanan → peningkatan pendapatan keluarga melalui usaha kelompok dan koperasi
- Pendampingan → perluasan kesempatan kerja/berusaha dan peningkatan pengetahuan/keterampilan bagi perempuan untuk meningkatkan penghasilan bagi diri sendiri dan keluarga

● **Studi Kasus Desa Purwodadi (Magetan) Tahun 2018**

Rapat koordinasi

Menentukan desa yang akan diberikan pembinaan dalam rangka kegiatan P2WKSS dengan melihat potensi yang bisa dikembangkan. Program P2WKSS diprioritaskan pada wilayah desa/kelurahan yang rawan di bidang sosial ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Orientasi P2WKSS

Turun lapang untuk mencocokkan atau memverifikasi data potensi desa sehingga dengan orientasi ini dapat diperoleh gambaran untuk menyusun programnya. Misal desa punya banyak ketela maka akan bikin produk ketela.

Penyusunan Program Kerja

Menyusun kegiatan berdasarkan potensi desa beberapa di antaranya:

- Penyuluhan pertanian: sosialisasi dan pembinaan teknik pemanfaatan pekarangan; pemberian sarana produksi; pembuatan demplot pemanfaatan pekarangan; pelatihan dan praktek lapangan pengelolaan hasil pertanian; pembinaan/penyuluhan di bidang peternakan, perikanan dan kesehatan hewan; pelatihan

pengolahan hasil peternakan dan perikanan yaitu pembuatan telur asin, bakso ayam, bakso sapi, abon sapi, nugget ayam

- Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga, melalui: Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB)
- Kelompok Kegiatan Usaha, meliputi industri kerajinan rumah tangga seperti bros, makanan kecil, dan usaha kecil untuk meningkatkan pendapatan keluarga
- Kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan, meliputi pembinaan remaja, balita, dan lansia
- Kegiatan penyuluhan dan pelayanan lanjut usia antara lain; posyandu lansia dan POSBINDU; Senam lansia; dan Bina Keluarga Lansia (BKL)

Hasil di Desa Purwodadi, Magetan

- Peningkatan angka melek huruf penduduk Desa Purwodadi
- Meningkatkan kesadaran ibu rumah tangga untuk lebih mandiri dan tidak bergantung ke suami melalui wirausaha misalnya dengan berjualan kue
- Meningkatkan skill dan keterampilan pedagang dari adanya program pelatihan/penyuluhan seperti pengemasan produk sehingga pedagang di Desa Purwodadi lebih paham mengenai produksi yang baik
- Meningkatkan pengetahuan ibu rumah tangga mengenai tumbuh kembang anak

• Studi Kasus Kampung Pamoyanan (Sukabumi) Tahun 2024

Pelaksanaan di Pamoyanan:

- Pembuatan kue basah
- Pembuatan minyak kelapa dan sayuran
- Merajut
- pembuatan bolu batik,
- Pembuatan mocaf dan olahan makanan dari mocaf,
- Pelatihan Olahan Pangan Lokal Non Beras Dan non tepung,
- Pengolahan berbahan dasar ayam

Hasil di Kampung Pamoyanan, Sukabumi

Evaluasi program menggunakan model *context, input, process*, dan *product* (CIPP).

- Mayoritas responden/warga binaan sebanyak 72% menilai aspek konteks Program P2WKSS di Kampung Pamoyanan sebagai berhasil. Pelatihan yang diselenggarakan tetap dirasakan bermanfaat dan diminati, seperti pelatihan membuat kue, merajut, dan membuat sabun.
- Sebanyak 86% responden/warga binaan menilai aspek input Program P2WKSS Kampung Pamoyanan sangat berhasil. Karena pelatihan diisi oleh tenaga ahli, seluruh sarana dan biaya ditanggung penyelenggara, bahkan peserta mendapat konsumsi dan beberapa peralatan.
- Sebanyak 92% responden/warga binaan menilai aspek proses Program P2WKSS sangat berhasil. Pelatihan dijalankan sesuai prosedur dan aturan yang jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Pelatih menyampaikan dan mempraktikkan materi dengan baik, serta mampu menjawab pertanyaan peserta. Hal ini menjadikan pelatihan tertib, terarah, dan mudah dipahami.

- Sebanyak 72% responden menilai aspek produk Program P2WKSS berhasil. Program meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Namun, dampak ekonomi belum berkelanjutan karena kesulitan pemasaran produk setelah program selesai.

- **Studi Kasus Kabupaten Kampar Tahun 2017**

- Pelaksanaan di Kampar:**

- Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan seperti pemberian bibit tanaman dan sosialisasi/penyuluhan pola hidup sehat dan bersih. Selain itu, terdapat pelatihan untuk perempuan seperti merajut, tata boga, *quilting*, dan membatik.

- Hasil di Kampar:**

- Dengan menggunakan kriteria William Dunn, pelaksanaan program P2WKSS dinilai belum berjalan dengan baik:

- Efektif → tujuan belum tercapai optimal meskipun sudah ada perbaikan kualitas kesehatan tetapi tidak ada perubahan pendapatan
 - Efisiensi → dengan dana & waktu yang ditetapkan tidak bisa memanfaatkan dengan baik untuk mencapai tujuan program. Contoh: fasilitator hanya memberikan bibit hortikultura tetapi tidak ada pendampingan
 - Kecukupan → banyak warga binaan masih berpendidikan rendah & bingung dengan mekanisme program sehingga tidak cukup jika hanya diberikan modal tetapi juga harus pendampingan sistem pemasaran
 - Pemerataan → pemberian bibit hortikultura tidak

dibagikan secara merata ke 60 warga dan tidak ada pembagian pelatihan yang jelas (ada satu warga yang mengikuti pelatihan banyak)

- Responsivitas → pemerintah belum memberikan informasi secara menyeluruh dan kurang merespon pertanyaan dari warga
- Ketepatan → terlambat dalam menjalankan program, yang seharusnya tahun 2009 sesuai Permendagri Nomor 26 tahun 2009 tetapi baru terlaksana tahun 2017. Selain itu menurut Permendagri pemilihan desa binaan adalah hanya desa yang rawan secara pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tetapi pemerintah daerah memilih desa binaan didasarkan bukan hanya desa miskin, namun jarak tempuh juga dipertimbangkan oleh pihak penyelenggara program sehingga desa miskin yang masuk dalam kategori tidak ter-cover.

d. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat

1) PNPM Mandiri

Definisi

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Tujuan Khusus

- Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
- Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Strategi

Strategi Dasar

- Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

Strategi Operasional

- Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
- Memperkuat peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
- Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.
- Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
- Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.

Prinsip Dasar

- Bertumpu pada pembangunan manusia

- Otonomi
- Desentralisasi
- Berorientasi pada masyarakat miskin
- Partisipasi
- Kesetaraan dan keadilan gender
- Demokratis
- Transparansi dan akuntabel
- Prioritas
- Kolaborasi
- Keberlanjutan
- Sederhana

Program Turunan:

- PNPM Mandiri Perdesaan
- PNPM Perdesaan R2 (Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
- PNPM Mandiri Agribisnis / SADI (*Smallholder Agribusiness Development Initiative*)
- PNPM Generasi Sehat dan Cerdas
- PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan
- PNPM Mandiri Perkotaan
- PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan
- Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
- Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
- PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim)

Tahapan Strategi Operasional

- **Pembelajaran**

Tahap pengenalan bagi masyarakat, pemerintah, dan pelaku pembangunan lainnya. Masyarakat dan pelaku pembangunan mendapatkan kesempatan untuk memahami mekanisme pengelolaan pembangunan

partisipatif yang ditawarkan PNPM Mandiri, sementara Pemerintah menjadikan tahap ini sebagai wahana pembelajaran dalam (1) penerapan pengelolaan pembangunan partisipatif, dan (2) penerapan model kerjasama antar pemerintah nasional dan daerah untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan mengendalikan program. Tahap pembelajaran membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun, tergantung pada kondisi wilayah dan kesiapan masyarakatnya.

- **Kemandirian**

Tahap ini merupakan proses intensifikasi dari tahap internalisasi dengan dimulai dari lokasi-lokasi dimana masyarakat sudah pernah melaksanakan program pemberdayaan melalui proses berikut: (i) pelembagaan pengelolaan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan dan kecamatan; (ii) pelembagaan pengelolaan pendanaan mikro yang berbasis masyarakat untuk melayani masyarakat miskin; dan (iii) peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan. Tahap kemandirian ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun.

- **Keberlanjutan**

Tahap keberlanjutan ini dimulai dengan menyiapkan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun. Pada tahap keberlanjutan masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil, semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhan-

nya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Proses Pemberdayaan Masyarakat

- Sosialisasi awal dan musyawarah masyarakat
- Mengenali Kemiskinan
- Pemetaan Swadaya
- Pengorganisasian Masyarakat
- Penyusunan Rencana
- Pelaksanaan Kegiatan
- Pemanfaatan dan Pemeliharaan Hasil Kegiatan

Hasil Evaluasi Program

- **Evaluasi Program Keseluruhan**

- **Studi Kasus:** Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

Studi Rizal et al (2021) menerapkan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn untuk mengevaluasi pelaksanaan program PNPM mandiri sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cilandak. Hasil identifikasi menyimpulkan bahwa program PNPM Mandiri telah secara tepat dilaksanakan untuk membantu masyarakat miskin berdasarkan dari keterlibatan masyarakat miskin yang benar-benar tidak mempunyai penghasilan tetap. Secara rinci, hasil identifikasi tiap kriteria dapat diketahui sebagai berikut:

Efektivitas:

- Terbentuknya institusi lokal seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang melibatkan masyarakat langsung

menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan.

- Masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan, termasuk gotong royong dan pembangunan sarana/prasarana.

Efisiensi:

- Proses pelaksanaan program membutuhkan beberapa tahapan, namun berjalan sistematis (perencanaan, pelatihan, administrasi).
- Pencairan dana dilakukan langsung oleh tokoh masyarakat, mempercepat dan mengefisienkan proses.
- Masyarakat semakin proaktif dan memahami proses dengan baik.

Kecukupan:

- Program berhasil meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.
- Kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan pembangunan berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat kecil.
- Dilaksanakan di tingkat kelurahan/RW, menasar masyarakat ekonomi lemah secara langsung.

Pemerataan:

- Transparansi menjadi prinsip utama; masyarakat dilibatkan dalam setiap proses perencanaan dan evaluasi.
- Program menjangkau masyarakat kurang mampu berdasarkan kriteria yang jelas dan kesepakatan bersama.

Responsivitas:

- Masyarakat kurang mampu mulai mengetahui dan memahami program berkat pendekatan langsung.
- Fokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup warga miskin.

Ketepatan:

- Program tepat sasaran karena menysasar masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak memiliki penghasilan tetap.
 - Masyarakat diberikan insentif berdasarkan hasil kerja untuk kebutuhan dasar dan pengembangan ekonomi.
 - Proses pengawasan juga dilakukan agar kegiatan benar-benar selesai 100%.
- **Studi Kasus:** Kampung Jeropet, Desa Teluk Bakau, dan Desa Malang Rapat
Jenawi (2016) melakukan evaluasi program PNPM Mandiri di tiga desa di Kabupaten Bintan dengan menerapkan pendekatan *context*, *input*, *process*, dan *product* (CIPP) dengan hasil studi sebagai berikut:

Konteks

- Kampung Jeropet: Kebutuhan masyarakat terhadap usaha produktif terpenuhi.
- Desa Teluk bakau: Program tidak sesuai kebutuhan utama (misalnya air bersih, bukan taman bacaan).
- Desa Malang Rapat: Cukup tepat sasaran, yaitu rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

Input

- Kampung Jeropet: Fasilitator aktif, sarana lengkap, dana dimanfaatkan untuk usaha kecil (tape, kerupuk, dll).
- Desa Teluk bakau: Dana digunakan untuk taman bacaan dan infrastruktur, tapi tidak sesuai kebutuhan warga.
- Desa Malang Rapat: Dana digunakan untuk pembangunan rumah, tapi belum menyeluruh. Sarana tersedia tapi pemanfaatannya rendah.

Proses

- Kampung Jeropet: Sistem kerja jelas, informasi tersedia di kantor PNPM. Hambatan: penunggakan cicilan pinjaman.
- Desa Teluk bakau: Sistem kerja kurang jelas, informasi hanya dari RT, partisipasi masyarakat rendah.
- Desa Malang Rapat: Sistem kerja tidak jelas, masyarakat tidak memelihara hasil pembangunan.

Produk/Hasil

- Kampung Jeropet: Dampak positif: usaha masyarakat berkembang. Dampak negatif: kesulitan membayar cicilan.
- Desa Teluk bakau: Dampak negatif: masyarakat bingung, hasil infrastruktur tidak terasa manfaatnya.
- Desa Malang Rapat: Dampak sebagian positif (rumah layak huni), namun masih sedikit masyarakat yang terbantu.

- **Studi Kasus:** Kampung Demini, Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan
- Rumbrawe et al (2014) mengkaji tingkat keberhasilan PNPM Mandiri dan menganalisis hubungan antara pengelolaan TPKK dengan pelaksanaan program PNPM Mandiri. Hasil penelitiannya sebagai berikut:
- Terdapat 30 responden (90.9%) yang memiliki tingkat partisipasi (Y1) dengan kategori baik. Bentuk-bentuk partisipasi nyata dalam program PNPM antara lain tahapan musyawarah (MUSKAMSOS) untuk membicarakan program dan kegiatan yang dilaksanakan seperti pembangunan infrastruktur MCK, posyandu, jalan padat karya, rumah masyarakat, air bersih dan lain-lain.
 - Terdapat 32 responden (96.9%) memiliki tingkat keswadayaan (Y2) yang dikategorikan agak baik. Hal ini disebabkan masyarakat memiliki anggapan bahwa fasilitas yang dibangun diperuntukan mereka, sehingga lebih banyak material dan tenaga yang diberikan.
 - Terdapat 33 responden (100%) masuk kategori agak baik yang mampu merawat dan melanjutkan program-program pembangunan secara mandiri dalam tingkat keberlanjutan (Y3).
 - Secara komposit, pelaksanaan program PNPM Mandiri disimpulkan masuk dalam kategori agak berhasil sesuai dengan tingkat responden yang masuk kriteria agak baik.

- **Studi Kasus:** Kecamatan Balige
 Sibarani (2019) meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengikuti program PNPM-MP, dan bagaimana pelaksanaan program tersebut secara sasaran di Kecamatan Balige. Berikut merupakan beberapa hasil temuan studinya:
 - Terdapat 76 responden (81,7%) yang berpartisipasi secara baik, sementara terdapat 14 responden (15,1%) berpartisipasi secara tidak baik dalam pelaksanaan program.
 - Program PNPM-MP telah tepat sasaran bagi penerima program terbukti dengan adanya perubahan tingkat kesejahteraan ekonomi
 - Program PNMP-PM berbasis pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta/masyarakat di bidang pertanian.

- **Studi Kasus:** Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur
 Tukasno (2013) melakukan evaluasi proses pemberdayaan pada kegiatan PNPM-MPd (Mandiri Pedesaan) yang ditinjau dari aspek pengembangan kapasitas masyarakat. Pendekatan yang dipilih merupakan *mix-method* dengan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan program, sementara metode kuantitatif untuk mengetahui sikap dan cara pandang masyarakat terhadap program pemberdayaan yang dilaksanakan. Hasil penelitiannya sebagai berikut:
 - **Proses Pengembangan Kapasitas**
 PNPM-MPd telah menjalankan kegiatan

sosialisasi, pelaksanaan siklus, dan pelatihan dengan baik menggunakan pendekatan sosio-kultural yang memperhatikan aspek keagamaan, gender, dan kebiasaan masyarakat.

- **Sikap dan Pandangan Masyarakat**

Masyarakat menunjukkan sikap positif terhadap program pemberdayaan. Sikap ini tidak terlalu dipengaruhi oleh usia, pendidikan, atau peran dalam program, melainkan lebih dipengaruhi oleh jenis kelamin, di mana perempuan memiliki kualitas keterlibatan yang lebih rendah dibanding laki-laki meskipun tingkat partisipasi secara kuantitas mencukupi.

- **Evaluasi Proses dan Hasil**

Proses pemberdayaan telah sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh PNPM-MPd maupun literatur. Selama 10 tahun pelaksanaan, program berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pembangunan komunitas, meskipun belum mencapai kemandirian penuh, sehingga masih diperlukan pembelajaran lanjutan secara berkesinambungan dan terintegrasi.

- **Dampak Luas (Multiplikatif)**

Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan turut mendorong pemberdayaan politik. Masyarakat belajar tentang kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen komunitas, yang kemudian meningkatkan tanggung jawab dan posisi

tawar mereka dalam relasi dengan pihak luar.

➤ **Studi Kasus:** Indonesia

Rusman (2020) meninjau evaluasi dampak pelaksanaan PNPM-Mandiri perdesaan terhadap tingkat kemiskinan di perdesaan dengan menggunakan data IFLS. Melalui estimasi *Propensity Score Matching* (PSM), hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Program PNPM-MPd memiliki dampak yang positif dan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan pada wilayah perdesaan di Indonesia, (ii) Desain program yang secara khusus mengedepankan unsur partisipasi masyarakat desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program, efektif mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 7,35 persen.

● **Evaluasi Mekanisme Dana Bergulir**

Studi Kasus: Kelurahan Padangmatinggi

- Kinerja PNPM dalam penyaluran dana ekonomi bergulir untuk memberdayakan masyarakat dikatakan tidak berjalan dengan baik karena kurangnya pengawasan atau pemantauan dari tim PNPM dan UPK tidak semua masyarakat yang meminjam bantuan dana ekonomi bergulir mengembalikan pinjamannya.
- Penyaluran dana bergulir belum mampu memberdayakan masyarakat karena masih adanya masyarakat yang tidak mampu membayar tunggakan atau cicilan pinjaman dana ekonomi bergulir, sehingga masyarakat kurang berdaya.

BAB III METODOLOGI

Analisis kebijakan ini menggunakan metode kualitatif melalui dua metode pengumpulan data yaitu *focus group discussion* (FGD) dan tinjauan literatur. Sedangkan metode analisis data dilakukan dengan SWOT *analysis* dan Bardach dalam proses pemilihan alternatif kebijakan. FGD dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perwakilan pemerintah, pelaku usaha, praktisi, serta akademisi. Sedangkan tinjauan literatur dilakukan untuk menelusuri dan menganalisis berbagai dokumen, laporan, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta menilai adanya potensi ancaman dan peluang yang muncul dari faktor eksternal (Phadermrod *et al*, 2019).

A. Focus Group Discussion (FGD)

FGD menurut Gerritsen dalam Bisjoe (2018) merupakan suatu diskusi terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam atau data kualitatif dari suatu kelompok tentang suatu topik. FGD adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang didesain untuk memperoleh informasi keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman peserta tentang suatu topik, dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator (Paramita & Kristiana, 2013). Teknik FGD dilakukan untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik, serta

menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti.

FGD memiliki karakteristik diantaranya yaitu, peserta memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang sama (homogen) dimana ciri-ciri yang sama ini ditentukan oleh tujuan atau topik diskusi dengan tetap menghormati dan memperhatikan perbedaan ras, etnik, bahasa; menggunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan peserta untuk memberikan jawaban yang disertai dengan penjelasan-penjelasan; dan menggunakan topik terfokus dimana topik diskusi ditentukan terlebih dahulu dan diatur secara berurutan. Pertanyaan diatur sedemikian rupa sehingga dimengerti oleh peserta diskusi (Krueger dalam Paramita & Kristiana, 2013).

FGD dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari unit teknis, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, APINDO, KADIN, ILO, UN Women, Setda Provinsi DKI Jakarta, dan Pakar Kewirausahaan. Pemilihan responden dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan sektor, tingkat kewenangan, serta relevansi terhadap topik pembahasan. Kriteria utama responden mencakup keterlibatan dalam perumusan atau implementasi kebijakan/program terkait pemberdayaan perempuan rentan dalam kemiskinan, pemahaman teknis dalam hal pengembangan kewirausahaan dan pelatihan vokasi, kemampuan memberikan perspektif strategis lintas sektor baik dari sisi pemerintahan, dunia usaha, maupun organisasi internasional, serta keterwakilan wilayah untuk memastikan pandangan yang komprehensif dan representatif.

B. Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur adalah kegiatan mengidentifikasi, merekam, memahami, membuat makna, dan mengirimkan informasi secara komprehensif. Tinjauan literatur mencakup pemilihan dokumen yang tersedia (baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan) tentang topik, yang berisi informasi, ide, data, dan bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu atau mengungkapkan pandangan tertentu tentang sifat topik, bagaimana hal itu terjadi akan diselidiki, dan evaluasi efektif dari dokumen-dokumen ini dalam kaitannya dengan penelitian yang diusulkan (Hart dalam Irwansyah, 2024).

Menurut Synder, tinjauan literatur penting sebagai metode riset karena literature review dapat menjawab pertanyaan dengan mengintegrasikan temuan dan perspektif dari banyak temuan empiris, tinjauan literatur dapat mengkomunikasikan kualitas studi yang disertakan sehingga dapat menunjukkan tingkat kepercayaan yang harus dimiliki stakeholder terkait hasil yang ada. Selain itu, tinjauan literatur membantu setiap peneliti *“join the conversation”* dengan memberikan konteks, menginformasikan metodologi, mengidentifikasi inovasi, meminimalkan penelitian duplikat, dan memastikan bahwa standar profesional terpenuhi (Maggio et al. dalam Irwansyah, 2024).

C. Analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT)

Sebelum melakukan perumusan model pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja perempuan rentan dengan kondisi kemiskinan, diperlukan pemetaan awal mengenai kondisi aktual, kekuatan dan kelemahan internal, tantangan,

serta peluang yang ada dengan melakukan analisis SWOT. Pada dasarnya, analisis SWOT merupakan *tools* yang digunakan untuk perencanaan strategis dalam konteks bisnis (Benzaghta et al., 2021). Namun, analisis ini juga dapat digunakan dalam berbagai konteks untuk membantu sebuah organisasi dalam menciptakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi sebuah keputusan (Gürel, 2017).

Secara garis besar, analisis SWOT terbagi menjadi dua aspek, yakni analisis internal dan eksternal. Analisis internal terdiri dari dua komponen, yaitu kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Sedangkan analisis eksternal terdiri dari komponen peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Masing-masing komponen tersebut selanjutnya diuraikan lebih rinci di bawah ini menurut penjelasan Gürel (2017).

1. Kekuatan (*Strengths*)

Strengths adalah karakteristik yang menambah nilai kepada suatu hal dan membuat hal tersebut lebih menguntungkan (*advantageous*) jika dibandingkan dengan hal yang lain (Gürel, 2017). *Strengths* juga dapat diartikan sebagai kemampuan atau ciri khas yang dimiliki sebuah organisasi yang membuatnya unggul dan memberikan kapasitas penting dalam menjalankan fungsinya (Thompson & Strickland, 1989).

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Weaknesses merupakan karakteristik yang kurang menguntungkan, bersifat negatif, atau merugikan jika dibandingkan dengan hal lain (Gürel, 2017). Menurut Thompson & Strickland (1989), *weaknesses* juga dapat dilihat sebagai keterbatasan atau kekurangan yang dimiliki organisasi, baik karena tidak dikuasai dengan baik maupun karena tidak sebaik pihak lain, sehingga menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan.

3. Peluang (*Opportunities*)

Opportunities adalah kondisi eksternal yang menguntungkan organisasi. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk memperkuat keunggulan, memperbaiki kelemahan, dan menghadapi ancaman, sehingga membantu pencapaian tujuan organisasi (Gürel, 2017; Harrison & St. John, 2004).

4. Ancaman (*Threats*)

Threats atau ancaman merupakan kondisi atau situasi yang dapat menghalangi terlaksananya suatu kegiatan dan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, ancaman bersifat negatif dan sebaiknya dihindari. Ancaman ini menjadi faktor yang dapat menyulitkan atau bahkan berpotensi menggagalkan pencapaian tujuan. Ancaman biasanya muncul akibat perubahan lingkungan, baik yang dekat maupun jauh, yang dapat menghambat organisasi dalam mempertahankan eksistensinya atau melemahkan daya saingnya (Gürel, 2017; Ülgen and Mirze, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi saat implementasi program nantinya. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar dalam merancang strategi dan model intervensi yang lebih efektif untuk pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja perempuan rentan miskin (desil 1).

D. Metode Bardach

Metode ini digunakan untuk memilih rekomendasi kebijakan dari beberapa alternatif kebijakan yang diusulkan. Bardach membagi kriteria evaluasi menjadi 4 kriteria, yaitu:

1. *Technical Feasibility*: mengukur apakah alternatif kebijakan yang diajukan secara teknis dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. *Economic and Financial Possibility*: berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh setiap alternatif kebijakan dan apakah yang nantinya dihasilkan dapat disebut dengan kemanfaatan.
3. *Political Viability*: mengukur apakah setiap alternatif kebijakan akan memberikan dampak kekuatan secara politis bagi kelompok-kelompok tertentu.
4. *Administrative Operability*: mengukur kemungkinan diterapkannya alternatif kebijakan tersebut dari perspektif administratif (ketersediaan sumber daya manusia, finansial, fasilitas, maupun waktu) (LAN, 2017).

Metode Bardach memungkinkan pengambilan alternatif kebijakan yang terbaik berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap aspek-aspek operasional, ekonomi, politik, dan administratif dari setiap program.

E. Keterkaitan antara Analisis SWOT dan Metode Bardach

Analisis SWOT digunakan untuk memetakan konteks masalah kebijakan dengan menangkap faktor internal (kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi isu kebijakan. Pendekatan ini membantu memberikan batasan masalah yang jelas, mengidentifikasi akar persoalan, serta menyoroti isu-isu prioritas yang perlu dianalisis lebih mendalam.

Sementara itu, Metode Bardach berperan sebagai kerangka kerja analitis yang sistematis untuk menyusun,

menilai, dan memilih alternatif kebijakan terbaik berdasarkan bukti dan kriteria yang terukur. Kombinasi antara analisis SWOT dan metode Bardach memungkinkan proses pengambilan kebijakan bergerak dari analisis kondisi menuju formulasi solusi kebijakan (*from situational analysis to solution analysis*) secara logis dan berbasis data.

Hasil analisis SWOT, terutama pada aspek *weaknesses* dan *threats*, dapat dijadikan dasar untuk mengidentifikasi masalah kebijakan dan menentukan fokus pengumpulan bukti empiris. Dengan demikian, tahapan analisis menurut Metode Bardach menjadi lebih berbasis bukti (*evidence-based*), realistis, dan relevan dengan kondisi faktual di lapangan. Selain itu, SWOT juga dapat dimanfaatkan untuk memproyeksikan dan memitigasi risiko kebijakan, dengan menilai sisi positif dan negatif dari setiap alternatif yang diajukan sebelum diambil keputusan akhir.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Ringkasan Hasil Benchmarking

Berdasarkan *benchmarking* yang telah dilakukan baik dari berbagai negara maupun K/L dalam negeri, berikut disajikan tabel ringkasan benchmarking program pemberdayaan perempuan rentan:

Tabel 2. Benchmarking Program Pemberdayaan Perempuan Rentan di Berbagai Negara

NEGARA	PROGRAM	MEKANISME	OUTPUT	CAPAIAN DAN OUTCOME
India	<i>Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission (DAY-</i>	- Membentuk dan memperkuat <i>Self Help Group (SHG)</i> (10 - 20 Perempuan). - Pengelompokan	- Pelatihan bidang kelembagaan, agar SHG dapat beroperasi secara mandiri - Pelatihan dan pengembangan	Sebanyak 10,05 <i>crore</i> (100.500.000) perempuan telah tergabung ke dalam SHG dan 90,86 <i>lakh</i> (9.086.000) SHG

NEGARA	PROGRAM	MEKANISME	OUTPUT	CAPAIAN DAN OUTCOME
	NRLM)	SHG ke dalam Federasi untuk memperoleh pelatihan dan konseling terkait manajemen keuangan dan mata pencaharian. Bantuan dana berupa <i>Revolving Fund, Community Investment Fund</i>, dan Subsidi bunga pada pinjaman bank.	keterampilan anggota SHG sesuai dengan sumber daya, keterampilan dan preferensi mereka (pelatihan beternak lebah, pemanfaatan e-commerce, pengemasan air sungai gangga, dll) Pelatihan terkait keuangan (menyusun rencana mikro kredit) untuk dapat mengakses pendanaan.	telah terbentuk. - Total sekitar Rs. 5,20 <i>lakh crore</i> (Rp. 9.880 Triliun) kredit bank yang telah diberikan ke SHG. - Lebih dari 1 <i>crore</i> (10 Juta) perempuan telah memiliki penghasilan lebih dari Rs 1 <i>Lakh</i> (Rp. 19.000.000) pertahun
	<i>Start-up Village Entrepreneurship Programme</i> (SVEP)	Pelatihan, bantuan keuangan, dan dukungan untuk masyarakat pedesaan khususnya kelompok	Menyediakan pelatihan kewirausahaan dalam manajemen bisnis dan pengembangan	Total sekitar 313 ribu usaha telah didukung oleh Program SVEP dengan total dana yang disalurkan

NEGARA	PROGRAM	MEKANISME	OUTPUT	CAPAIAN DAN OUTCOME
		rentan dan perempuan untuk membangun dan mengembangkan usaha di sektor non-pertanian hingga usaha tersebut stabil.	soft skill. • Dukungan pengembangan bisnis, pendampingan, keuangan, serta akses ke sistem perbankan untuk mengakses pembiayaan. • Memfasilitasi penggunaan TIK yang terintegrasi untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas serta layanan konsultasi usaha. • Pendampingan usaha yang telah dibentuk selama enam bulan pertama	56.113, 39 <i>lakh</i> (1,03 triliun rupiah).

NEGARA	PROGRAM	MEKANISME	OUTPUT	CAPAIAN DAN OUTCOME
	<i>Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)</i>	Pemberian pelatihan dan penempatan kerja yang dilakukan oleh <i>Skillng Agency</i> , lembaga pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah.	Mengadakan pelatihan keterampilan teknis di 82 sektor industri. 5 bidang pelatihan yang memiliki peminat paling banyak adalah pelatihan di bidang industri tekstil; IT; pakaian, produk rumah tangga, dan furnitur; ritel; pariwisata dan perhotelan.	- Telah melatih 996.999 peserta dan menempatkan 537.335 peserta (Data tahun 2015-2020). - Terjadi peningkatan pendapatan penerima manfaat dengan rata-rata pendapatan bulanan meningkat dua kali lipat setelah mengikuti program (Srinivas & Gangaiah, 2021).
	<i>Kudumbashree</i>	Untuk pemberantasan kemiskinan dan pemberdayaan negara bagian	Akses permodalan keuangan mikro dengan skema dana bergulir dan dana hibah	3.09 juta kelompok lingkungan (NHGs) yang beranggotakan lebih dari 46 juta

NEGARA	PROGRAM	MEKANISME	OUTPUT	CAPAIAN DAN OUTCOME
		Kerala. Awalnya berfokus pada pedesaan. • <i>Neighborhood Groups</i> (NHGs), <i>Area Development Societies</i> (ADSs), dan <i>Community Development Societies</i> (CDSs).	pendamping. • Pemberdayaan perempuan melalui pembelajaran mandiri gender.	perempuan. • 49.200 usaha mikro, 31.589 unit perorangan dan 17.611 usaha kelompok.
Nepal	<i>Employment Fund (EF)</i>	• <i>Path to Prosperity</i> yang berfokus untuk mempersiapkan diri dalam pasar tenaga kerja • <i>Micro Enterprise for Job Creation</i> untuk memberikan fasilitas target kelompok untuk mendirikan usaha	• Mengadakan pelatihan bagi 1.236 peserta dalam bidang-bidang seperti Teknisi Listrik Bangunan, Pembuatan Furnitur, Tukang Las Busur, Fasilitator Pengembangan Anak Usia Dini, Teknisi Perangkat	• Berhasil mendanai lebih dari 30 lembaga pelatihan dan penempatan kerja sektor swasta (T&Es) • Dalam delapan tahun (2007-2014), hampir 100.000 pemuda dari kelompok kurang

NEGARA	PROGRAM	MEKANISME	OUTPUT	CAPAIAN DAN OUTCOME
		sendiri dan menciptakan pekerjaan tambahan.	Keras Komputer Junior, Tukang Batu, dan Petugas Kesehatan Hewan Desa, dengan tingkat pekerjaan sebesar 86% • Berfokus pada pengembangan keterampilan usaha mikro di antara 224 peserta, yang menghasilkan tingkat ketenagakerjaan yang mengesankan sebesar 82% dalam bidang-bidang seperti Kelompok Penjahitan dan Garmen, Kelompok Perdagangan	beruntung, setengahnya perempuan, telah dilatih dalam lebih dari 80 jenis pekerjaan • Rata-rata tingkat ketenagakerjaan (enam bulan setelah pelatihan) berfluktuasi antara 68% hingga 90%. Sebanyak 71% lulusan masih bekerja tiga tahun setelah pelatihan. Secara keseluruhan, hingga akhir 2014 diperkirakan 75.000 lulusan telah mendapatkan

NEGARA	PROGRAM	MEKANISME	OUTPUT	CAPAIAN DAN OUTCOME
			Konstruksi, dan Kelompok Listrik dan Elektronik.	pekerjaan. Lebih dari setengah lulusan memilih untuk bekerja secara mandiri. Melalui pelatihan dan penempatan kerja, pendapatan lulusan rata-rata meningkat lebih dari tiga kali lipat
Brazil	<i>Mulheres Mil</i>	Memperluas pilihan pelatihan profesional bagi perempuan yang rentan secara sosial atau bagi mereka yang berada dalam garis kemiskinan.	Memberikan pelatihan profesional di berbagai bidang, contoh: <i>tourism & hospitality, industrial production, food production</i>	Berhasil melatih 6 juta pekerja di mana 65% peserta adalah wanita berkulit hitam.
China	<i>Rural Youth</i>	Pelatihan	Membangun sistem e-	470.000 pemuda ikut

NEGARA	PROGRAM	MEKANISME	OUTPUT	CAPAIAN DAN OUTCOME
	<i>Anchor</i>	keterampilan dan transformasi petani muda dengan pemanfaatan video pendek <i>e-commerce</i> dan siaran langsung.	<i>commerce</i> yang mengintegrasikan <i>cloud warehouse</i> (gudang <i>cloud</i>), platform distribusi serta logistik.	berpartisipasi pada tingkat <i>grassroot</i>. Pemuda yang berpartisipasi telah berkontribusi pada pendidikan pedesaan, pertanian dan kesehatan. Kabupaten Rongjiang dalam tiga tahun terakhir telah melatih 34.000 pemuda, 10.000 talenta media baru sebagai juru bicara desa, 2.200 tim pemasaran siaran langsung dan mendorong lebih dari 14.000 orang dalam meningkatkan lapangan pekerjaan

NEGARA	PROGRAM	MEKANISME	OUTPUT	CAPAIAN DAN OUTCOME
				dan pendapatan. Desa Guizhou sejak tahun 2023 telah menjual produk pertanian sejumlah 47,47 juta yuan (Rp. 106,8 miliar)

Hasil *benchmarking* dari berbagai negara menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan kelompok rentan pada umumnya mengedepankan pendekatan yang komprehensif, mencakup pelatihan keterampilan, dukungan akses permodalan, serta penguatan kelembagaan lokal. Di **India**, misalnya, pemerintah bersama lembaga pihak ketiga melaksanakan berbagai skema pemberdayaan seperti *Self Help Group*, program pelatihan kewirausahaan, serta pelatihan dan penempatan kerja. Hal ini terbukti berhasil menjangkau jutaan perempuan, sekaligus mendorong terbentuknya jaringan usaha mikro berbasis komunitas. Satu hal yang cukup menarik dari India adalah adanya bantuan dana berupa *Revolving Fund* atau dana bergulir, di mana hal ini dapat meningkatkan tanggungjawab serta kemandirian kelompok sasaran karena dana yang telah diberikan harus dikembalikan untuk digunakan oleh kelompok lainnya.

Nepal dan **Brazil** lebih menekankan penyediaan pelatihan vokasional dan peningkatan kapasitas usaha mikro yang disesuaikan dengan preferensi tiap kelompok sasaran. Hal ini tidak hanya memperkuat keterampilan teknis tetapi juga membuka peluang perluasan akses pasar dan peningkatan pendapatan. Di sisi lain, **Malaysia** dan **China** memilih untuk menargetkan komunitas-komunitas spesifik, seperti nelayan dan petani muda, melalui program *e-commerce* dan pelatihan tematik yang terintegrasi dengan teknologi digital, sehingga kelompok sasaran dapat beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi dan dinamika pasar global. Jika ditarik secara keseluruhan, kombinasi antara pelatihan praktis, pendampingan usaha berkelanjutan, serta integrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi perempuan dan kelompok rentan di berbagai negara, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi perumusan kebijakan serupa di Indonesia.

Tabel 3. Benchmarking Program Kementerian/Lembaga Terpilih di Indonesia

Kementerian/ Lembaga	Program	Mekanisme	Kelebihan	Kekurangan
Kementerian PPN/Bappenas	MAMPU	Bertujuan untuk meningkatkan akses dan penghidupan perempuan miskin di Indonesia melalui	- Menggunakan pendekatan berbasis kemitraan yang bersifat kolaboratif - Program langsung	MAMPU bekerja melalui mitra organisasi, jadi tidak langsung menjangkau

Kementerian/ Lembaga	Program	Mekanisme	Kelebihan	Kekurangan
		pembangunan jejaring dan koalisi inklusif organisasi perempuan dan peduli gender serta melakukan advokasi untuk meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan penting. MAMPU bekerja melalui pemberian dukungan kepada mitra-mitranya, bukan secara langsung menyukseskan atau bekerja langsung dengan perempuan miskin.	berfokus pada mendorong perubahan kebijakan • Perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi rutin selalu berbasis bukti dan analisis. • Program berhasil menyukseskan berbagai daerah di berbagai wilayah Indonesia, tidak terkonsentrasi di wilayah maju saja	perempuan miskin • Kompleksitas koordinasi multi-stakeholder karena program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sektor publik hingga NGO. • MAMPU hanya berperan sebagai fasilitator, bukan penyedia wadah secara langsung.
	INKLUSI	Program Pemerintah Indonesia melalui	• Program ambisius dan inovatif,	• Desain program yang kompleks

Kementerian/ Lembaga	Program	Mekanisme	Kelebihan	Kekurangan
		Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama dengan Australia. Prioritas program (Bekerjasama dengan mitra pelaksana) terkait Ketahanan Ekonomi dan Penghidupan yang Lebih Baik mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan dan penyandang disabilitas melalui Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, Pembentukan koperasi dan akses permodalan, Pendampingan usaha dan pemasaran	melibatkan lebih dari 100 mitra untuk menangani isu identitas dan inklusi, khususnya bagi kelompok terpinggirkan. • Pendekatannya mendorong kepemimpinan lokal, kolaborasi antar organisasi, dan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.	menyulitkan pemahaman dan fokus strategis. • Cakupannya luas karena menyentuh isu nasional. • Pemberdayaan lokal yang kuat juga berisiko menimbulkan tidak adanya fokus strategis. • Program cenderung berupa skema hibah.

Kementerian/ Lembaga	Program	Mekanisme	Kelebihan	Kekurangan
		produk, Kolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan BLK, Fasilitas kerja, magang, dan legalitas usaha.		
Kementerian Sosial	PENA	Kegiatan membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpicil, dan/atau korban bencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan KPM untuk kesejahteraan keluarga; dan	• Pelaporan pemantauan pada aplikasi SIGMA dapat mengetahui kemandirian PM sebagai bahan pertimbangan graduasi mandiri atau dikeluarkan dari kepesertaan bansos. • PM PENA reguler dapat bantuan sosial selama 1 tahun pemantauan	• Ketidaksesuaian data dengan fakta di lapangan. • Perlu waktu bagi pendamping untuk pengenalan wilayah dan menilai kondisi asli KPM. • Pelatihan melalui zoom menghambat penyampaian materi kepada PM.

Kementerian/ Lembaga	Program	Mekanisme	Kelebihan	Kekurangan
		meningkatkan kemampuan sosial ekonomi KPM secara Berdikari. Bentuk program PENA meliputi bantuan usaha; pelatihan; dan pendampingan. Mekanisme program meliputi Asesmen - Penyusunan proposal - penetapan - pelaksanaan - pemantauan dan evaluasi.	sehingga tidak dikeluarkan tanpa kemandirian PM.	
	UEP	Bantuan yang diberikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada kelompok usaha bersama (KUBE), yang	• Meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi	• Proses pencairan dana yang terkesan birokratis dan melibatkan banyak instansi sehingga prosesnya

Kementerian/ Lembaga	Program	Mekanisme	Kelebihan	Kekurangan
		berisikan 5 sampai 20 kepala keluarga yang terdaftar di DTKS dan memiliki minat atau kemampuan untuk berusaha.	kegiatan usaha serta memperkuat kesetiakawanan sosial antar warga miskin dan masyarakat • Tingkat efektivitas pelaksanaan program berjalan cukup berhasil dan berdampak positif pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin setelah pelaksanaan program bantuan sosial.	memerlukan waktu yang relatif lama • Jumlah dana bantuan yang diberikan masih dirasa kurang oleh beberapa kelompok KUBE • Kesulitan mengatur anggota, pembagian hasil yang tidak adil, biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan hasil usaha dan tidak semua anggota memiliki minat terhadap UEP yang dikelola.
Kementerian	P2WKSS	Program	• Program bersifat	• Memerlukan sistem

Kementerian/ Lembaga	Program	Mekanisme	Kelebihan	Kekurangan
PPPA		pemberdayaan wanita lintas sektor dan lintas aktor untuk keluarga miskin dengan wanita sebagai penggerak utamanya. Program ini secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu program dasar (pendidikan dan kesehatan) dan program lanjutan (pendampingan dan pelayanan usaha)	multidimensi artinya tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan ekonomi keluarga tetapi juga peningkatan kualitas hidup lain • Terbuka untuk semua wanita dari berbagai kelompok usia karena tidak ada ketentuan untuk usia tertentu • Fleksibel menyesuaikan dengan potensi di daerah tempat tinggal kelompok sasaran • Terkait pelayanan usaha, program bantuan permodalan tidak hanya dana bergulir tetapi juga	pengawasan dan evaluasi yang ketat karena pelaksanaan program melibatkan daerah • Pada beberapa daerah, program dinilai terlalu kompleks bagi masyarakat desa sehingga kurang memahami. Ini juga karena rendahnya sosialisasi pada program ini.

Kementerian/ Lembaga	Program	Mekanisme	Kelebihan	Kekurangan
Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	PNPM Mandiri	Program pengentasan kemiskinan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui harmonisasi, pengembangan sistem, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong kemandirian dan inovasi masyarakat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.	bentuk peralatan • Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama kelompok miskin dan marginal. • Transparan dan akuntabel dalam perencanaan dan pelaksanaan. • Mendorong inovasi lokal, penguatan kapasitas masyarakat, dan sinergi antar pihak. • Menurunkan kemiskinan hingga 7,35% (studi IFLS). • Berdampak positif pada pembangunan infrastruktur, ekonomi,	• Dana bergulir kurang optimal akibat lemahnya pengawasan dan banyaknya tunggakan pinjaman. • Tidak semua program sesuai dengan kebutuhan lokal (contoh: Teluk Bakau). • Belum sepenuhnya mencapai kemandirian masyarakat. • Peran perempuan dalam partisipasi masih lebih rendah dibanding laki-laki.

Kementerian/ Lembaga	Program	Mekanisme	Kelebihan	Kekurangan
			sosial, dan lingkungan. • terbukti efektif di beberapa studi kasus seperti Cilandak, Balige, dan Demini.	

Hasil *benchmarking* dari berbagai program yang telah dilakukan dan/atau masih dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait di Indonesia, menunjukkan bahwa program-program yang ada mengedepankan pada pembangunan jejaring, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, akses permodalan, serta pendampingan. Di Kementerian Bappenas/PPN, misalnya, pemerintah bekerja sama dengan lembaga mitra untuk dapat menasar langsung perempuan miskin secara menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia untuk melakukan pembangunan berbasis kebutuhan kelompok. Kementerian Sosial memiliki aplikasi SIGMA sebagai wadah untuk pelaporan dan pemantauan untuk dapat mengetahui kemandirian penerima manfaat yang sudah diberikan bantuan usaha, pelatihan dan pendampingan, sebagai bahan graduasi mandiri atau dikeluarkan dari kepesertaan bantuan sosial.

Kementerian PPPA memiliki program multidimensi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, tetapi juga peningkatan kualitas hidup melalui program bantuan permodalan, tidak hanya berbentuk dana bergulir tetapi juga dalam bentuk peralatan. Kemenko Kesejahteraan Rakyat (saat ini menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) melalui PNPM Mandiri memiliki program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang sukses menurunkan kemiskinan hingga 7,35% dengan mekanisme pendanaan dana bergulir.

B. Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan dan penempatan perempuan rentan miskin (desil 1). Hasil analisis SWOT secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Analisis SWOT

STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITY	THREAT
❖ Terdapat lembaga atau aktor yang berperan aktif	❖ Terdapat beberapa kelemahan	❖ Tersedia peluang besar bagi perempuan untuk	❖ Dihadapkan pada tantangan fluktuasi

STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITY	THREAT
dalam pelaksanaan pemberdayaan dan penempatan perempuan rentan dengan kondisi kemiskinan. ❖ Didukung oleh regulasi yang mendorong pelaksanaan program pemberdayaan dan penempatan perempuan rentan dengan kondisi kemiskinan. ❖ Tersedia infrastruktur serta berbagai program pemberdayaan dan penempatan yang mendukung peningkatan kemandirian perempuan.	lembaga/aktor meliputi: - Lemahnya koordinasi lintas sektor yang menangani perempuan rentan dengan kondisi kemiskinan. - Minimnya integrasi data antar-institusi yang berkaitan dengan pemberdayaan dan penempatan perempuan rentan dengan kondisi kemiskinan. - Rendahnya kapasitas SDM dalam penyelenggaraan layanan pemberdayaan dan penempatan secara inklusif. ❖ Minimnya tingkat pendidikan dan literasi perempuan rentan	bekerja di sektor informal yang memiliki permintaan tenaga kerja tinggi. ❖ Tersedianya program prioritas nasional yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. ❖ Terdapat potensi kemitraan strategis dengan sektor swasta melalui program <i>corporate social responsibility</i> (CSR) guna mendukung pemberdayaan perempuan rentan.	ekonomi nasional dan keterbatasan pendanaan pemerintah berpotensi mengancam keberlanjutan program pemberdayaan dan penempatan. ❖ Perubahan kebijakan dan dinamika politik, termasuk restrukturisasi kelembagaan, berpotensi mengganggu kesinambungan dan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan dan penempatan. ❖ Persaingan pasar kerja yang semakin ketat menempatkan perempuan rentan

STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITY	THREAT
	dengan kondisi kemiskinan. ❖ <i>Mismatch</i> kompetensi dengan penempatan kerja ❖ <i>Mismatch</i> program pemberdayaan dengan minat maupun SDM/lingkungan lokal. ❖ Keterbatasan akses program ke seluruh pelosok Indonesia. ❖ Keterbatasan mobilitas sosial dan budaya patriarkal.		dengan kondisi kemiskinan pada posisi tawar rendah.

1. Kekuatan

a. Regulasi Pendukung

Upaya pemberdayaan dan penempatan perempuan rentan dengan kondisi kemiskinan, di Indonesia didukung oleh berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program di tingkat nasional maupun daerah. Kerangka regulasi ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, peningkatan akses terhadap pekerjaan layak, serta pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Regulasi-regulasi tersebut membentuk ekosistem kebijakan yang terintegrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemberdayaan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan ekonomi perempuan. Adapun regulasi yang relevan antara lain sebagai berikut:

- 1) **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**, yang menjamin kesetaraan hak setiap warga negara, termasuk perempuan, untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- 2) **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, yang mengatur prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan kerja bagi semua tenaga kerja, termasuk kelompok perempuan.
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja**, yang mendorong terciptanya lapangan kerja baru melalui pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) **Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)**, yang menjadi payung kebijakan integrasi isu kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan dalam pembangunan nasional.

- 5) **Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri**, sebagai acuan dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja yang adil dan inklusif.
- 6) **Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, yang memperkuat peran daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan.
- 7) **Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019** tentang perubahan atas **Permensos Nomor 5 Tahun 2019** mengenai Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai basis data nasional penerima manfaat program sosial.
- 8) **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa**, yang menekankan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan kelompok rentan di desa.
- 9) **Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIAPKerja)**, yang mendukung transformasi digital dalam pelayanan dan penempatan tenaga kerja.
- 10) **Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)**, yang berfokus pada peningkatan kemandirian ekonomi keluarga miskin dan rentan.
- 11) **Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk**

- Penanganan Fakir Miskin**, sebagai upaya penguatan ekonomi produktif masyarakat miskin.
- 12) **Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025**, yang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal dan perempuan dengan penggunaan dana desa.
 - 13) **Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (*Mock Up*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**, yang mendorong penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat di level desa melalui dana bergulir.
 - 14) **Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih**, yang bertujuan memperluas akses pembiayaan dan peluang ekonomi berbasis koperasi di tingkat desa melalui Koperasi desa/kelurahan Merah Putih.

Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan dan penempatan perempuan rentan miskin tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem kebijakan yang saling berkaitan antara aspek ketenagakerjaan, sosial, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan implementasi yang konsisten, diharapkan program-program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan inklusif.

- b. Ketersediaan Infrastruktur dan Program Pemberdayaan dan Penempatan

Upaya pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses kerja bagi perempuan rentan dengan kondisi kemiskinan telah

didukung oleh berbagai infrastruktur kelembagaan serta program lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah Indonesia secara konsisten membangun ekosistem pemberdayaan melalui penyediaan layanan pelatihan, penempatan tenaga kerja, fasilitasi kewirausahaan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal. Kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan komitmen untuk memperluas kesempatan kerja yang inklusif dan berkeadilan gender. Berbagai kementerian dan lembaga memiliki peran strategis dalam menyediakan program pemberdayaan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja, antara lain sebagai berikut:

1) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

Melalui berbagai program seperti SIAPKerja, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja (BBPKK), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan Padat Karya, Kemnaker berfokus pada peningkatan kompetensi, produktivitas, serta penempatan tenaga kerja, termasuk bagi perempuan rentan dan masyarakat miskin. Program ini juga didukung oleh infrastruktur digital melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang memfasilitasi akses layanan karir dan pelatihan secara terpadu.

2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas

Melalui program INKLUSI, Bappenas memperkuat koordinasi antar lembaga dan mendorong integrasi kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesetaraan gender, inklusivitas sosial, dan pengentasan kemiskinan.

3) Kementerian Sosial (Kemensos)

Melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kemensos berfokus pada pemberdayaan

sosial-ekonomi masyarakat miskin dan rentan agar mampu mandiri secara ekonomi. Program ini juga menjadi bagian dari strategi keberlanjutan pengentasan kemiskinan berbasis keluarga.

4) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemenDes PDTT)

Melalui Dana Desa, kementerian ini mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi desa, termasuk pengembangan usaha perempuan, pelatihan keterampilan, serta perluasan lapangan kerja berbasis potensi lokal.

5) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Melalui inisiatif Ruang Bersama Indonesia, kementerian ini menyediakan wadah kolaboratif untuk memperkuat jejaring pemberdayaan perempuan, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, serta mendukung pemulihan ekonomi perempuan pasca-pandemi.

6) Kementerian Koperasi (KemenKop)

Melalui program Koperasi Merah Putih dan dukungan terhadap pembentukan koperasi desa/kelurahan, KemenKop memperluas akses pembiayaan dan memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis komunitas sebagai fondasi kemandirian perempuan pelaku usaha mikro.

7) Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KemenUMKM)

Melalui program LAKSMI (Layanan Akses Keuangan Syariah bagi Mikro Indonesia) dan Kartu Usaha Afirmatif, pemerintah memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha

mikro, termasuk perempuan rentan dan pelaku UMKM di wilayah perdesaan.

Secara keseluruhan, keberadaan infrastruktur dan program lintas kementerian ini menunjukkan upaya pemerintah dalam membangun sistem pemberdayaan yang komprehensif mulai dari peningkatan keterampilan, penempatan kerja, hingga akses permodalan dan penguatan kelembagaan ekonomi. Meski demikian, tantangan masih muncul dalam aspek koordinasi, sinkronisasi data, dan penyelarasan sasaran program agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata hingga ke wilayah terpencil.

2. Kelemahan

a. Belum Optimalnya Peran Lembaga/Aktor

Meskipun telah tersedia berbagai lembaga dan program yang mendukung pemberdayaan serta penempatan tenaga kerja perempuan rentan, masih terdapat sejumlah kelemahan kelembagaan yang menghambat efektivitas implementasi di lapangan. Beberapa tantangan utama mencakup aspek koordinasi lintas sektor, integrasi data, dan kapasitas sumber daya manusia.

Pertama, lemahnya koordinasi lintas sektor antara kementerian dan lembaga pemerintah menjadi hambatan struktural utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan serta penempatan tenaga kerja perempuan rentan di Indonesia. Beragam inisiatif pemerintah yang memiliki tujuan serupa seperti penghapusan kemiskinan, peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, dan pengembangan keterampilan kerja sering kali dijalankan secara terpisah dan saling tumpang tindih, tanpa adanya mekanisme kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi dan efektif.

Kedua, kurangnya integrasi dan ketersediaan data antar-institusi menjadi kelemahan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan publik. Ketidakterpaduan sistem data menimbulkan tumpang tindih program, inefisiensi sumber daya, serta menghambat pengambilan keputusan berbasis bukti. Akibatnya, kebijakan sering bersifat sektoral dan kurang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Ketiga, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang inklusif menyebabkan keterbatasan pemahaman dan keterampilan dalam menangani keberagaman kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik yang berkeadilan dan belum sepenuhnya responsif terhadap prinsip kesetaraan dan inklusivitas.

b. **Minimnya Tingkat Pendidikan dan Literasi Perempuan Rentan dengan Kondisi Kemiskinan**

Kemiskinan dikaitkan dengan berbagai konsekuensi negatif, antara lain kualitas kesehatan yang rendah, tingkat pendidikan dan keterampilan yang minim, keterbatasan kemampuan atau motivasi untuk bekerja, tingginya prevalensi perilaku yang merugikan atau tidak tertib, serta kondisi keterpurukan ekonomi yang berkepanjangan (Firmansyah, Suherman, Akmal, Anisa, & Sihalohe, 2023)

c. ***Mismatch* antara Kompetensi dengan Penempatan Kerja**

ILO menemukan bahwa hanya 59% lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat UPTD dan UPTP, yang kini telah bertransformasi menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), dapat diserap oleh industri pada tahun 2022 akibat adanya ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, reorientasi Program

Pengembangan Pelatihan Vokasi Nasional sangat mendesak dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan kompeten sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja (Farizal & Habibi, 2024)

- d. *Mismatch* Program pemberdayaan dengan minat maupun potensi SDM/lingkungan lokal

Ketidaksesuaian (*mismatch*) antara program pemberdayaan dengan minat, potensi sumber daya manusia, maupun kondisi lingkungan lokal menyebabkan rendahnya partisipasi dan keberlanjutan program. Program yang tidak berbasis pada kebutuhan dan potensi daerah seringkali kurang efektif dalam meningkatkan keterampilan, pendapatan, serta kemandirian masyarakat sasaran.

- e. Keterbatasan akses program ke seluruh pelosok Indonesia

Keterbatasan ini menjadi kelemahan dalam pemerataan manfaat pembangunan. Kondisi geografis, infrastruktur yang belum memadai, serta disparitas kapasitas kelembagaan di daerah menyebabkan sebagian wilayah, terutama terpencil dan tertinggal, sulit menjangkau layanan dan program pemberdayaan secara optimal.

- f. Keterbatasan mobilitas sosial dan budaya patriarki

Keterbatasan mobilitas sosial dan kuatnya budaya patriarki menjadi faktor yang membatasi partisipasi perempuan, khususnya yang berada dalam kondisi kemiskinan, dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Norma gender tradisional sering menempatkan perempuan pada peran domestik, sehingga menghambat akses mereka terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang kerja yang lebih baik.

3. Kesempatan

a. Terdapat Kebutuhan Tenaga Kerja di Sektor Informal yang Tinggi bagi Perempuan

Menurut data BPS tahun 2023, sebanyak 64,25 persen perempuan tercatat bekerja di sektor informal, sedangkan laki-laki sebesar 55,81 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan mendominasi pekerjaan informal dan sekaligus lebih rentan terhadap berbagai bentuk kerentanan struktural dalam pasar kerja (Simanjuntak, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sektor informal memiliki peranan penting dalam penyediaan lapangan kerja bagi perempuan. (Simanjuntak, 2025).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi lapangan kerja informal menurut jenis kelamin pada 2020-2023 menunjukkan perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal dibandingkan laki-laki. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2024 yang diterbitkan oleh BPS, sektor informal di Indonesia masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dibandingkan sektor formal. Selain itu, selama periode 2020 hingga 2023, jumlah pekerja yang terlibat di sektor informal menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal meningkat dari 77,68 juta orang (2020) menjadi 82,67 juta orang (2023). Peningkatan juga terus terjadi hingga Februari 2024 yaitu sebesar 84,13 juta orang. (Badan Pusat Statistik, 2024)

b. Terdapat Program Prioritas Nasional untuk Pengentasan Kemiskinan

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan serta memberikan efek lanjutan yang signifikan.

Perempuan yang berdaya telah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga (Rohmatilah, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menginstruksikan Menteri Koordinator, Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, serta Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah strategis sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan bersifat tepat sasaran, terintegrasi, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

c. Terdapat Peluang Kemitraan dengan Sektor Swasta/NGO dan CSR

Peluang kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah (NGO) terus berkembang melalui berbagai inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan. Beberapa contoh program kemitraan yang relevan antara lain:

- 1) PT Bank DBS Indonesia melalui *DBS Foundation* bekerja sama dengan *The Asia Foundation* dalam Program “SHE CAN: Akselerasi Inklusi Keuangan bagi Perempuan Rentan di Provinsi Kalimantan Barat” yang menargetkan peningkatan literasi keuangan, digitalisasi bisnis, pemasaran digital, dan akses ke layanan keuangan bagi 80.000 perempuan rentan pada periode 2024–2027.
- 2) Unilever Indonesia melalui Program *SheAblepreneur* melaksanakan pelatihan kewirausahaan, penguatan kapasitas pemasaran digital, serta memberikan akses ke

rantai pasok dan inkubasi usaha inklusif bagi perempuan dan penyandang disabilitas.

- 3) Yayasan Astra menjalankan program pendampingan UMKM perempuan yang berfokus pada peningkatan kapasitas manajerial dan pengembangan usaha mikro berbasis komunitas.
- 4) BCA Syariah mengimplementasikan program literasi dan inklusi keuangan syariah bagi perempuan, guna memperkuat akses perempuan terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah.
- 5) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui Program Mandiri Sahabat Desa berupaya meningkatkan potensi ekonomi desa berbasis kerakyatan dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
- 6) UN Women melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (WeLearn dan TogetHER Digital) memberikan dukungan akses terhadap pelatihan keterampilan, sumber daya, serta lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi.

4. Ancaman

a. Tantangan keberlanjutan program

Kondisi perekonomian nasional yang fluktuatif menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, ruang fiskal pemerintah untuk mendanai program sosial dan ketenagakerjaan menjadi terbatas, sehingga menghambat kontinuitas dan efektivitas implementasi program di lapangan. Situasi ini diperburuk oleh ketergantungan sebagian besar program terhadap sumber pendanaan pemerintah pusat dan lemahnya diversifikasi

pembiayaan alternatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta atau mekanisme pendanaan berkelanjutan.

- b. Risiko perubahan kebijakan dan dinamika politik, termasuk aspek kelembagaan

Hal ini merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi kesinambungan serta efektivitas implementasi program pembangunan dan pemberdayaan. Pergantian pemerintahan atau perubahan prioritas politik sering kali diikuti oleh penyesuaian arah kebijakan, struktur kelembagaan, dan tata kelola program, yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan di lapangan. Kondisi ini dapat menyebabkan disrupsi terhadap mekanisme koordinasi antarinstansi, pergantian personel kunci, dan ketidakpastian pendanaan, sehingga menghambat pencapaian tujuan jangka panjang program.

- c. Persaingan Pasar Kerja

Pada konteks pasar kerja yang semakin kompetitif, perempuan dengan kondisi sosial ekonomi rentan sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, serta minimnya pengalaman kerja menyebabkan mereka memiliki daya saing dan posisi tawar yang rendah di dunia kerja. Kondisi ini memperkuat segmentasi pasar tenaga kerja, di mana perempuan miskin cenderung terperangkap dalam pekerjaan informal, upah rendah, dan tanpa perlindungan sosial yang memadai.

Tabel 5. Identifikasi Hasil Analisis SWOT

No	Identifikasi	Pemberdayaan	Penempatan
1	Regulasi	Lakukan identifikasi terhadap seluruh regulasi yang sudah ada, kemudian sinkronkan ke dalam desain program melalui penyusunan petunjuk teknis lintas sektor untuk memudahkan penerapan oleh berbagai pemangku kepentingan, lanjutkan dengan pengembangan regulasi turunan yang relevan, tetapkan hasilnya sebagai indikator kinerja, sosialisasikan secara luas kepada seluruh pihak terkait, dan akhiri dengan pelaksanaan mekanisme pengawasan serta monitoring berbasis regulasi guna menjamin efektivitas dan keberlanjutan program.	
2	Kelembagaan dan Kemitraan	Libatkan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK), dinas tenaga kerja di tingkat provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa, serta LSM atau NGO Internasional/ nasional/lokal, dengan mengintegrasikan berbagai program pemerintah yang telah ada untuk bersama-sama mengembangkan keterampilan dasar dan mengoptimalkan usaha mikro berbasis rumah tangga yang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.	Bangun kolaborasi strategis dengan BUMN, sektor swasta, dan perguruan tinggi vokasi untuk menyelenggarakan program pelatihan kejuruan, inkubasi usaha, serta pemagangan berbasis industri yang terarah, sehingga peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis sesuai kebutuhan dunia kerja, tetapi juga mendapatkan kesempatan pendampingan, akses jejaring, dan peluang penempatan kerja atau wirausaha yang berkelanjutan.

No	Identifikasi	Pemberdayaan	Penempatan
3	Relevansi dan Responsivitas Program	Rancang program pemberdayaan yang sederhana dan mudah diterapkan, berbasis pada potensi lokal masyarakat, tanpa menuntut tingkat literasi yang tinggi misalnya melalui kegiatan pembuatan kerajinan tangan, pengolahan kuliner rumah, atau pengembangan pertanian keluarga sehingga dapat diikuti oleh perempuan di berbagai tingkat pendidikan dan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi rumah tangga.	Program pemberdayaan/penempatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan aktual industri dan perkembangan tren digital, agar peserta tidak hanya memiliki keterampilan yang relevan dengan permintaan pasar kerja, tetapi juga mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi, digitalisasi proses produksi, dan peluang ekonomi digital yang terus berkembang.
4	Koordinasi Lintas Sektor	Fokuskan upaya pada penguatan koordinasi antara program pemerintah pusat dan daerah melibatkan Bappenas, Kemnaker, Kemensos, KemenKop, KemenUMKM, KemenPPPA, Kemendesa PDTT, serta pemerintah daerah terkait agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih, dapat saling melengkapi, dan mampu menjangkau	Perkuat sinergi antara instansi teknis, dunia industri, dan startup digital agar proses pelatihan, penempatan kerja, serta pemantauan hasilnya dapat berjalan secara terintegrasi, terhubung dalam satu sistem informasi yang transparan, dan mampu memastikan peserta memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta peluang kerja yang berkelanjutan.

No	Identifikasi	Pemberdayaan	Penempatan
		secara langsung perempuan rentan miskin di wilayah pelosok yang selama ini sulit terakses oleh intervensi kebijakan.	
5	Tantangan Pasar Kerja	Perempuan rentan miskin umumnya memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah, sehingga perlu didorong melalui program pemberdayaan yang berorientasi pada wirausaha mikro, kegiatan padat karya, atau kerja rumahan yang bersifat fleksibel dan mudah diakses, agar mereka dapat meningkatkan pendapatan tanpa harus meninggalkan tanggung jawab domestik maupun keluarga.	Perempuan dengan pendidikan minimal SMA memiliki potensi untuk bersaing di sektor formal, sehingga perlu difasilitasi melalui perluasan akses terhadap informasi lowongan kerja, program sertifikasi kompetensi, serta pendampingan karier (<i>career coaching</i>) agar mereka dapat meningkatkan daya saing dan memperoleh pekerjaan yang layak serta berkelanjutan.

No	Identifikasi	Pemberdayaan	Penempatan
6	Aksesibilitas Program	Gunakan pendekatan yang sederhana dan mudah dijangkau masyarakat, seperti penyelenggaraan pelatihan secara offline di tingkat desa, pemanfaatan media komunikasi lokal seperti radio komunitas dan grup WhatsApp, serta pelibatan BPVP keiling untuk menjangkau wilayah terpencil, sehingga informasi dan pelatihan dapat diakses langsung oleh perempuan rentan tanpa hambatan teknologi maupun jarak.	Intervensi dapat dilakukan melalui pendekatan hybrid atau <i>digital training</i> , dengan menyediakan pelatihan online berbasis modul, webinar kewirausahaan skala menengah, serta coaching UMKM yang melibatkan mentor dari kalangan industri, agar peserta memperoleh pembelajaran yang fleksibel, relevan dengan kebutuhan pasar, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas kewirausahaan secara berkelanjutan.
7	Kondisi Awal target program	• Literasi baca-tulis yang terbatas, sehingga diperlukan metode pelatihan yang lebih praktis dan menggunakan media visual atau audio agar mudah dipahami. • Akses mobilitas dan informasi yang rendah, yang membatasi partisipasi perempuan dalam pelatihan maupun kegiatan ekonomi di luar rumah.	• Lebih siap dari sisi literasi dan mobilitas, sehingga mampu mengikuti berbagai bentuk pelatihan dan adaptif terhadap perubahan. • Memiliki potensi untuk mengikuti pelatihan lanjutan dan penempatan kerja formal, sesuai dengan kebutuhan industri dan peluang pasar tenaga kerja.

No	Identifikasi	Pemberdayaan	Penempatan
8	Resiko Keberlanjutan Program	• Ketergantungan yang tinggi pada program pemerintah, sehingga inisiatif mandiri masyarakat masih rendah. • Minimnya pendampingan setelah program berakhir, menyebabkan hasil pemberdayaan sulit berkelanjutan. • Ketiadaan mekanisme <i>scaling-up</i>, di mana program belum memiliki sistem untuk memperluas jangkauan dan memperbesar dampak keberhasilannya.	• Belum adanya mekanisme penempatan kerja yang berkelanjutan, sehingga peserta sulit memperoleh pekerjaan tetap setelah pelatihan. • Pendampingan pasca penempatan masih lemah, menyebabkan peserta tidak mendapatkan dukungan adaptasi dan pengembangan karier di tempat kerja. • Daya serap tenaga kerja pasca pelatihan masih rendah, karena keterampilan peserta belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri. • Belum tersedia skema keberlanjutan atau replikasi program, sehingga keberhasilan di satu wilayah belum dapat diperluas ke daerah lain. • Tidak adanya insentif bagi dunia usaha untuk merekrut peserta program, membuat keterlibatan sektor swasta dalam penyerapan tenaga kerja masih terbatas.

No	Identifikasi	Pemberdayaan	Penempatan
9	Faktor Budaya	Tingginya norma patriarki di sebagian wilayah menuntut strategi pemberdayaan yang sensitif terhadap budaya, dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta laki-laki dalam rumah tangga sebagai mitra perubahan, agar tercipta dukungan sosial yang memungkinkan perempuan memperoleh izin dan kesempatan untuk keluar rumah, mengikuti pelatihan, atau bekerja tanpa menimbulkan resistensi sosial di lingkungan sekitar.	

C. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil *benchmarking* dan analisis SWOT yang sudah dilakukan sebelumnya, maka diajukan beberapa alternatif program pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja perempuan rentan dalam kondisi kemiskinan. Beberapa alternatif tersebut dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini, dimana masing-masing alternatif dianalisis menggunakan *framework* SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*) menurut George Doran (1981). Ayoub (2017) berpendapat bahwa melalui aspek *Specific* dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai dari alternatif kebijakan terkait. Sehingga pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama atas tujuan yang ingin dicapai.

Sebuah alternatif harus mencakup kriteria-kriteria yang dapat diukur untuk mengetahui sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Selain itu, alternatif yang diusulkan juga harus bersifat realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang dimiliki. Dalam penetapannya, suatu alternatif kebijakan perlu sejalan dengan visi dan misi organisasi. Memperhatikan kesesuaian dengan ruang lingkup dan tujuan organisasi. Mekanisme pelaksanaan alternatif kebijakan tersebut didasarkan pada jangka waktu yang telah ditetapkan dan dapat diimplementasikan secara terstruktur serta mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penggunaan metode SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dalam menganalisis alternatif model pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja perempuan rentan miskin dipilih karena kerangka ini memberikan pendekatan yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil. SMART memungkinkan setiap alternatif kebijakan dianalisis berdasarkan lima aspek kunci yang saling melengkapi dan mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

Kerangka SMART membantu merumuskan tujuan kebijakan secara spesifik dan terfokus, sehingga para pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terhadap arah dan sasaran program. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadinya multi interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan. Metode SMART dipilih karena memberikan kerangka kerja analisis yang terintegrasi, mampu meningkatkan keterpaduan antara perencanaan dan implementasi, serta membantu mengidentifikasi alternatif kebijakan yang paling rasional, efektif, dan selaras dengan tujuan model pemberdayaan perempuan miskin.

Tabel 6. Alternatif Kebijakan

Program	Specific	Measurable	Achievable	Rational	Time Bound	Adopsi
Perempuan Rentan Bekerja (Perenta)	- Menyediakan program yang fleksibel berbasis pada pemberdayaan dan penempatan. - Menyediakan pelatihan dan dukungan ekosistem bagi perempuan rentan miskin yang ingin berwirausaha atau bekerja. - Kriteria Peserta: - Perempuan - Berusia 31–59 tahun - Mengalami kerentanan ekonomi	- Jumlah peserta perempuan yang mengikuti pelatihan - Persentase peserta yang berhasil ditempatkan atau membuka usaha - Jumlah pendapatan rata-rata peserta setelah bekerja/berwirausaha	- Pelatihan wirausaha berbasis potensi kewilayahan. - Pelatihan vokasi berbasis potensi, minat, dan bakat peserta, serta kebutuhan industri, dan dapat memanfaatkan platform SIAPKerja serta membangun jejaring dengan industri. - Penyediaan ekosistem wirausaha termasuk pendampingan, dan akses permodalan.	- Menjawab tantangan kemiskinan perempuan - Mengintegrasikan pelatihan, pendampingan, dan akses modal	- Pelatihan berlangsung 3–6 bulan - Pendampingan usaha selama 1 tahun - Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan sekali	- Program <i>Employment Fund</i> – Nepal. - Program <i>National Rural Livelihood Missions</i> (NRLM) – India. - Program <i>Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana</i> (DDU-GKY) – India.

Program	Specific	Measurable	Achievable	Rational	Time Bound	Adopsi
			• Penyediaan akses penempatan peserta pelatihan vokasi ke industri.			
Program Rise & Shine	• Menyediakan program pelatihan dan dukungan ekosistem agar dapat masuk ke pasar digital. • Kriteria Peserta: - Perempuan - Berusia 31 – 59 tahun - Mengalami kerentanan ekonomi	• Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan • Persentase peserta yang mulai berkariir di platform digital • Jumlah pendapatan rata-rata peserta setelah program	• Pelatihan berbasis pasar digitalisasi dengan memanfaatkan platform digital. • Penyediaan ekosistem untuk masuk ke pasar digital sebagai <i>influencer</i>, <i>streamer</i>, <i>freelancer</i>, dan <i>virtual assistant</i> di platform digital.	• Digitalisasi membuka peluang ekonomi baru yang fleksibel • Kebutuhan tenaga kerja digital terus meningkat	• Pelatihan berlangsung selama 3-6 bulan • Target penghasilan digital tercapai dalam 1–3 bulan setelah pelatihan • Evaluasi dilakukan setiap 3 bulan.	• Program <i>Rural Youth Anchor</i> - China

D. Analisis Pemilihan Alternatif Kebijakan

Pemilihan alternatif kebijakan diperlukan untuk menentukan kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dimiliki. Ketepatan dalam memilih alternatif kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh kriteria penentuan kebijakan. Khairi (2014) menjelaskan bahwa penentuan kriteria kebijakan dilakukan sebagai proses untuk mengidentifikasi informasi-informasi yang detail dan relevan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Berbagai pendekatan dapat dipilih untuk menentukan aspek-aspek kriteria alternatif kebijakan sebagai dasar pemilihan kebijakan (LAN, 2015).

Bardach (2012) menawarkan 4 aspek kriteria dalam menentukan kriteria kebijakan, yaitu *Technical Feasibility*, *Economic and Financial possibility*, *Political Viability*, dan *Administrative Operability*. Berikut disajikan tabel hasil analisis pemilihan alternatif kebijakan dengan menggunakan kriteria kebijakan oleh Bardach berdasarkan hasil FGD yang telah dilaksanakan dengan beberapa *stakeholder* terpilih yaitu Unit Teknis Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sosial, ILO, UN Women, Pakar Kewirausahaan, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Setda Provinsi DKI Jakarta, dan APINDO dengan jumlah keseluruhan adalah 33 Responden:

Tabel 7. Hasil Analisis Pemilihan Alternatif Kebijakan

Aspek Kriteria	PERENTA	Rise & Shine
<i>Technical Feasibility</i>	Tinggi Desain program yang fleksibel untuk berbagai	Sedang Sesuai tren ekonomi digital/<i>freelance</i> dan

Aspek Kriteria	PERENTA	Rise & Shine
	pendidikan dan terstruktur mengakomodasi minat wirausaha dan penempatan kerja. Berbasis potensi kewilayahan/lokal. Didukung pendampingan intensif dan akses permodalan.	pekerjaan fleksibel. - Kurang inklusif karena hanya relevan pada kelompok perempuan muda yang relatif memiliki akses internet dan literasi digital. - Perlu memastikan dukungan perangkat/infrastruktur untuk daerah 3T agar efektif.
Economic and Financial possibility	Tinggi - Peluang bantuan pembiayaan melalui Kemitraan Lintas Sektor (CSR, filantropi, dan lembaga keuangan) dapat mengurangi beban APBN/APBD. - Adanya dukungan platform yang sudah ada (SIAPKerja) sehingga dapat meminimalisir pembiayaan untuk ekosistem dasar program - Realistis dan berdampak pada ekonomi secara jangka panjang.	Sedang - Menggunakan platform daring sehingga lebih hemat biaya operasional. - Membutuhkan investasi awal untuk infrastruktur digital dan pendampingan. - Pendekatan kolaborasi dan kemitraan menjadi strategi utama untuk mengurangi beban fiskal negara. - Berpotensi memberi manfaat ekonomi jangka panjang. - Perlu antisipasi terhadap ketimpangan akses digital dan ketidakpastian pendapatan dalam ekonomi digital.
Political Viability	Tinggi Sejalan dengan RPJMN 2025 - 2029	Tinggi Sejalan dengan Agenda Digital Nasional,

Aspek Kriteria	PERENTA	Rise & Shine
	dan SDGs (Tanpa kemiskinan, kesetaraan gender, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) sehingga berpotensi mendapatkan dukungan politik dan publik. Selain itu, pendekatan kewilayahan juga membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah.	RPJPN 2045, dan SDGs, sehingga memiliki legitimasi politik yang kuat. Memiliki daya tarik politik dan sosial tinggi karena bersifat modern, progresif, dan berpihak pada kelompok rentan.
Administrative operability	Tinggi Dapat menggunakan struktur dan infrastruktur kelembagaan yang sudah ada (BPVP, BBPKK, SIAPKerja).	Sedang - Menggunakan infrastruktur dan kelembagaan digital yang sudah ada. - Terdapat kesenjangan digital (perangkat, internet) dan perlunya penguatan SDM lokal di daerah. - Perlunya mekanisme pelaporan digital serta pengawasan untuk mendukung transparansi. - Perlunya koordinasi lintas K/L

Berdasarkan analisis komparatif terhadap dua alternatif program pemberdayaan perempuan rentan; PERENTA dan Rise & Shine; menggunakan kerangka kriteria Bardach (2012), disimpulkan bahwa PERENTA menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih tinggi secara keseluruhan. Program ini dinilai lebih fleksibel, terjangkau, dan siap diimplementasikan secara luas di berbagai wilayah Indonesia, menjadikannya pilihan yang lebih

tepat untuk pemberdayaan dan penempatan perempuan dalam kemiskinan (desil 1). Program ini juga didukung kolaborasi dengan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi dengan memanfaatkan data perempuan rentan sebagai penerima manfaat yang sudah terhimpun dalam program tersebut. Kemudian PERENTA juga memiliki peluang untuk dapat berkolaborasi dengan Program Kartu Usaha dimana penerima manfaat akan didaftarkan kartu usaha afirmatif sebagai instrumen untuk mengakses peningkatan kapasitas, pemagangan, sertifikasi, legalitas usaha, dan pemasaran. Lebih lanjut, kolaborasi dengan Program Koperasi Desa Merah Putih juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi. Koperasi ini berpotensi menjadi wadah penguatan modal sosial dan ekonomi, di mana perempuan penerima manfaat tidak hanya memperoleh dukungan permodalan dan pelatihan, tetapi juga dapat mengembangkan unit usaha bersama yang berorientasi pada kemandirian desa.

PERENTA menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap keempat kriteria Bardach, yaitu *Technical Feasibility*, *Economic and Financial Possibility*, *Political Viability*, dan *Administrative Operability*. Keunggulannya terletak pada desain yang fleksibel dan berbasis potensi lokal, memerlukan infrastruktur sederhana, serta menggunakan skema pelaksanaan yang familiar di tingkat daerah dengan biaya implementasi yang relatif rendah. Selain itu, penggunaan infrastruktur kelembagaan yang sudah tersedia seperti BPVP, BBPKK dan SIAPKerja memastikan program ini lebih siap dijalankan secara luas dan cepat. Namun dalam aspek kelayakan teknis, program ini perlu memastikan keberlanjutan usaha dan konsistensi monitoring. Dalam aspek kelayakan ekonomi, program ini perlu anggaran yang cukup untuk pendampingan dan modal awal. Pada aspek *political viability*, program perlu regulasi yang kuat agar tepat sasaran. Pada aspek *administrative operability*, program perlu Monitoring & Evaluasi (Monev) yang sistematis dan transparan untuk memastikan

akuntabilitas program, serta penguatan koordinasi lintas K/L dan Pemda serta penguatan kapasitas SDM pengelola

Meskipun *Rise & Shine* menawarkan pendekatan inovatif berbasis digitalisasi ekonomi dan memiliki daya tarik politik tinggi, program ini menghadapi tantangan signifikan terkait *Technical Feasibility* dan *Administrative Operability* di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Sedangkan terkait aspek dukungan politik program ini perlu strategi komunikasi publik dan regulasi pendukung. Dengan mempertimbangkan tujuan program untuk pemberdayaan dan penempatan perempuan dalam kemiskinan dan keterbatasan sumber daya di banyak daerah, PERENTA lebih memenuhi kriteria kebijakan yang fleksibel, terjangkau, dapat diterima secara politik, dan mudah dioperasikan. Oleh karena itu, PERENTA direkomendasikan sebagai program alternatif yang lebih tepat untuk diimplementasikan secara nasional dalam kerangka pemberdayaan dan penempatan perempuan dalam kemiskinan.

BAB V REKOMENDASI DAN KESIMPULAN

A. Rekomendasi Kebijakan

1. Gambaran Umum

Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil berdasarkan teknik analisis kebijakan yang dilakukan adalah Program “Perempuan Mandiri Tenaga Kerja Nusantara”.

Tabel 5.1 Uraian “Perempuan Rentan Bekerja (PERENTA)”

Gambaran Umum Program	
Program	Perempuan Rentan Bekerja (PERENTA)
Tujuan	Mendukung perempuan rentan dengan kondisi kemiskinan untuk mendapatkan kemudahan akses terkait lowongan pekerjaan dan ekosistem wirausaha.
Kriteria Peserta	• Perempuan • Berusia 31-59 Tahun • Mengalami kerentanan ekonomi (berada dalam desil 1) • Tidak bekerja atau tidak berwirausaha
Target	• Tersedianya pelatihan kewirausahaan berbasis potensi kewilayahan dan ekosistem kewirausahaan termasuk pendampingan, dan akses permodalan • Tersedianya pelatihan vokasi berbasis potensi, minat, dan bakat peserta, serta kebutuhan

industri dan akses penempatan peserta pelatihan vokasi ke industri

Langkah Strategis

Sosialisasi	Melakukan kegiatan sosialisasi program PERENTA secara masif melalui berbagai media (massa & elektronik). Selain itu, perlu partisipasi dari unit teknis atau dinas yang membidangi ketenagakerjaan dalam menyebarluaskan program di daerah masing-masing.
Pemetaan	Melakukan pendataan dan pemetaan perempuan rentan dalam kemiskinan berdasarkan minat serta potensi individu, sekaligus melakukan <i>screening</i> awal untuk pemberian bantuan permodalan. Hasil pemetaan akan digunakan sebagai dasar pendaftaran Kartu Usaha Afirmatif (Tenaga kerja atau pengusaha).
Mekanisme Pemberdayaan	• Individu dengan minat wirausaha diarahkan ke skema pemberdayaan yang berbasis potensi kewilayahan dengan membentuk kelompok yang beranggotakan 8–10 dengan satu orang pendamping. • Pelatihan kewirausahaan difokuskan pada pelatihan keterampilan. • Saat mereka akan membentuk usaha, maka diberikan modal usaha dalam bentuk pinjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 24 bulan. • Apabila sudah dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan diberi pinjaman modal untuk ekspansi usaha dengan skema yang sama dan plafon yang lebih tinggi. • Mereka didampingi selama satu tahun sejak usaha tersebut dibentuk.

	• Fasilitasi kegiatan promosi produk usaha yang dihasilkan oleh peserta. • Graduasi bagi peserta yang dinyatakan telah mandiri.
Mekanisme Penempatan	• Peserta diberikan bimbingan dan konseling untuk menggali potensi dan minat mereka kemudian diarahkan ke jenis industri yang sesuai. • Individu dengan minat bekerja diarahkan ke skema penempatan dengan membentuk kelompok pelatihan vokasi yang berdasarkan jenis industri dan beranggotakan 8 – 10 dengan satu orang konselor (Pelatihan dapat menerapkan konsep <i>Project Based Learning</i>). • Pelatihan vokasi difokuskan pada kebutuhan industri. • Setelah menyelesaikan program pelatihan mereka ditempatkan di perusahaan-perusahaan berdasarkan fasilitasi dari Ditjen Binapenta dan PKK. • Bagi perusahaan yang berhasil mempekerjakan peserta pelatihan diberikan PERENTA <i>awards</i>.
Monitoring & Evaluasi Pemberdayaan	• Kelompok peserta program memberikan laporan terkait dengan usaha mereka secara triwulanan, yang mencakup: perkembangan usaha, arus keuangan, dsb. kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Pendamping kelompok usaha. • Laporan disampaikan melalui sistem pelaporan terintegrasi berbentuk website/aplikasi.
Monitoring & Evaluasi Penempatan	• Perusahaan mitra memberikan laporan secara triwulanan terkait dengan peserta program, yang mencakup: jumlah peserta pelatihan yang berhasil ditempatkan, posisi atau jabatan, dan

aktivitas harian selama bekerja kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Binapenta dan PKK.

- Laporan disampaikan melalui sistem pelaporan terintegrasi berbentuk website/aplikasi.

Skema pemberian modal usaha dalam program PERENTA dapat disinergikan dengan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang dikelola oleh Ditjen Binapenta dan PKK serta Koperasi Desa Merah Putih dan Kartu Usaha. Kemudian, untuk mendukung mekanisme penempatan peserta program PERENTA, diperlukan penerbitan regulasi khusus terkait kewajiban penempatan perempuan dari kelompok miskin rentan di dunia industri, dengan proporsi minimal 1 persen, sebagaimana telah diterapkan pada skema penempatan penyandang disabilitas. Perlu disusun regulasi yang mendorong perusahaan untuk aktif menyediakan kesempatan kerja bagi kelompok perempuan rentan miskin, dengan pemberian reward sebagai bentuk apresiasi bagi perusahaan yang berkomitmen menjalankan kebijakan tersebut. Selain itu untuk keberlanjutan kajian ini diperlukan adanya *Pilot Project* Program PERENTA.



Gambar 4.1 Langkah Strategis Program PERENTA

2. Ekosistem Program PERENTA

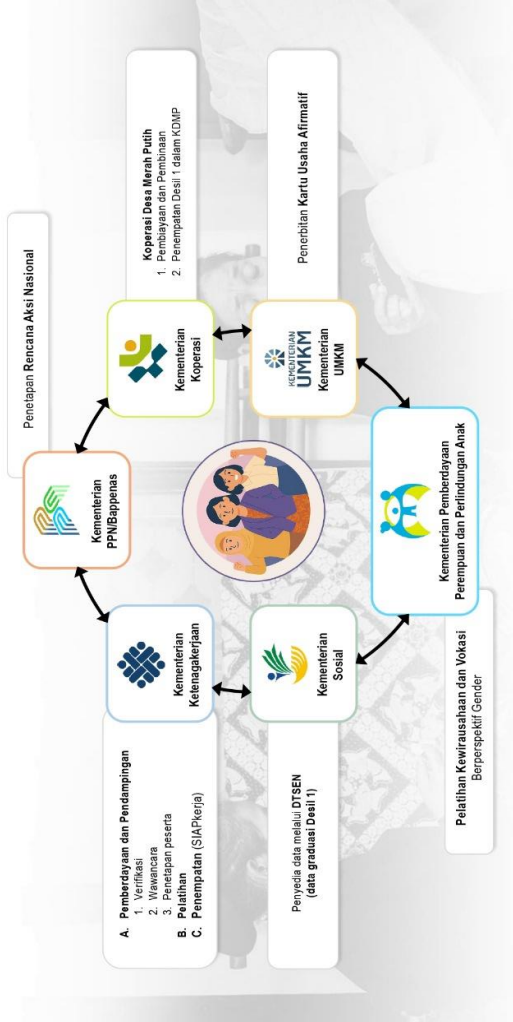
Program Perempuan Rentan Bekerja (PERENTA) dirancang untuk menyediakan program yang fleksibel berbasis pada kewirausahaan dan penempatan melalui pelatihan dan dukungan ekosistem bagi perempuan rentan miskin yang ingin berwirausaha atau bekerja. Program ini menyasar perempuan rentan usia 31 hingga 59 tahun dengan kondisi kemiskinan (desil 1). Program ini tidak berdiri sendiri dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai *stakeholder* utama, melainkan juga memerlukan kolaborasi lintas K/L seperti Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, dan Bappenas.

Tabel 5.2 Ekosistem Program PERENTA

No.	Instansi	Program	Irisan	Peran
1.	Kementerian Sosial	Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi	Menyasar masyarakat yang terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah menerima bantuan selama lebih dari 5 tahun dan siap graduasi. Salah satu sasaran program ini adalah perempuan rentan.	Penyedia Data melalui DTSEN
2.	Kementerian UMKM	Kartu Usaha	Memiliki skema kartu usaha afirmatif yang menyasar kelompok masyarakat umum kategori miskin dan rentan (desil 1 - desil 4).	Penerbitan kartu usaha
3.	Kementerian Koperasi	KDMP	Menyediakan skema pendanaan bagi masyarakat desa/kelurahan setempat melalui skema dana Koperasi Desa	Bantuan Modal Usaha melalui Koperasi Desa

No.	Instansi	Program	Irisan	Peran
			bergulir dan simpan pinjam.	Merah Putih
4.	Kementerian PPN/Bappenas		Memiliki peran dalam penetapan PERENTA sebagai program prioritas nasional.	Penetapan Rencana Aksi Nasional
5.	Kementerian Ketenagakerjaan	Perempuan Rentan Bekerja (PERENTA)	Program fleksibel berbasis pada pemberdayaan dan penempatan melalui pelatihan dan dukungan ekosistem bagi perempuan rentan miskin yang ingin berwirausaha atau bekerja.	Verifikasi peserta, wawancara, dan penetapan peserta penerima manfaat
6.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Berspektif Gender	Memiliki program pelatihan kewirausahaan dan pelatihan vokasi yang berperspektif gender.	Kolaborasi dalam penetapan kurikulum pelatihan.

EKOSISTEM PERENTA



Gambar 4.2 Ekosistem Program PERENTA

Tabel 5.3 Rencana Aksi “Perempuan Rentan Bekerja (PERENTA)”

Tahun	Tahapan	PIC	Target	Sumber daya
2026	Penguatan kolaborasi dan koordinasi dalam rangka ekosistem pemberdayaan	• Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Sosial • Kementerian UMKM • Kementerian Koperasi • Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Organisasi Masyarakat Sipil	Perjanjian Kerja Sama dan <i>Pilot Project</i>	• Tim penyusun

3. *Pilot Project* Program PERENTA

Pilot Project Program PERENTA adalah tahapan kritis untuk menguji, mengevaluasi, dan menyempurnakan seluruh kerangka program sebelum diimplementasikan secara luas (skala nasional). *Pilot project* akan difokuskan untuk mencapai beberapa hal berikut:

- a. Menguji efektivitas skema pemberian modal usaha PERENTA dalam penyaluran dan pengembalian, serta bagaimana sinerginya dengan Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Koperasi Desa Merah Putih, dan Kartu Usaha benar-benar bekerja di lapangan. Tujuannya adalah memastikan semua program saling memperkuat.
- b. Mengukur kebutuhan regulasi kewajiban penempatan 1% perempuan miskin rentan di dunia industri. Hal ini mencakup pengumpulan data tentang jumlah perusahaan yang berpartisipasi, tantangan dalam penempatan, dan efektivitas mekanisme pemberian *reward* kepada perusahaan.
- c. Mengukur perubahan nyata pada tingkat pendapatan, kepemilikan usaha, dan peningkatan keterampilan (kapasitas) dari peserta perempuan miskin rentan yang mengikuti program.
- d. Mendeteksi kendala operasional, birokrasi, atau budaya yang muncul di tingkat desa/daerah. Hasilnya akan digunakan untuk merumuskan model yang lebih kuat dan model pelatihan yang paling efektif.

Pemilihan beberapa wilayah akan didasarkan pada kriteria tertentu untuk memastikan representasi yang beragam:

- a. Memilih wilayah dengan profil kemiskinan yang berbeda (misalnya satu wilayah dengan kemiskinan berbasis pedesaan/pertanian dan satu wilayah dengan kemiskinan

- berbasis perkotaan/industri) untuk menguji program di wilayah yang bervariasi.
- b. Mempertimbangkan daerah yang memiliki kelembagaan lokal yang cukup kuat (misalnya dukungan Pemerintah Daerah yang tinggi) untuk mempermudah koordinasi.
 - c. Memilih wilayah yang memiliki sektor industri atau usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang cukup aktif.

Pilot project akan dilaksanakan dengan evaluasi berbasis data yang ketat sebagai berikut:

- a. Pengambilan data awal sebelum program berjalan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan sosial peserta.
- b. Melakukan kunjungan lapangan dan pengumpulan data rutin terkait penyaluran modal, pelatihan, dan penyerapan tenaga kerja.
- c. Pengukuran dampak akhir program setelah jangka waktu tertentu untuk membandingkannya dengan data awal dan merumuskan rekomendasi final untuk peluncuran program skala penuh.

Untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan analisis kebijakan serta implementasi Program PERENTA, diperlukan *Pilot Project* yang dapat dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mengukur efektivitas program dalam mendukung perempuan rentan dengan kemiskinan untuk mendapatkan kemudahan akses terkait penempatan kerja dan kewirausahaan. *Pilot Project* dapat dilaksanakan di beberapa wilayah berdasarkan pada DTSEN Kemensos, ataupun wilayah yang menjadi lokus dalam pelaksanaan *Pilot Project* program kolaborator. *Pilot project* dikatakan berhasil apabila 75 persen peserta berhasil membentuk usaha maupun ditempatkan di perusahaan, serta mampu meningkatkan taraf hidup penerima manfaat. Diharapkan melalui *pilot project* ini

dapat diperoleh data konkret terkait efektivitas program, tantangan, dan evaluasi untuk penerapan program dalam skala yang lebih besar di tingkat nasional.

Penerapan proyek percontohan ini menjadi krusial sebagai uji coba lapangan untuk memvalidasi dan menyempurnakan skema pemberian modal usaha, sinergi dengan program lain seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Koperasi Desa Merah Putih, dan Kartu Usaha. Selain itu, pilot project akan memberikan data yang berharga terkait kebutuhan regulasi khusus kewajiban penempatan minimal 1 persen perempuan dari kelompok miskin rentan di dunia industri, termasuk mekanisme *reward* bagi perusahaan yang berkomitmen. Pengalaman langsung dari pilot project di berbagai lokasi akan mengidentifikasi potensi hambatan, mengukur dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan, dan memungkinkan perumusan kebijakan dan strategi implementasi yang paling optimal dan menyeluruh sebelum program ini diperluas secara nasional.

Untuk memastikan hasil *pilot project* dapat diukur secara konkret, diperlukan identifikasi kriteria penerima manfaat berdasarkan tingkat kerentanan. Kriteria ini digunakan sebagai acuan untuk menilai sejauh mana program mampu mengubah kondisi perempuan dari kategori rentan menuju tidak rentan. Kriteria rentan meliputi pendapatan rendah dan tidak stabil, bergantung pada satu sumber penghasilan, rendahnya TPAK perempuan, dan tergolong dalam desil 1. Kemudian, kelompok penerima manfaat termasuk dalam kriteria tidak rentan apabila setelah diintervensi oleh program terdapat peningkatan pendapatan, pembentukan usaha berkelanjutan, peningkatan TPAK perempuan, dan perpindahan status kesejahteraan dari desil 1 ke desil 2.

B. Kesimpulan

Masih tingginya jumlah perempuan rentan yang hidup dalam kemiskinan, terutama yang tidak memiliki pekerjaan, menjadi masalah sosial dan ekonomi yang mendesak di Indonesia. Sebanyak 9,68 persen (sekitar 13.349.000 jiwa) dari perempuan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2023 (Kementerian PPPA, data olahan Pusbangjak 2025). Data menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap pasar kerja formal dan rendahnya tingkat pendidikan merupakan faktor utama yang memperparah kerentanan perempuan. Perempuan yang berada dalam kondisi kemiskinan membutuhkan dukungan, perhatian, dan intervensi khusus melalui program pemberdayaan sesuai dengan tingkat pendidikan agar dapat mencapai taraf hidup yang layak. Hasil *benchmarking* penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan di beberapa negara seperti India, Nepal, Brazil, dan Malaysia, dan hasil FGD dengan melibatkan K/L dan institusi lain menjadi referensi untuk strategi yang efektif dalam menanggulangi persoalan ini adalah dengan menggabungkan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dan program penempatan kerja yang terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan intervensi yang menyasar dua pendekatan utama: pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan pendampingan wirausaha serta fasilitasi penempatan kerja dengan sistem yang inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial perempuan rentan.

Saran rekomendasi kebijakan yang paling tepat adalah penyusunan Program “Perempuan Rentan Bekerja (PERENTA)” yang menyediakan pelatihan dan ekosistem kewirausahaan, serta pelatihan vokasi dengan fasilitasi akses penempatan peserta. Program ini memerlukan dukungan regulasi untuk dukungan penempatan tenaga kerja pada

kelompok perempuan rentan miskin oleh dunia industri. Dengan pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan, diharapkan kelompok perempuan rentan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan memperoleh penghidupan yang lebih layak dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2023). Socially and Economically Vulnerable Women: Building Strategies to Move Out of Poverty. *Prisma Sains : Jurnal Pengkajian Ilmu dan Pembelajaran Matematika dan IPA IKIP Mataram*, 11(2), 316-324. doi:<https://doi.org/10.33394/j-ps.v11i2.7486>
- Adnan, G., & Amri, K. (2020). Apakah Pendapatan Perempuan Dapat Mengurangi Kemiskinan? Bukti Data Panel di Indonesia. *Inovbiz*, 8(1) pp. 64-71, doi:10.35314/inovbiz.v8i1.1235.
- Alemu, N. E., Temesgen, E., & Dessiye, M. (2023). Do gender roles affect urban poverty in Ethiopia? A focus on women in micro and small enterprises. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2216509>
- Anele, & Philomene. (2024). The Factors determining female unemployment in South Africa: Evidence from the 2021 Labour Force Survey. *Journal of African Population Studies*, 37(1). https://doi.org/10.59147/japs_d8tz7upv
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (n.d.). *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin*. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 11, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjlwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (n.d.). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Februari 2024*. Badan Pusat Statistik. Retrieved June 11, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/06/07/112a10c79b8cfa70eec9f6f3/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2024.html>.

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (n.d.). *Tingkat Partisipasi angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin - Tabel statistik*. Badan Pusat Statistik Indonesia. Retrieved June 11, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024 Volume 42*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bardach, E. (2012). *A Practical Guide for Policy Analysis*. London: Sage Publisher.
- Benzaghta, M. A., Elwalda, A., Mousa, M. M., Erkan, I., & Rahman, M. (2021). SWOT analysis applications: An integrative literature review. *Journal of Global Business Insights*, 6(1), 55-73. <https://www.doi.org/10.5038/2640-6489.6.1.1148>
- Berki, B., Málovics, G., & Crețan, R. (2025). Aspirations versus reality: Factors influencing the vertical social mobility of urban Roma mothers living in extreme poverty. *Habitat International*, 158, 103334. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2025.103334>
- Birhane Bezabh, G., Kumar, B., Rajput, N., & Srivastava, M. (2022). *Determinants of urban poverty in the case of female headed households of Ibinat Town*. ScienceOpen. <https://doi.org/10.14293/s2199-1006.1.sor-ppqyrze.v1>.
- Bisjoe, A. R. H. (2018). MENJARING DATA DAN INFORMASI PENELITIAN MELALUI FGD (Focus Group Discussion): BELAJAR DARI PRAKTIK LAPANG. *Info Teknis EBONI*, 15(1), 17–27.
- Chakravarty, S., Lundberg, M., Nikolov, P., & Zenker, J. (2019). Vocational training programs and youth labor market outcomes: Evidence from Nepal. *Journal of Development Economics*, 136, 71–110. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.09.002>.
- Chang, J. H., Viveros, J. L., & Wirth, L. (2019). *Women in business and management: The business case for*

- change*. International Labour Organization, Geneva.
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_700953/lang--en/index.htm
- Corcetti, E., & Souza, S. P. (2023). *The Discursive Construction of the Thousand Women Program in Brazil*. *Public Administration Research*, 11(2), 1-7.
- Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY). (n.d.). *Deendayal Upadhyaya – Grameen Kaushalya Yojana - DDU-GKY*. National Institute of Rural Development. Retrieved June 9, 2025, from <https://nirdpr.org.in/ddugky.aspx>.
- Dewi, A. P. (2023). 9,68 persen Perempuan Indonesia Hidup di Bawah Garis Kemiskinan. ANTARA. Diakses pada 26 Juni 2025 dari <https://www.antaranews.com/berita/3676863/968-persen-perempuan-indonesia-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan>.
- Dewi, Y. N., Melati, E., Munawwaroh, K., Silfia, E., & Sadjiran, S. (2023). PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PESISIR INDONESIA. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 784–792. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i1.2658>
- Dixit, K. (2025, June 2). Over 2.8L rural women are now self-reliant in dist. *Times of India*. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/over-2-8l-rural-women-are-now-self-reliant-in-dist/articleshow/121553717.cms>
- Durgalashmi. C. V., & Taramol. K. G. (2024). The Role of Microfinance to address Poverty Alleviation and Women Empowerment in Kerala, India . *EVOLUTIONARY STUDIES IN IMAGINATIVE CULTURE*, 1204–1216. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.2351>
- Ekblad, P. (2022, 12 Agustus). Pemuda adalah kekuatan baru bagi revitalisasi pedesaan. *United Nations in China*.

- <https://china.un.org/zh/194635-%E9%9D%92%E5%B9%B4%E6%98%AF%E4%B9%A1%E6%9D%91%E6%8C%AF%E5%85%B4%E7%9A%84%E6%96%B0%E5%8A%A8%E5%8A%9B> (Diakses pada 15 Agustus 2025)
- Ergo, A. E., Connor, D. O., & Mega, T. L. (2022). Status and determinants of poverty among women-owned micro-businesses in Wolaita zone, southern Ethiopia. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 17(6), 1439–1466. <https://doi.org/10.1108/jec-03-2022-0043>
- Fajarwati, A., Wardhani, A. G., & Sintesa, M. P. (2020). Journey of researches on gender and disaster in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 451(1), 012048. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/451/1/012048>.
- Farizal, N., & Habibi, N. (2024). Analysis of the Reorientation of the National Vocational Training Development Program. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 87-101.
- Faturohim, A., Akbar, A., Hidayat, B. A., & Saksono, H. (2023). An Analysis of Urban Poverty and Unemployment. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 309–324. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.309-324>.
- Firmansyah, C. A., Suherman, M. F., Akmal, P. N., Anisa, F. A., & Sihalohe, E. D. (2023). Diagnosing Poverty Eradication Through Literacy: Analysis from Indonesia National Socioeconomic Survey. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 190-201.
- Gender, social protection and resilience*. (n.d.). Innocenti Global Office of Research and Foresight. Retrieved June 11, 2025, from <https://www.unicef.org/innocenti/stories/gender-social-protection-and-resilience>
- Gürel, E. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. <http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1832>

- Hafizah, S. N., et al. (2010). A case study of collective action in Fishermen's Wives Group (KUNITA), Malaysia. *International Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(12), 2259–2264.
- Harrison, J. S. & St. John, C. H. (2004). Foundations in Strategic Management, (3.Baskı), USA: South Western.
- Hashim, W., et al. (2019). Fishing community wireless network concept in Kuala Rompin, Pahang, Malaysia. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, 8(2S8), 1889–1894. <https://doi.org/10.35940/ijrte.B1195.0882S819>
- Hebei Province. (2023). *[Policy Interpretation] Live broadcast to help farmers - a new e-commerce model for rural revitalization*. Retrieved June 11, 2025, from <https://mp.weixin.qq.com/>
- International Labor Organization (ILO). (2024). Skills for gender equality. Diakses pada 15 Juni 2025 dari <https://www.ilo.org/skills-gender-equality#:~:text=Household%2C%20community%20and%20care%20responsibilities,status%20and%20challenge%20social%20perceptions>
- International Labor Organization (ILO). (2023). Women and men in the informal economy: A statistical update. International Labour Organization. <https://www.ilo.org/publications/women-and-men-informal-economy-statistical-update>
- Irwansyah. (2024). Tipologi Literature Review dalam Metode Penelitian. In *Tipologi Literature Review Dalam Metode Penelitian*. Penerbit Mitra Cendekia Media.
- Jaglan, M., & Shergill, A. (2023). Gender and urban poverty in India. *Third World Quarterly*, 44(12), 2462–2480. <https://doi.org/10.1080/01436597.2023.2237426>
- Jerumeh, T. R. (2024). Incidence, intensity and drivers of multidimensional poverty among rural women in Nigeria. *Heliyon*, 10(3), e25147. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25147>

- Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia. 2018. *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*. Jakarta: Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas.
- Khairi, H. (2014). *Modul 1: Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Analisis Kebijakan Pendidikan Nasional. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Khanna, R., Sheth, M., Talati, P., Damor, K., & Chauhan, B. (2022). Social and economic marginalisation and sexual and reproductive health and rights of urban poor young women: A qualitative study from Vadodara, Gujarat, India. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 29(2). <https://doi.org/10.1080/26410397.2022.2059898>
- Kudumbashree NRO. (2024). *Kudumbashree NRO*. <https://kudumbashreenro.org/about> (diakses pada 8 Juni 2025).
- Kudumbashree Story. Kudumbashree. <https://kudumbashreestory.in/index.php/what%E2%80%99s-kudumbashree> (diakses pada 8 Juni 2025).
- Kudumbashree. (2025). *Kudumbashree*. <https://www.kudumbashree.org> (diakses pada 11 juni 2025).
- Laili, M. H., & Damayanti, A. (2018). Kesenjangan upah antargender di Indonesia: Bukti empiris di sektor manufaktur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 18(3), 1. https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol18/iss3/1?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Fjepi%2Fvol18%2Fiss3%2F1&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
- Larasati, N. P. A. (2021). Gender inequality in Indonesia: Facts and legal analysis. *Law Research Review Quarterly*, 7(4), 445–458. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48170>
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. (2015). *Modul IV Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

- Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. (n.d.). *Fisherman's Wives Group (KUNITA)*. Retrieved June 9, 2025, from <https://www.lkim.gov.my/en/womens-fisherman-group/>.
- Lenhardt, A. (2024). *Ending extreme poverty in an increasingly urbanised world*. Data and Evidence to End Extreme Poverty. <https://doi.org/10.55158/deeptp5>
- Ministry of Rural Development. (2017). *National Rural Livelihood Mission. Manual for District Level Functionaries*. DarpG.Gov.In. <https://darpG.gov.in/sites/default/files/National%20Rural%20Livelihood%20Mission.pdf>
- Ministry of Rural Development. (2016). *DDU-GKY 2.0 Guideline*. Retrieved June 9, 2025, from https://rural.gov.in/sites/default/files/DDUGKY_Guidelines_English_1.pdf.
- Ministry of Rural Development. (2025). *SVEP-NRETP*. Svp.Nrlm.Gov.In. <https://svpe.nrlm.gov.in/landing>
- Ministry of Rural Development. (n.d.). *Deen Dayal Upadhyay Grameen Kaushalya Yojana*. myScheme. Retrieved June 9, 2025, from <https://www.myscheme.gov.in/schemes/ddugku>.
- Ministry of Rural Development. (n.d.). *Deendayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihoods Mission*. Retrieved June 7, 2025, from <https://aajeevika.gov.in/>.
- Ministry of Rural Development. (n.d.). *Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission*. <https://aajeevika.gov.in/> (diakses pada 08 Juni 2025).
- Ministry of Women of Brazil. *National Report 2024*. Brasília: Governo Federal do Brasil, 2024.
- Muchlis, N. S. F., Kamaruddin, C. A., Rajab, A., & Astuty, S. (2025). PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN KELOMPOK WANITA NELAYAN KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS KWN FATIMAH AZ-ZAHRA). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 532–541. <https://doi.org/10.46576/bn.v8i1.6207>
- Muh. Watif, Aulya Ramadhani.JT, Jumiaty, Luthfiah Syam

- Almazini Tahir, & Nurul Hikmah. (2024). Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan Pada Masyarakat Perkotaan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(4), 536–547.
<https://doi.org/10.56799/peshum.v3i4.3811>
- Mukaila, R., Falola, A., & Akanbi, S.-U. O. (2021). Socioeconomic determinants of income among rural women in Enugu state, Nigeria: Implication for achieving first sustainable development goal. *Journal of Agribusiness and Rural Development*, 59(1), 363–370.
<https://doi.org/10.17306/j.jard.2021.01450>
- Munnell, A. H., Sanzenbacher, G., & Zulkarnain, A. (2020). What factors explain the decline in widowed women's poverty? *Demography*, 57(5), 1881–1902.
<https://doi.org/10.1007/s13524-020-00915-2>
- Nepal Employment Fund – Nepal – youth policy toolbox. (n.d.). Retrieved June 9, 2025, from <https://yptoolbox.unescapsdd.org/portfolio/nepal-employment-fund/>.
- Nie, C., & Wang, H. (2020). A study on the influencing factors of rural womens poverty in northeast China. *Asian Economic and Financial Review*, 10(12), 1410–1429.
<https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1012.1410.1429>
- Nisak, S. S., & Sugiharti, L. (2020). Gender inequality and women poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(9), 375-387.
- Paramita, A., & Kristiana, L. (2013). Teknik Focus Group Discussion dalam Penelitian Kualitatif. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 12(2), 117–127.
- Parida, J. K., & Bhagavatula, N. (2022). *The labour market dilemma of young urban women in India:An Outcome of family welfare optimization*. Research Square Platform LLC. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2107157/v1>
- Phadermrod, B., Crowder, R. M., & Wills, G. B. (2019). Importance-performance analysis based SWOT

- analysis. *International journal of information management*, 44, 194-203. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2016.03.009>
- Poverty and employment in crisis situations: The gender dimensions*. (2003, May 1). International Labour Organization. <https://www.ilo.org/publications/poverty-and-employment-crisis-situations-gender-dimensions>
- PIB Delhi. (2024). *Status of Start-Up Village Entrepreneurship Programme under National Rural Livelihoods Mission*. Retrieved June 8, 2025, from pib.gov.in.
- Press Information Bureau Delhi. (2023, Desember 13). Outcome of SHG Bank Linkage Project [Press release]. <https://www.pib.gov.in/PressReleaselframePag.e.aspx?PRID=1985779> (diakses pada 8 Juni 2025)
- Provinsi Hebei. (2023, July 19). *[Interpretasi Kebijakan] Siaran langsung untuk membantu petani: model e-commerce baru untuk revitalisasi pedesaan*. Weixin.Qq.Com. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIxMDQ3OTA2Nw==&mid=2247490598&idx=1&sn=0e8fa11cb8e2f3a2e62bc79c5dd4ada5
- Pujiwati, L. A., Fatoni, Z., Alabshar, N., Harfina, D., Munawaroh, T., & Widaryoko, N. (2024). Determinants of household extreme poverty among female-headed households in indonesia: Does disability matter? *Journal of Poverty*, 29(4), 308–330. <https://doi.org/10.1080/10875549.2024.2338156>
- Rohmatilah, D. A. (2023). The Role of Gender Equality on Poverty Alleviation: Case of Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan. The Indonesian Journal of Development Palnning Volumen VII No.2*, 272-287.
- Saepudin, A., Susanto, E., Ningrum, D., Retno Anggraini, D., & Rindiani, A. (2024). Membangun Kemandirian Perempuan Melalui Keterampilan Kewirausahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *E-Coops-Day*, 5(1), 151–158. <https://doi.org/10.32670/ecoopsday.v5i1.4189>

- Salam, A., Suwandana, E., Watekhi, W. (2024). *Bekerja Tetapi Tetap Miskin, Apakah Permasalahan Kemiskinan Multidimensi?* Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia: Vol. 24: No. 1, Article 6. DOI: 10.21002/jepi.2024.06
- Santos, M. A. P., & Freitas, C. C. G. F. (2014). *O Programa Mulheres Mil no Brasil, ações para a inclusão social da mulher.*
- Siddiqui, F., & Parveen, S. (2024). Female-based urban poverty in parts of Sehore city, India. *Quaestiones Geographicae*, 43(2), 17–35. <https://doi.org/10.14746/quageo-2024-0017>
- Simanjuntak, D. (2025, September 1-7). Kerentanan Perempuan sebagai Pekerja Sektor Informal. *Isu Sepekan Bidang Kesra, Komisi VII Badan Keahlian DPR RI.*
- Skills for gender equality.* (2024, September 19). International Labour Organization. <https://www.ilo.org/skills-gender-equality>
- Suasridewi, D. G., Latupeirissa, J. J. P., Suryawan, I. M. Y., Natashya, R., Mufida, I., & Supriyani, A. (2024). TRANSFORMASI EKONOMI DAN SOSIAL: DAMPAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI INDONESIA BERDASARKAN KAJIAN LITERATUR. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 12–27. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i2.310>
- Thompson, A. A. & Strickland, A. J. (1989). *Strategy Formulation and Implementation*, (4th Edition), USA: Irwin, Inc.
- Ülgen, H. & Mirze, S. K. (2010). *İşletmelerde Stratejik Yönetim*, (5. Baskı), İstanbul: Beta Basım Yayım.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). Gender, social protection and resilience. Diakses pada 15 Juni 2025 dari https://www.unicef.org/innocenti/stories/gender-social-protection-and-resilience?utm_source=chatgpt.com

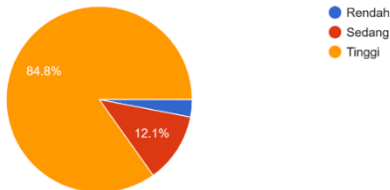
- Vargas, L. G. (1990). An overview of the analytic hierarchy process and its applications. *European Journal of Operational Research*, 48(1), 2–8. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(90\)90056-h](https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90056-h)
- Visnawath, Sreeram. (2019). *Start-Up Village Entrepreneurship Programme*. Retrieved June 8, 2025, from <https://www.indiafilings.com/learn/startup-village-entrepreneurship-programme/>.
- Wikipedia. (2025). *Kudumbashree*. <https://en.wikipedia.org/wiki/Kudumbashree> (diakses pada 8 Juni 2025).
- World Bank. 2024. Employment to population ratio. World Bank Data. Diakses pada 15 Juni 2025 dari <https://data.worldbank.org/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS>
- World Without Poverty (WWP) Brazil Learning Initiative. (2017). *Thousand Women (Mulheres Mil) Program Federal District*. Ministry of Social Development of Brazil. <https://wwp.org.br/en/publication/thousand-women-mulheres-mil-program-federal-district-df-wwp-productive-inclusion-reports-series/> (Diakses pada 8 Juni 2025).
- Zanbak, M., & Soycan, S. (2023). Econometric analysis of factors affecting women's multidimensional poverty. *Women's Studies International Forum*, 100, 102800. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102800>
- Zhu, X., Li, X., Gong, J., & Jinghong Xu. (2022). Technology empowerment: A path to poverty alleviation for Chinese women from the perspective of development communication. *Telecommunications Policy*, 46(6), 102328. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102328>
- (N.d.). Retrieved June 19, 2025, from <https://scholar.archive.org/work/3ns6gjqgfbgixgddnzvzxh6mbi/access/wayback/http://jurnal.untagsmq.ac.id/index.php/mia/article/download/2972/1773>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitan Hasil Kuesioner FGD Alternatif 1: Program Perempuan Rentan Bekerja (PERENTA)

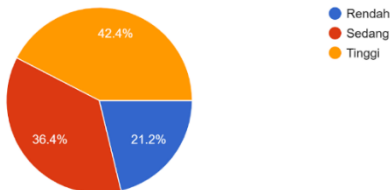
Secara teknis program PERENTA mampu memberdayakan perempuan rentan dalam kemiskinan ekstrem.

33 responses



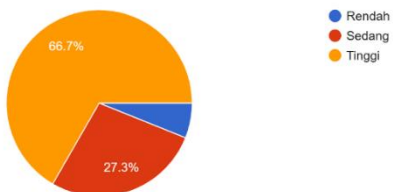
Pembiayaan program PERENTA bersifat realistis, tidak membebani fiskal, dan memberi manfaat ekonomi jangka panjang.

33 responses



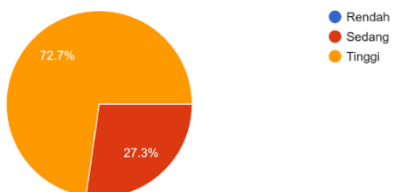
Program PERENTA ini sangat berpotensi didukung oleh aktor politik & publik.

33 responses



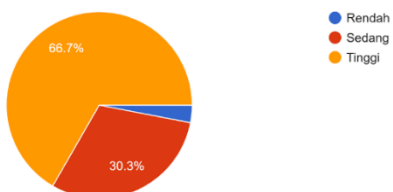
Program PERENTA sejalan dengan agenda pembangunan dan mendapat prioritas dalam alokasi sumber daya.

33 responses



Program PERENTA dapat dijalankan dengan kapasitas kelembagaan yang ada, termasuk mekanisme pelaporan dan pengawasan

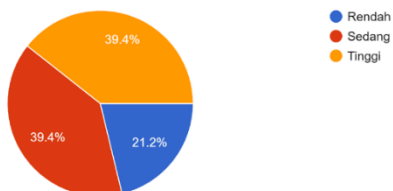
33 responses



Lampiran 2. Rekapitan Hasil Kuesioner FGD Alternatif 2: Program *Rise & Shine*

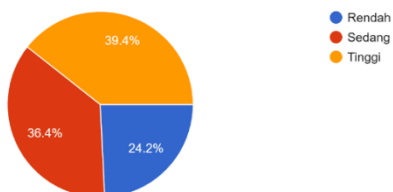
Secara teknis program *Rise & Shine* mampu memberdayakan perempuan rentan dalam kemiskinan ekstrem.

33 responses



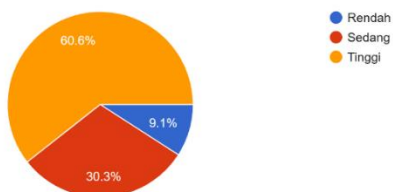
Pembiayaan program *Rise & Shine* bersifat realistis, tidak membebani fiskal, dan memberi manfaat ekonomi jangka panjang.

33 responses



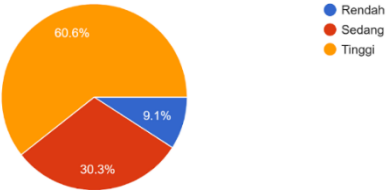
Program *Rise & Shine* ini memiliki potensi untuk didukung oleh aktor politik & publik.

33 responses



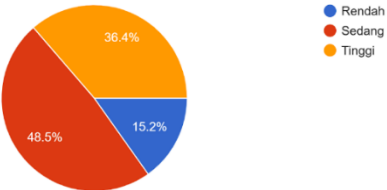
Program Rise & Shine sejalan dengan agenda pembangunan dan mendapat prioritas dalam alokasi sumber daya.

33 responses



Program Rise & Shine dapat dijalankan dengan kapasitas kelembagaan yang ada, termasuk mekanisme pelaporan dan pengawasan

33 responses





KEMNAKER

Model Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Perempuan Rentan dengan Kondisi Kemiskinan

**Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja**

Bekerja sama dengan:

**Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan
Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan**

- Tim Pendukung :
1. Firdausi Nuzula, S.Pd., M.Si.
 2. Warsini S.E., S.Pd.
 3. Puji Astuti, S.P.
 4. Wahyu Pitoyo, S.E., M.M.
 5. Ramos Guming, S.H.
 6. Bagas Suryo Pambuka, S.E.
 7. Junita Florin Bukit, S.E.
 8. Sulinda Nur Ramadhanti, S.E.
 9. Fira Firliza, S.E.
 10. Faizul Iqbal, S.M., M.M.
 11. Salma Qotrunada Agtari K., S.Ant.
 12. Ade Ronald Bayu Aringga, A.Md.

© 2025 Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus

Karya ini merupakan produk publikasi Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan.

Dilarang memperbanyak tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, *photoprint*, *microfilm*, dan sebagainya

